

FADEL MUHAMMAD: BAHAS GORONTALO SEBAGAI LUMBUNG PANGAN NASIONAL

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MPR RUMAH KEBANGSAAN



MAJELIS

EDISI NO.08/TH.XVII/AGUSTUS 2023

SIDANG TAHUNAN MPR DI TAHUN POLITIK TAK ADA LAGI **PEMBATASAN** **KEHADIRAN FISIK ANGGOTA**



ISSN 0854-6371
9 770854 637158

20 Nasional
Optimalkan Semua Potensi
Hadapi Dampak Elnino

30 Kajian MPR
Perubahan UUD untuk Menjawab
Perkembangan Peradaban

39 Selingan
Benteng Pendem
di Kota Ngawi

61 Sosialisasi
Pancasila Ideologi Negara
Tak Bisa Diperdebatkan Lagi



Daftar Isi



08 BERITA UTAMA

Sidang Tahunan MPR di Tahun Politik

Inilah Sidang Tahunan MPR dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR-DPD di tengah tahun politik. Sidang Tahunan MPR kali ini menjadi istimewa karena inilah Sidang Tahunan MPR terakhir menjelang Pileg (pemilihan anggota legislatif) dan Pilpres (pemilihan presiden) Pemilu 2024.



28 Nasional

Membangun Keluarga Berkualitas Menyongsong Indonesia Emas 2045



58 Sosialisasi

Bamsoet Ajak Sukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024



39 SELINGAN

Benteng Pendem di Kota Ngawi



74 Wawancara

Illiza Sa'aduddin Djamal

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	34
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	48
Varia MPR	68
Figur	76
Ragam	78
Kolom	82
Dari Rumah Kebangsaan	84
Rehal	86



COVER

Edisi No.08/TH.XVII/Agustus 2023

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Sidang Tahunan MPR Tahun 2023

PADA bulan Agustus ini sedikitnya ada tiga kegiatan penting di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertama, penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2023. Sidang Tahunan MPR sudah menjadi konvensi ketatanegaraan Indonesia yang digelar sejak tahun 2015. Kedua, peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2023. Pada tanggal itu, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945 sebelum amendemen) sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketiga, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 MPR RI. Pada tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai sebuah badan perwakilan. KNIP ini menjadi cikal bakal terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karena itu, setiap tanggal 29 Agustus diperingati sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) MPR.

Untuk ketiga kegiatan penting MPR di bulan Agustus itu, Pimpinan MPR sudah menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dengan agenda mematangkan persiapan Sidang Tahunan MPR, peringatan Hari Konstitusi, dan peringatan HUT Ke-78 MPR RI. Rapim yang digelar pada 14 Juni 2023, kemudian dilanjutkan pada 8 Agustus 2023, membahas persiapan Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus atau sehari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus, juga turut membahas persiapan peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI.

Selain menggelar Rapat Pimpinan (Rapim), Pimpinan MPR juga mengadakan Rapat Konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan DPD pada Senin, 10 Juli 2023. Rapat konsultasi ini untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR – DPD pada 16 Agustus 2023. Pimpinan MPR juga telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Konsultasi Pimpinan MPR dengan Presiden RI pada Rabu petang, 9 Agustus 2023.

Rapat konsultasi dengan Presiden itu salah satunya membahas mengenai persiapan Sidang

Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Usai Rapat Konsultasi, Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan bahwa Presiden Joko Widodo akan hadir dan menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen pada 16 Agustus 2023.

Sidang Tahunan MPR dikembalikan ke awal, seperti penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR sebelum pandemi Covid-19. Sidang Tahunan MPR dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR – DPD pada 16 Agustus 2023 digelar secara normal seperti sebelum pandemi Covid-19, sehingga tidak ada lagi pembatasan jumlah anggota MPR yang hadir. Sidang paripurna ini digelar tanpa protokol kesehatan karena pemerintah telah mencabut status pandemi Covid-19.

Sidang paripurna yang digelar secara sederhana dan simpel ini direncanakan dihadiri secara fisik oleh seluruh pimpinan, anggota DPR, anggota DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Sidang paripurna juga dihadiri para undangan termasuk pimpinan lembaga negara, duta besar negara-negara sahabat, dan para teladan.

Selain digelar tanpa pembatasan-pembatasan, Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2023 merupakan Sidang Tahunan MPR yang digelar di tahun politik. Sidang Tahunan MPR pada tahun ini menjadi istimewa karena merupakan Sidang Tahunan MPR terakhir sebelum pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden – wakil presiden (Pilpres) Pemilu 2024. Pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung pada 14 Februari 2024.

Melalui Sidang Tahunan MPR ini rakyat bisa mengetahui sejauh mana kinerja lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. Dengan penyampaian laporan kinerja lembaga negara melalui pidato Presiden, rakyat bisa mendengarkan sekaligus mengevaluasi dan mengapresiasi berbagai capaian yang telah diraih lembaga-lembaga negara tersebut. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Plt. Jenedjri M. Gaffar

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Dyastasita, Heri Herawan,
Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Indro Gutomo

KOORDINATOR REPORTASE

Euis Karmila

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,

Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Yenita Revi, Try Syilvani,

Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta ,

Alfonso DK Tahapary

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Faridz Rizky,

Wira, Subhan

PENANGGUNG JAWAB/

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayat

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Anggun Permana,

Achmad Farobi,

Widya Permataningrum

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan

Sistem Informasi,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238,

57895251 Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

Dingahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2023



TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU



Hilirisasi dan Transformasi Ekonomi Indonesia Menghadapi Banyak Tantangan

SUDAH terbukti bahwa tekad Indonesia mewujudkan hilirisasi atas kekayaan sumber daya alam (SDA) menghadapi banyak tantangan tidak ringan, baik tantangan dari luar maupun dari dalam. Namun, Indonesia akan dimampukan mewujudkan hilirisasi SDA hanya jika rakyat dan kepemimpinan nasional berteguh pada sikap dan pendirian untuk memanfaatkan SDA bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sebelum IMF atau Dana Moneter Internasional 'cawe-cawe' menyoal program Indonesia bagi hilirisasi SDA, Uni Eropa (UE) sudah memperlakukan dan berupaya menghambat ekspor dari Indonesia atas produk minyak sawit mentah dan turunannya. Macam-macam tuduhan UE.

Dari tuduhan tentang produk sawit Indonesia yang tidak ramah lingkungan, merusak hutan, sampai merusak ekosistem flora dan fauna. Namun, semua orang tahu bahwa di balik ragam tuduhan itu, tujuan utama UE adalah merawat daya saing produk minyak makan mereka yang dibuat dari kedelai dan jagung.

Belum berhenti mengusik dengan isu minyak sawit dan produk turunannya, UE mengeskalasi tekanannya kepada Indonesia dengan memprotes kebijakan pemerintah melarang ekspor nikel yang masih berbentuk bahan mentah (raw material). Protes UE bahkan sampai dibawa ke forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Melibatkan WTO dalam kasus kebijakan nikel ini menjadi pertanda bahwa rangkaian lobi antara UE dengan Indonesia tidak membuahkan hasil, karena pemerintah tetap bersikukuh dengan kebijakannya. Setelah menyoal sejumlah peraturan atau kebijakan kementerian, pada oktober 2022, Badan Penyelesaian Sengketa WTO menyatakan Indonesia kalah. Tidak menyerah begitu saja, Indonesia mengajukan banding.

Kegagalan lobi dan perlawanan Indonesia di WTO mendorong UE dan pihak lain yang dirugikan oleh kebijakan hilirisasi SDA mencari strategi lain untuk menambah tekanannya. Tak disangka, justru IMF yang tampil menggertak Indonesia. Dalam sebuah dokumen yang dipublikasikan pada pekan keempat Juni 2023, IMF mengkritik Indonesia

karena bersikap teguh dengan pendirian dan kebijakan hilirisasi SDA.

Dalam rekomendasinya, IMF minta Indonesia secara bertahap mencabut sejumlah kebijakan larangan ekspor komoditas. Rekomendasi IMF ini tentu saja tertuju pada kebijakan pemerintah melarang ekspor nikel, batu bara, bauksit, hingga CPO. Menurut IMF, kebijakan industri di Indonesia harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi.

Sekadar menyegarkan ingatan, apa yang dilakukan IMF patut dipahami sebagai upaya berkelanjutan dari sejumlah negara untuk mendapatkan jaminan keamanan pasokan demi memenuhi kebutuhannya akan ragam bahan baku SDA dari Indonesia. Salah satu upaya terdahulu dilakukan di penghujung tahun 2021. Dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri para pemimpin pemerintahan dari sejumlah negara, delegasi Indonesia tiba-tiba disodori sebuah rancangan dokumen kesepakatan untuk ditandatangani.

Setelah memahami esensi rancangan dokumen itu, Presiden Jokowi tegas-tegas menolak menandatangani kesepakatan tentang rantai pasok (supply chain agreement) bahan baku pertambangan dengan beberapa negara. Penolakan Presiden dilakukan di sela-sela pelaksanaan forum kerja sama multilateral G20 di Roma, Italia, dan COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada Oktober dan awal November 2021. Jelas bahwa Presiden Jokowi pasti menolak menandatangani kesepakatan supply chain itu, karena konsep kesepakatan itu 'memaksa' Indonesia mengirimkan bahan baku pertambangan sebanyak mungkin kepada sejumlah negara.

Patut untuk diyakini bahwa demi memenuhi kepentingannya masing-masing, upaya sejumlah negara untuk mendapatkan jaminan keamanan pasokan bahan baku pertambangan dari Indonesia tidak akan berhenti pada manuver IMF, baru-baru ini. Upaya serupa akan berlanjut, bahkan mungkin dalam bentuk tekanan yang lebih keras. Kemungkinan seperti itulah yang harus diantisipasi Indonesia.

Modal utama menangkalkan tekanan-tekanan seperti itu adalah mengedepankan tekad Indonesia untuk tetap berteguh dan konsisten

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI



dengan program percepatan transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA. Apa pun bentuk tekanannya sangat penting bagi kepemimpinan nasional untuk berani bersikap tegas menghadapi, serta menolak tekanan maupun godaan yang datang dari pihak mana pun. Dapat dipastikan bahwa presiden dan para pembantunya menghadapi ragam godaan di balik lobi-lobi resmi yang dilakukan perutusan dari sejumlah negara.

Beruntung bahwa dari rangkaian lobi dan tekanan dalam beberapa tahun terakhir ini, Presiden Joko Widodo selalu menunjukkan keteguhan sikap dan pendirian Indonesia bagi hilirisasi SDA. Indonesia menolak ditekan. Itu sebabnya, dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi selalu mengingatkan kepada siapa saja yang akan menggantikannya nanti untuk menunjukkan nyali dan berani menolak tekanan dari pihak asing.

Sayang, masa bakti Presiden Joko Widodo akan berakhir pada Oktober 2024. Maka, tantangan riil yang akan dihadapi Indonesia setelah tahun 2024 sudah jelas. Di tengah arus tekanan dan godaan, tantangannya adalah menjaga dan merawat konsistensi pada upaya mewujudkan hilirisasi SDA sebagai langkah pembuka transformasi ekonomi. Pertanyaannya kemudian, apakah pemerintahan baru nantinya mau untuk tulus dan berjiwa besar melanjutkan tekad hilirisasi SDA, dengan tetap mempertahankan keteguhan sikap Indonesia sekarang ini? Hilirisasi SDA bisa diwujudkan jika segenap elemen bangsa tidak melakukan kesalahan dalam memilih pemimpinnya.

Adalah hak UE dan IMF untuk bersikap atau membuat penilaian tentang kebijakan hilirisasi SDA

Indonesia. Namun, kalau negara lain boleh membangun perekonomian dan sektor industrinya untuk menjadi negara maju yang kompetitif, mengapa Indonesia harus dihalang-halangi untuk mentransformasi perekonomiannya dengan melakukan pendalaman sektor Industri. Dan, dari gagasan Indonesia untuk mewujudkan profil Indonesia Emas 2045, lembaga-lembaga multilateral seperti IMF sejatinya paham betul tentang beban Indonesia yang total penduduknya mencapai 277,43 juta jiwa per 2023 ini.

Gagasan dan inisiatif baru seperti hilirisasi SDA itu harus dimunculkan, terutama karena menuju era 2040-an itu, Indonesia mengalami bonus demografi. Pada dasawarsa itu, penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia non-produktif (65 tahun ke atas). Proporsi usia produktif lebih 60% dari total penduduk Indonesia saat itu. Maka, segala sesuatunya, termasuk hilirisasi SDA demi percepatan transformasi ekonomi, harus dikerjakan dari sekarang agar pada waktunya nanti komunitas usia produktif itu tidak menjadi beban negara.

Apa yang ingin dicapai 20 tahun ke depan sudah dirancang dan sudah dituangkan menjadi beberapa kebijakan. Salah satunya kebijakan hilirisasi SDA itu. Profil Indonesia Emas 2045 menargetkan terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia yang merata, dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni seturut kebutuhan zaman. Dari aspek perekonomian negara, Indonesia ditargetkan sejajar negara maju, bahkan menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia. Artinya, transformasi ekonomi Indonesia menjadi pilihan tak terhindarkan. □

Sidang Tahunan MPR di Tahun Politik

Tak Ada Lagi Pembatasan Kehadiran Fisik Anggota



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Inilah Sidang Tahunan MPR dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR-DPD di tengah tahun politik. Sidang Tahunan MPR kali ini menjadi istimewa karena inilah Sidang Tahunan MPR terakhir menjelang Pileg (pemilihan anggota legislatif) dan Pilpres (pemilihan presiden) Pemilu 2024.

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menggelar Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2023. Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR tahun ini masih tetap dalam format yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu Sidang Tahunan MPR dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD. Dengan format seperti itu, dalam sidang paripurna itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Kemerdekaan RI dan laporan kinerja lembaga-lembaga negara.

Ada dua hal yang istimewa dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada tahun 2023 yang berbeda dengan penyelenggaraan tiga tahun terakhir. *Pertama*, inilah Sidang Tahunan MPR yang digelar setelah berakhirnya pandemi Covid-19. Dalam tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022, Sidang Tahunan MPR digelar di tengah pandemi Covid-19. Karena itu, Sidang Paripurna MPR pada waktu itu masih diberlakukan pembatasan-pembatasan, antara lain jumlah anggota MPR yang hadir secara fisik dibatasi, Sidang Tahunan digelar secara hybrid, dan masih diterapkannya protokol kesehatan yang ketat, seperti mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak.

Pada tahun 2023 ini pandemi Covid-19 sudah berakhir. Pemerintah Indonesia sendiri secara resmi sudah mencabut status pandemi Covid-19 pada Rabu, 21 Juni 2023. "Setelah tiga tahun lebih kita

berjuang bersama menghadapi pandemi Covid-19 maka sejak hari ini, Rabu, 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi," kata Presiden RI Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka.

Keputusan pemerintah mencabut status pandemi Covid-19 sejalan dengan kebijakan Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang juga mencabut status public health emergency of international concern (PHEIC) untuk Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, Covid-19 sebagai pandemi pada Maret 2020. Selain sejalan dengan kebijakan WHO, pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus Covid-19 di Tanah Air yang mendekati nihil. "Hasil serosurvey menunjukkan, 99% masyarakat Indonesia memiliki antibody Covid-19," ujar Presiden.

Namun, Kepala Negara mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih di masa endemi ini. Beda dengan pandemi, endemi merupakan wabah penyakit yang tersebar hanya di daerah tertentu. Dengan transisi pandemi ke endemi ini maka Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pun secara resmi dibubarkan. Penanganan Covid-19 masuk dalam pelayanan normal sebagai penyakit menular biasa.

Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan bahwa Sidang Tahunan MPR dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR – DPD pada 16 Agustus 2023 digelar secara normal seperti sebelum



Covid-19 sehingga tidak ada lagi pembatasan jumlah anggota MPR yang hadir.

“Kesepakatan kita tadi terkait Sidang Tahunan MPR, kita akan mendorong pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dengan format yang berbeda dengan Sidang Tahunan MPR pada masa pandemi Covid-19. Sidang Tahunan MPR kita kembalikan ke awal (seperti penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR sebelum pandemi Covid-19),” kata Bambang Soesatyo usai Rapat Konsultasi dengan Pimpinan DPD di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juli 2023.

Kedua, inilah Sidang Tahunan MPR dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR-DPD di tengah tahun politik. MPR akan menggelar Sidang Tahunan yang dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR – DPD pada tanggal 16 Agustus 2023 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Dan, inilah Sidang Tahunan MPR terakhir sebelum Pemilu 2024. Pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024 untuk

memilih anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dan presiden – wakil presiden.

“Tentu saja Sidang Tahunan MPR ini menjadi istimewa karena inilah Sidang Tahunan MPR terakhir menjelang Pileg (pemilihan anggota legislatif) dan Pilpres (pemilihan presiden),” kata Bambang Soesatyo, dalam keterangannya usai Rapat Pimpinan di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara Lantai 9, Kompleks Parlemen Jakarta, pada Selasa, 8 Agustus 2023.

Bahkan, Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, mengungkapkan, bisa jadi Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2023 ini menjadi Sidang Tahunan MPR yang terakhir diadakan di Jakarta. Pasalnya, Gedung MPR RI sedang dibangun di IKN Nusantara. Bila pembangunan Gedung MPR selesai sebelum Agustus 2024 maka Sidang Tahunan MPR bisa berlangsung di IKN bersamaan dengan penyelenggaraan HUT ke-19 Kemerdekaan RI di IKN Nusantara.

“Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 menjadi spesial, karena menjadi sidang terakhir sebelum menghadapi Pemilu 2024. Bahkan, tidak menutup

kemungkinan jika tahun depan Gedung MPR RI sudah selesai dibangun di IKN Nusantara, maka tahun ini menjadi Sidang Tahunan MPR terakhir di Jakarta. Mengingat tahun depan penyelenggaraan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI juga akan diselenggarakan di IKN Nusantara,” ujar Bamsoet.

Persiapan Sidang Tahunan MPR

Pimpinan MPR menggelar beberapa kali rapat untuk mematangkan persiapan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR – DPD. Pertama Rapim pada Rabu, 14 Juni 2023, kemudian dilanjutkan Rapat Konsultasi Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan DPD RI, di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juli 2023. Terakhir, Rapat Pimpinan digelar pada Selasa, 8 Agustus 2023.

Rapim MPR pada Selasa, 8 Agustus 2023, dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo dan dihadiri sejumlah Wakil Ketua MPR, di antaranya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid,



Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, dan kelompok DPD Fadel Muhammad. Selain membahas persiapan sidang tahunan, rapat itu juga untuk mempersiapkan peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-78 MPR.

Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR – DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2024 digelar pada 16 Agustus 2023. Sidang paripurna ini digelar tanpa protokol kesehatan karena pemerintah telah mencabut status pandemi Covid-19. Sidang paripurna direncanakan akan dihadiri secara fisik oleh seluruh pimpinan, anggota DPR, anggota DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Sidang paripurna juga dihadiri para undangan, termasuk Duta Besar dari negara-negara sahabat.

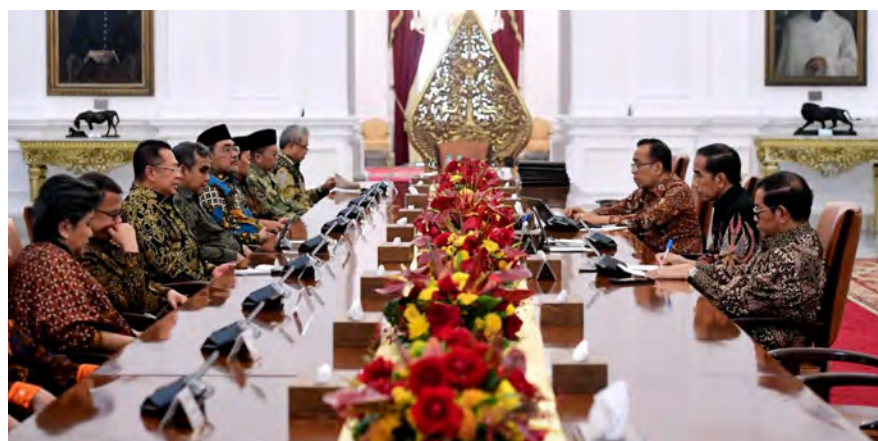
Pada tahun 2023 ini, DPD RI menjadi tuan rumah. Kegiatan Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR – DPD, dan Sidang Paripurna DPR RAPBN Tahun 2024 direncanakan digelar dengan cara yang sederhana dan simpel. Pelaksanaan sidang paripurna ini masih mengacu pada format tahun sebelumnya, yakni tahun 2022. Bamsoet menjelaskan, MPR, DPR, dan DPD sudah menyepakati bahwa Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD akan dilakukan dengan format yang sama dengan tahun sebelumnya, yakni diselenggarakan selama satu hari di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Adapun agenda sidang paripurna dimulai dengan Sidang Tahunan MPR kemudian dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR dan DPD yang dipimpin oleh DPD. Rundown

sidang paripurna ini adalah, Sidang Tahunan MPR dimulai pukul 09.30 WIB, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti mengheningkan cipta dipimpin Ketua MPR. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dan pidato pengantar sidang oleh Ketua MPR RI. Setelah itu pidato Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara selama setahun terakhir.

“Melalui Sidang Tahunan MPR ini rakyat bisa mengetahui sejauh mana kinerja lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat UUDNRI Tahun 1945. Dengan penyampaian laporan kinerja lembaga negara melalui pidato Presiden, rakyat bisa mendengarkan sekaligus mengevaluasi dan mengapresiasi berbagai capaian yang telah diraih lembaga-lembaga negara tersebut,” jelas Bamsoet usai Rapim MPR.

Sehari setelah Rapim pada Selasa, 8 Agustus 2023, pada Rabu petang, 9 Agustus 2023, Pimpinan MPR mengadakan



Rapat Konsultasi Pimpinan MPR RI dengan Presiden RI Joko Widodo. Rapat konsultasi ini salah satunya membahas mengenai persiapan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Usai Rapat Konsultasi, Bamsoet memastikan bahwa Presiden Joko Widodo akan hadir dan menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen pada 16 Agustus 2023.

“Intinya adalah kita menyampaikan persiapan tentang Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2023, plus Sidang Bersama DPR dan DPD RI,” kata Bamsoet. Dalam Rapat Konsultasi ini, Pimpinan MPR hadir secara lengkap, yaitu Ahmad Basarah (Fraksi PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra), Lestari Moerdijat (Fraksi Partai Nasdem), Jazilul Fawaid (Fraksi PKB), Sjarifuddin Hasan (Fraksi Partai Demokrat), Yandri Susanto (Fraksi PAN), Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS), Arsul Sani (Fraksi PPP), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Berdasarkan Rapim MPR pada Selasa, 8 Agustus 2023, dalam Sidang Tahunan MPR, pidato Ketua MPR akan menekankan kembali bahwa Pemilu 2024 harus diselenggarakan tepat waktu. Hal ini dinilai penting untuk menghindari munculnya kembali wacana penundaan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Laporan Kinerja Lembaga Negara

Dengan format Sidang Tahunan MPR tahun 2023 ini sama seperti pada Sidang Tahunan MPR tahun-tahun sebelumnya maka laporan kinerja lembaga-lembaga negara dirangkum dan disampaikan oleh



Presiden sebagai kepala negara. Format seperti ini sudah berlangsung sejak Sidang Tahunan MPR digelar pertama kali pada tahun 2015. Pimpinan lembaga-lembaga negara menyerahkan laporan kinerja lembaga negara kepada Presiden, dan Presiden merangkum dan menyampaikan laporan kinerja dalam pidato Sidang Tahunan MPR.

Padahal dalam Rapim MPR pada 14 Juni 2023 untuk mematangkan persiapan Sidang Tahunan MPR sempat dibahas rencana penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR yang terpisah dengan Sidang Bersama DPR dan DPD RI. Ada satu hari khusus, direncanakan tanggal 15 Agustus 2023, Sidang Tahunan MPR untuk mendengarkan laporan kinerja lembaga tinggi negara. Kemudian dilanjutkan sidang paripurna pada tanggal 16 Agustus 2023 untuk mendengarkan laporan kinerja Presiden dan pidato kenegaraan.

“Rangkaian Sidang Tahunan MPR RI direncanakan mulai pada 15 Agustus untuk mendengarkan laporan kinerja lembaga tinggi negara langsung kepada rakyat Indonesia melalui forum ini berturut-turut mulai dari MPR RI, DPR RI, DPD RI, MA, MK, BPK, hingga KY. Dilanjutkan tanggal 16 Agustus untuk mendengarkan laporan presiden dan

pidato kenegaraan. Untuk merealisasikan-nya, pimpinan MPR akan segera melakukan pertemuan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara,” kata Bamsoet pada saat itu.

Rencana persiapan Sidang Tahunan MPR dimatangkan kembali dalam Rapat Konsultasi Pimpinan MPR dan Pimpinan DPD RI pada 10 Juli 2023. Dalam pertemuan itu Bamsoet kembali mengulang bahwa Sidang Tahunan MPR direncanakan terpisah atau tidak dijadikan satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR dan DPD sehingga berlangsung pada dua hari berbeda, yaitu pada 15 – 16 Agustus 2023. “Pimpinan lembaga tinggi negara menyampaikan secara langsung kinerjanya ke publik atau ke rakyat melalui Sidang Tahunan MPR pada tanggal 15 Agustus 2023. Jadi, kita akan mulai Sidang Tahunan MPR dalam dua hari,” katanya usai Rapat Konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan DPD RI.

Namun, dalam Rapat Pimpinan MPR terakhir pada 8 Agustus 2023, Bamsoet menyebutkan MPR, DPR, dan DPD sudah menyepakati bahwa Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD akan dilakukan dengan format yang sama dengan tahun sebelumnya, yakni diselenggarakan selama satu hari (pada tanggal 16 Agustus 2023) di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menanggapi laporan kinerja lembaga negara ini, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto mengakui, memang ada wacana Sidang Tahunan MPR berlangsung dua hari 15 – 16 Agustus 2023. “Mengacu pada Rapim MPR, kita merencanakan adanya satu dua hari sidang paripurna yang memfasilitasi pimpinan lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat,” katanya kepada *Majelis*.

Namun, rencana (dua hari Sidang Tahunan MPR) itu urung dilaksanakan. Padahal, menurut Yandri, MPR memberi kesempatan

kepada masing-masing ketua lembaga tinggi negara untuk secara langsung menyampaikan laporan kinerja (progress report) selama satu tahun terakhir kepada seluruh anggota MPR dan rakyat. “Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR seharusnya kita maknai perlu adanya kesempatan kepada semua pimpinan lembaga negara untuk menyampaikan pidato laporan kinerja secara langsung kepada rakyat Indonesia,” jelasnya.

Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Hendrawan Supratikno, berpendapat beda. Menurut Hendrawan, bila setiap lembaga negara menyampaikan laporan kinerja masing-masing maka sidang paripurna memerlukan waktu yang lebih lama. “Tetapi hal ini bisa membuat Sidang Tahunan MPR lebih elegan,” ujarnya kepada *Majelis*.

Saat ini, lanjut Hendrawan, Sidang Tahunan MPR memang sudah dilembagakan meskipun belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Meski demikian, MPR telah menjalankan peran yang bisa dimainkan dalam konstelasi UUD 1945 pasca amandemen 1999 – 2002. “Sidang Tahunan MPR bukan hanya soal formalitas – rutinitas, tetapi juga kredibilitasnya dengan menjalankan formalitas – rutinitas yang lebih bermutu sehingga akhirnya disebut sebagai tradisi (konvensi ketatanegaraan). Agar MPR bisa lebih berperan, Badan Pengkajian MPR telah memberikan gagasan-gagasan, dan mudah-mudahan rekomendasi Badan Pengkajian MPR bisa disetujui fraksi-fraksi,” katanya. □

MBO/BSC



Yandri Susanto



Hendrawan Supratikno

Makna Sidang Tahunan MPR

Sidang Tahunan MPR merupakan kreasi ketatanegaraan yang diinisiasi oleh MPR dengan harapan setiap lembaga negara yang diberikan tugas dan wewenang oleh UUD NRI Tahun 1945 dapat menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat. Walaupun pidato disampaikan dalam forum Sidang Tahunan MPR, laporan kinerja lembaga-lembaga negara itu tidak ditujukan kepada (anggota) MPR, melainkan kepada rakyat.

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menggelar Sidang Paripurna MPR atau Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2023. Ini adalah Sidang Tahunan MPR kedelapan kali sejak pertama kali Sidang Tahunan MPR digelar pada tahun 2015 lalu. Sejak digelar pertama kali hingga Sidang Tahunan MPR Tahun 2022 lalu, format Sidang Paripurna MPR ini tidak berubah. Presiden sebagai Kepala Negara menyampaikan laporan kinerja masing-masing lembaga negara.

Padahal, sejak awal digagas, Sidang Tahunan MPR ini dimaksudkan untuk memfasilitasi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan secara langsung progress report atau laporan kinerja selama satu tahun terakhir kepada rakyat. Pimpinan lembaga negara secara langsung menyampaikan progress report. Namun, sepanjang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR, format ideal itu tidak pernah terwujud. Setiap pelaksanaan Sidang Tahunan MPR, Pimpinan lembaga negara sepakat bahwa laporan kinerja lembaga negara disampaikan oleh Presiden.

Pertanyaan awalnya, mengapa MPR mengkreasi Sidang Tahunan MPR ini?

Sidang Tahunan MPR sudah dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada masa Orde Baru, MPR menyelenggarakan sidang setiap tahun untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban presiden. Pada masa itu presiden adalah Mandataris MPR. Sebagai Mandataris MPR, Presiden wajib untuk melaporkan segala kebijakan yang telah diambil sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan.

Dasar hukum pelaksanaan Sidang Tahunan pada waktu itu adalah UUD 1945 (sebelum amendemen). Dalam UUD disebutkan presiden harus melaporkan pertanggungjawaban kepada MPR pada



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

setiap akhir periode. Ini adalah satu konsekuensi presiden sebagai mandataris MPR. Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR akhirnya menjadi tradisi atau konvensi ketatanegaraan negara Republik Indonesia.

Setelah Orde Baru berakhir, MPR masih tetap menyelenggarakan Sidang Tahunan. Dasar hukumnya bukan lagi UUD 1945, melainkan Peraturan Tata Tertib MPR. Sidang Umum MPR tahun 1999 melahirkan beberapa keputusan MPR. Salah satunya adalah Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Dalam Peraturan Tata Tertib MPR itu diatur tentang Sidang Tahunan MPR. MPR wajib menggelar Sidang Tahunan dengan tujuan untuk mendengarkan pidato presiden mengenai pelaksanaan Ketetapan MPR. Selain itu, Sidang Tahunan MPR juga untuk mengeluarkan Putusan MPR. Badan Pekerja MPR ditugaskan untuk menyiapkan bahan-bahan untuk Sidang Tahunan MPR.

Pada tahun 2000, MPR menggelar Sidang Tahunan pada 7 – 18 Agustus 2000, antara lain membahas tentang perubahan tahap kedua UUD 1945. Kemudian pada tahun 2001, MPR kembali menyelenggarakan

Sidang Tahunan MPR pada tanggal 1 – 9 November 2001 menghasilkan perubahan tahap ketiga UUD 1945. Selanjutnya, pada tahun 2002, MPR kembali mengadakan Sidang Tahunan MPR pada tanggal 1 – 11 Agustus 2002 membahas tentang perubahan tahap keempat UUD 1945.

Namun, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2004 – 2014, tradisi Sidang Tahunan MPR ditiadakan. MPR hanya bersidang sekali dalam lima tahun saja. Peran MPR pada waktu itu hanya sebatas menjalankan tugas untuk menyosialisasikan hasil-hasil amendemen UUD 1945 dan melantik presiden dan wakil presiden.

Barulah pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla, periode 2014 – 2019, tradisi Sidang Tahunan hidup kembali. Pada tanggal 14 Agustus 2015, MPR menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR sebagai konvensi ketatanegaraan baru. Agenda Sidang Tahunan MPR ini adalah pidato presiden sebagai kepala negara yang memuat laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR ini didasarkan pada ketentuan Keputusan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan Sidang Tahunan MPR ini? Sidang Tahunan MPR merupakan kreasi ketatanegaraan yang diinisiasi oleh MPR dengan harapan setiap lembaga negara yang diberikan tugas dan wewenang oleh UUD NRI Tahun 1945 dapat menyampaikan laporan kerjanya kepada rakyat. Walaupun pidato disampaikan dalam forum Sidang Tahunan MPR, laporan kinerja lembaga-lembaga negara itu tidak ditujukan kepada (anggota) MPR, melainkan kepada rakyat.

Mengapa lembaga-lembaga negara perlu menyampaikan laporan kinerja kepada rakyat? Penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara hukum yang demokratis harus senantiasa mengedepankan prinsip *clean and good governance*. Ciri

penerapan prinsip *clean and good governance* antara lain adalah keterbukaan informasi pemerintah kepada publik.

Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka mendengarkan laporan kinerja lembaga negara kepada publik tentang pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan satu konvensi ketatanegaraan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja lembaga negara yang tugas dan wewenangnya diberikan oleh UUD.

Memang, dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam UU yang mengatur tentang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3) tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan sidang untuk penyampaian laporan pelaksanaan tugas oleh lembaga negara. Namun, dalam penyelenggaraan

negara, idealnya ada sebuah mekanisme lembaga negara untuk menyampaikan pelaksanaan kinerja sesuai dengan wewenang dan tugas yang diberikan oleh UUD. Dengan demikian, rakyat dapat memiliki media untuk mengetahui pelaksanaan kedaulatan yang diberikan.

Semangat pelaksanaan Sidang Tahunan MPR adalah untuk memberikan kesempatan kepada lembaga negara menyampaikan kinerja kepada rakyat yang saat ini belum ada saluran yang tepat. Karena itu, Sidang Tahunan MPR diharapkan dapat menjembatani kepentingan rakyat untuk mengetahui kinerja lembaga-lembaga negara sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat. Lembaga yang dimaksud adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial.

Sepanjang tidak bertentangan dengan hakikat kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, Sidang Tahunan MPR dapat ditetapkan sebagai konvensi ketatanegaraan dalam rangka meningkatkan optimalisasi kinerja lembaga negara sebagai upaya perbaikan sistem penyelenggaraan negara. Penyampaian kinerja tidak mungkin dilaksanakan langsung dalam forum rakyat, melainkan melalui forum perwakilan lembaga yang memiliki legitimasi kuat sebagai lembaga perwakilan, yaitu MPR.

Kedudukan MPR adalah lembaga negara yang keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum serta memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD. MPR merupakan lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat dan daerah (anggota MPR berasal dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih langsung oleh rakyat) dan memiliki wewenang tertinggi, karena mengubah dan menetapkan UUD sebagai hukum dasar yang merupakan hukum tertinggi dalam negara.

Kedudukan tersebut menempatkan MPR sebagai satu-satunya lembaga yang dianggap tepat untuk mendengarkan laporan kinerja masing-masing lembaga negara. Agenda mendengarkan laporan kinerja ini dilaksanakan melalui forum yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, yaitu melalui agenda Sidang Tahunan MPR. □

BSC





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Yandri Susanto, S.Pt., Wakil Ketua MPR RI

Perlu Diberi Ruang Pimpinan Lembaga Negara Menyampaikan Laporan Kinerja

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar kembali Sidang Paripurna MPR untuk mendengarkan laporan kinerja lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh konstitusi pada Agustus 2023. Sidang paripurna yang dikenal sebagai Sidang Tahunan MPR ini sudah menjadi konvensi ketatanegaraan yang diterapkan sejak tahun 2015 lalu. Pada tahun-tahun sebelumnya, Sidang Tahunan digelar pada hari yang sama dengan Sidang Bersama DPR-DPD.

Pada masa pandemi Covid-19, yaitu pada tahun 2020, 2021, dan 2022, Sidang Tahunan MPR digelar dalam satu rangkaian sidang bersama DPR-DPD. Dalam sidang paripurna yang dihadiri anggota MPR dan undangan secara terbatas, sebagian besar mengikuti sidang melalui virtual, presiden sebagai kepala negara menyampaikan rangkuman laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-

DPD digelar dengan sederhana.

Tahun 2023 ini, pandemi Covid-19 sudah mereda, bahkan pemerintah sudah mencabut status pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Sidang Tahunan MPR yang digelar pada Agustus 2023 nanti berlangsung dalam kondisi normal seperti sebelum pandemi Covid-19. Bahkan, seperti dibahas dalam Rapat Pimpinan MPR, ada rencana MPR untuk menggelar Sidang Tahunan tersendiri atau terpisah dari rangkaian Sidang Bersama DPR-DPD. Sidang Tahunan MPR itu untuk memfasilitasi pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerja secara langsung kepada rakyat.

Untuk merealisasikan rencana itu, Pimpinan MPR telah membicarakan bersama Pimpinan DPD pada Senin, 10 Juli 2023. Dalam pertemuan konsultasi itu, DPD RI mendukung terhadap rencana penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI yang akan dilaksanakan secara terpisah dan tidak dijadikan satu rangkaian dengan

Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Setelah melakukan rapat konsultasi dengan Pimpinan DPD, selanjutnya Pimpinan MPR juga bertemu dengan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya untuk mematangkan rencana persiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR.

Untuk mengetahui rencana persiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR H. Yandri Susanto, S.Pt. Berikut wawancara Majelis dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN beberapa waktu lalu. Petikannya.

Apa saja hasil pertemuan pimpinan MPR dan Pimpinan DPD, serta bagaimana kesiapan MPR melaksanakan Sidang Tahunan MPR pada tahun 2023 ini?

Pertemuan Pimpinan DPD dengan Pimpinan MPR RI adalah tindak lanjut dari hasil Rapim MPR. Dalam Rapim terakhir, Pimpinan MPR mau bersilaturahmi dengan semua pimpinan lembaga tinggi negara

lainnya, mulai dari Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, BPK. Kebetulan Pimpinan MPR telah menjadwalkan rapat konsultasi dengan Pimpinan DPD. Ini menjadi rapat konsultasi yang pertama dan akan dijadwalkan rapat konsultasi dengan pimpinan lembaga negara yang lain.

Dalam pertemuan antara kedua Pimpinan MPR dan DPD, salah satunya isu yang dibahas adalah tentang Sidang Tahunan MPR. Pembahasan meliputi bagaimana Sidang Tahunan MPR nanti akan dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaan Sidang Tahunan itu agar bisa lebih terasa di masyarakat, bukan sekedar rutinitas atau formalitas saja.

Oleh karena itu, MPR sudah menyusun jadwal untuk Sidang Tahunan MPR itu 15-16 Agustus 2023. Kami mengharapkan semua pimpinan lembaga negara bisa menyampaikan pidato berisi progress report atau laporan kinerja lembaga negara yang dipimpinnya kepada masyarakat, yaitu tentang apa yang sudah mereka selama satu tahun terakhir.

Gongnya adalah pada pelaksanaan Sidang Bersama DPR-DPD pada 16 Agustus 2023 di ruang sidang rapat paripurna di Gedung Kura-Kura. Pada sidang paripurna itu, Presiden akan menyampaikan sambutan sekaligus pidato menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus. Di depan rapat paripurna itu, Presiden juga akan menyampaikan laporan kinerja presiden kepada seluruh rakyat Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



MPR sudah menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR sejak 2015. Namun, selama lebih dari tujuh kali mengadakan Sidang Tahunan MPR, laporan kinerja lembaga negara dirangkum dan disampaikan oleh Presiden sebagai kepala negara. Bagaimana dengan Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 ini?

Mengacu pada Rapat Pimpinan (Rapim) MPR terakhir, kita merencanakan adanya satu-dua hari sidang paripurna, pada 14 atau 15 Agustus 2023 yang memfasilitasi pimpinan lembaga negara untuk menyampaikan laporan kerjanya kepada rakyat. Nanti akan diatur pimpinan lembaga negara yang akan menyampaikan laporan kinerja para rapat paripurna tersebut. Tetapi, pada rapat paripurna tanggal 16 Agustus 2023, memang khusus untuk Presiden menyampaikan pidato menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Jadi, kalau selama ini laporan kinerja lembaga-lembaga negara dirangkum kemudian disampaikan Presiden sebagai kepala negara, maka pada pelaksanaan Sidang Tahunan MPR tahun 2023 ini, kita memberi kesempatan kepada masing-masing ketua lembaga negara untuk secara langsung menyampaikan laporan kinerja (progress report) selama satu tahun terakhir kepada seluruh anggota MPR dan rakyat.

Memang, pada waktu lalu (Sidang Tahunan MPR sebelumnya), rencana tersebut tidak kunjung dilaksanakan, karena persoalan teknis. Pada waktu lalu ada kesepakatan di antara pimpinan lembaga negara agar cukup presiden saja yang menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Dalam

pidatonya, Presiden menyampaikan laporan kinerja masing-masing lembaga negara, antara lain MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Presiden menyampaikan laporan kinerja masing-masing lembaga negara secara singkat-singkat.

Nah, pada pelaksanaan Sidang Tahunan MPR pada tahun ini kita maknai perlu adanya kesempatan kepada semua pimpinan lembaga negara untuk menyampaikan pidato laporan kinerja secara langsung kepada rakyat Indonesia.

Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR tahun 2023 ini adalah pelaksanaan Sidang Paripurna MPR pertama pasca pandemi Covid. Bagaimana persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2023?

Pemerintah telah mencabut status pandemi Covid-19, sehingga kehidupan masyarakat kembali normal seperti sebelum pandemi. Karena itu, selama tiga tahun pada masa pandemi, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR hanya dihadiri fisik anggota MPR secara terbatas, dan lebih banyak mengikuti sidang secara virtual, maka pada pelaksanaan Sidang Tahunan MPR kali ini seluruh anggota MPR akan hadir secara fisik. Tidak ada lagi pembatasan jumlah anggota yang mengikuti sidang paripurna.

Bagaimana agar pelaksanaan Sidang Tahunan MPR tidak hanya sekedar rutinitas dan formalitas, tetapi bisa menarik perhatian masyarakat?

Kita mengharapkan masing-masing lembaga negara menyiapkan materi laporan kinerja dengan baik dan bisa dipahami, serta tidak membosankan. Sidang Tahunan MPR agar tidak ditayangkan secara langsung di saluran televisi saja, tetapi juga melalui media lainnya, seperti media sosial, dan bisa dimasifkan. Selain itu, perlu juga dibuka ruang partisipasi rakyat yang mengikuti Sidang Tahunan MPR. Sebab, tidak tertutup kemungkinan adanya kritik dan saran dari masyarakat agar masyarakat pun tidak melihat secara monoton.

Bila perlu, penyampaian Sidang Tahunan MPR melalui berbagai media disesuaikan dengan harapan kalangan milenial. Jadi, sebenarnya Sidang Tahunan MPR bisa diselenggarakan dengan baik dan bukan hanya rutinitas dan seremonial saja. □

Sarasehan Kehumasan MPR

Fadel Muhammad Bahas **Gorontalo** sebagai Lumbung Pangan Nasional



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Jagung, komoditas andalan masyarakat Gorontalo, pernah menjadi primadona rakyat Gorontalo, dan hal itu terjadi pada saat Fadel menjabat Gubernur.

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, mengungkapkan bahwa Provinsi Gorontalo memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian berbagai komoditas, terutama jagung. Komoditas andalan masyarakat Gorontalo ini pernah menjadi primadona rakyat Gorontalo, saat Fadel menjabat Gubernur.

“Waktu itu, Gorontalo sempat meng-hasilkan jagung hingga 1 juta ton. Melihat fakta itu, saya kemudian mengusulkan sebuah konsep besar Gorontalo menjadi lumbung pangan nasional,” ujarnya, dalam acara Sarasehan Kehumasan MPR yang mengusung tema: ‘Gorontalo Menjadi Lumbung Pangan Nasional,’ di Ruang Madani, Kantor Bupati Gorontalo, Limboto, Gorontalo, Kamis (20/7/2023).

Acara ini juga dihadiri, antara lain oleh Sekdaprov Gorontalo Budiyanto Sidiki, anggota DPD RI Dapil Gorontalo Abdurrahman A. Bachmid, anggota DPR Fraksi Gerindra El Nino M. Husen Mohi, para Kadis Pertanian Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, beberapa perusahaan di bidang pengolahan

jagung dan produksi pupuk, serta ahli pertanian Unhas dan UNG.

Keyakinan Pimpinan MPR dari Kelompok DPD Dapil Gorontalo ini dengan konsep Lumbung Pangannya, bukan hanya kepercayaan diri tanpa alasan. Ada beberapa hal yang dilihat Fadel menjadi modal Gorontalo sebagai Lumbung Pangan Nasional, yakni: *Pertama*, Gorontalo memiliki kelayakan tanah dan agroklimat yang cocok untuk pertanian.

Kedua, kelayakan infrastruktur. Gorontalo memiliki irigasi maupun infrastruktur transportasi yang bisa ditingkatkan lagi. *Ketiga*, Gorontalo memiliki kelayakan budidaya dan teknologi yang bisa dikembangkan lagi. *Keempat*, Gorontalo memiliki kelayakan sosial dan ekonomi. Sebab, masyarakat Gorontalo mayoritas petani.

“Sekali lagi, Gorontalo ini potensinya sangat besar sebagai lumbung pangan nasional. Saya yakin, karena saya berpengalaman memimpin Gorontalo sebagai gubernur selama dua periode. Keyakinan saya lebih besar lagi, karena saya sudah membicarakan



hal ini kepada pemerintah pusat yang juga sangat antusias dalam merespon konsep ini.

Bahkan, sudah tersedia anggaran Rp 3 Triliun untuk Gorontalo sebagai lumbung

pangan," terang Fadel Muhammad.

Yang harus dilakukan sekarang, lanjut Fadel, konsep Lumbung pangan itu harus segera mungkin dimatangkan agar bisa secepat mungkin terwujud. "Saya berharap, para pakar bidang pangan dan pertanian dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama pemerintah daerah Gorontalo, untuk mematangkan konsep ini," ujarnya.

Ditegaskan Fadel, jika konsep ini terealisasi dan Gorontalo benar-benar menjadi lumbung pangan nasional, maka efek dominonya akan sangat luar biasa, selain kebutuhan pangan nasional dan daerah terjaga, juga kesejahteraan petani dan perekonomian daerah secara umum akan terangkat naik. □

Konferensi Nasional Studi Hukum FH UPN Veteran Jakarta

Bamsoet Ajak Seluruh Elemen Bangsa Wujudkan Negara Kesejahteraan

Berdasarkan berbagai indikator harus diakui bahwa konsep kesejahteraan yang dicita-citakan Pancasila dan Konstitusi kita masih belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak capaian yang telah diraih, namun masih lebih banyak lagi yang belum terealisasi.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Dosen Tetap Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, konsep negara kesejahteraan (welfare state) pada awal kelahirannya di Eropa tumbuh dari pemikiran sederhana, yaitu bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus membahagiakan dan menyejahterakan banyak orang. Konsep tersebut mengoreksi sistem kapitalis dan sosialis yang dinilai melahirkan kesenjangan ekonomi dan sosial.

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, menyatakan hal itu saat menjadi Key Note Speaker dalam 'Konferensi Nasional Studi Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta', di kampus UPN Veteran, Jakarta, Kamis (27/7/23). Turut hadir sebagai narasumber, antara lain: Rektor UPN Veteran Jakarta Dr. Anter Venus, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Narendra Jatna, Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang Prof.

Rahayu Hartini, Dekan Fakultas Hukum Universiti Teknologi Mara Malaysia Associate Prof. Madya Hartini, Guru Besar Hukum Tata Negara UPN Veteran Jakarta Prof. Wicipto Setiadi, serta Guru Besar Hukum Pidana UPN Veteran Jakarta Prof. Bambang Waluyo.

Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan, founding fathers Bangsa Indonesia juga telah mewariskan nilai-nilai gagasan negara kesejahteraan tersebut ke dalam Pancasila. Khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Norma tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam batang tubuh atau pasal-pasal Konstitusi. "Misalnya, Pasal 27 ayat (2) mengenai hak warganegara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28 H mengenai hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan," ujar Bamsoet.

Kemudian, lanjut Bamsoet, Pasal 31 menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan agar sumberdaya alam yang penting dan strategis dikuasai oleh negara, dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta Pasal 34 mengatur tanggungjawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar, pengembangan sistem jaminan sosial, serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dari segi faktor kekayaan alam, Indonesia lebih dari cukup untuk memenuhi persyaratan mewujudkan negara kesejahteraan. Sumber kekayaan alam Indonesia, antara lain terdiri dari nikel terbesar pertama dunia, batu bara terbesar ke-2 dunia, emas terbesar ke-6 dunia, tembaga terbesar ke-7 dunia serta gas alam terbesar ke-13 dunia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ironisnya, harus diakui berbagai kekayaan sumber daya alam tersebut belum mampu mewujudkan negara kesejahteraan. Contohnya, keberadaan perusahaan pertambangan nikel PT. Vale Indonesia di Sulawesi Selatan (Sulsel). Sejak izin eksploitasi pertambangannya berlangsung pada 1968, tidak banyak yang dilakukan perusahaan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

“Bahkan eksploitasi sumber daya alamnya hanya menyisakan kondisi memilukan dengan meninggalkan kemiskinan ekstrem,

khususnya di Luwu, Sulsel. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel per Maret 2022, lima daerah paling miskin di Sulsel adalah Kabupaten Jeneponto dengan persentase 14,28%, Pangkep 14,28%, Luwu Utara 13,59%, Luwu 12,52%, dan Enrekang 12,47%,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini, menerangkan, sejauh mana konsep negara

kesejahteraan terealisasi, juga dapat diukur dengan 18 indikator. Antara lain, dari data Pengeluaran per kapita, angka harapan hidup, persentase penduduk miskin, persentase rumah tangga yang mampu hidup layak, serta jumlah pengangguran terbuka.

BPS mencatat rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Indonesia (perkotaan dan perdesaan) sebesar Rp1,28 juta sebulan pada September 2021, angka harapan hidup pada 2022 mencapai 73,5 tahun, persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57%, persentase rumah tangga yang memiliki akses hunian layak dan terjangkau sebesar 60,68% pada 2022, serta tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2022 mencapai 5,86%.

“Berdasarkan berbagai indikator tersebut, harus diakui bahwa konsep kesejahteraan yang dicita-citakan Pancasila dan Konstitusi kita masih belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak capaian yang telah diraih, namun masih lebih banyak lagi yang belum terealisasi. Untuk mewujudkan negara kesejahteraan, sendi-sendi yang menopang sistem perekonomian dan sistem sosial harus terus menerus kita perkuat, kita lindungi, dan kita kembangkan,” pungkas Bamsoet. □



Diskusi Kesiapan Indonesia Menghadapi Ancaman El Nino

Lestari Moerdijat: Optimalkan Semua Potensi Hadapi Dampak El Nino di Tanah Air

Optimalkan semua potensi menghadapi dampak cuaca ekstrem dengan mengupayakan langkah antisipatif dan adaptif, serta menyediakan kebijakan yang dibutuhkan untuk menjamin ketahanan pangan, kesehatan dan ekonomi.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KITA harus mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki untuk bisa menjawab berbagai ancaman terkait dampak perubahan iklim dan kemarau panjang yang diperkirakan akan melanda Indonesia,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Puncak Ancaman El Nino di 2023 Forum Diskusi, yang digelar Denpasar 12, Rabu (26/7).

Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Prof. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., (Kepala Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/ BMKG), Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes., (Plt. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana /BNPB), dan Dr. Rachmi Widiriani (Direktur Distribusi dan

Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional), sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Avianto Amri, Ph.D., (Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia/MPBI) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, catatan World Meteorological Organization (WMO) pada Mei 2023 menyebutkan, suhu global cenderung meningkat dan mencapai rekor baru dalam lima tahun mendatang. Hal itu dipicu oleh gas rumah kaca yang memerangkap panas dan secara alami menyebabkan terjadinya peristiwa El Nino

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, dalam setiap fenomena cuaca, seperti dampak El Nino, kerap kali sulit untuk dihindari dampaknya. Informasi terkait cuaca sangat dibutuhkan. Diakui Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, saat ini informasi BMKG cukup akurat sehingga bisa

menjadi acuan bagi masyarakat luas dalam menyikapi dampak sejumlah fenomena cuaca yang terjadi.

Berdasarkan data tersebut, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, bagaimana kita bersikap dan penerapan strategi yang tepat, sangat menentukan dalam menekan dampak dari perubahan iklim dan El Nino yang terjadi.

Berbagai upaya dalam menyikapi dampak perubahan iklim itu, menurut Rerie, juga harus ditempatkan sebagai bagian pemenuhan SDGs No. 13, yaitu penanganan perubahan iklim dengan mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Sekretaris Utama BNPB, Rustian, mengutip pidato Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa apa yang ditakuti dunia

saat ini adalah bukan lagi pandemi atau perang, tetapi perubahan iklim. Karena, perubahan iklim menyebabkan frekuensi bencana meningkat.

Menurut Rustian, perubahan iklim menyebabkan bencana hidrometeorologi yang menyebabkan kekeringan, peningkatan suhu, hingga kebakaran hutan. Catatan BNPB, tambah dia, pada rentang 1 Januari 2023-25 Juli 2023 tercatat 2034 kejadian bencana. Pada pekan terakhir Juli 2023, bencana di Indonesia masih diwarnai oleh kebakaran hutan, banjir, puting beliung, kekeringan, dan tanah longsor. Menurut Rustian, pada rentang Agustus-September 2023 masyarakat harus mewaspadai dampak El Nino.

Pada kesempatan itu, dia berharap, dalam menyikapi dampak perubahan iklim, pemerintah dan masyarakat, antara lain harus mengutamakan pencegahan, infrastruktur harus tersedia hingga skala kecil dan mencari solusi permanen agar tidak ada pembukaan lahan secara membakar.

Kepala Pusat BMKG, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan bahwa fenomena iklim dan cuaca di Indonesia itu unik, karena dipengaruhi Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta Benua Asia dan Australia. Saat ini, menurut Dwikorita, iklim Indonesia dipengaruhi oleh angin Monsoon yang dingin dari Australia.

Namun, tambahnya, karena suhu muka air Samudera Pasifik lebih panas daripada suhu permukaan Samudera Hindia, angin bergerak ke arah Samudera Pasifik membawa uap air yang ada di Indonesia sehingga potensi kekeringan pun meningkat.

Kondisi tersebut, menurut Dwikorita, harus diantisipasi sejak dini. Meski diakuinya, fenomena El Nino tahun ini diperkirakan tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, tambah dia, BMKG tetap melakukan observasi, monitoring, prediksi terkait kondisi cuaca dan iklim untuk 10 hari ke depan, serta menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Dwikorita berpesan, agar masyarakat memanfaatkan air secara bijaksana di tengah potensi dampak kekeringan yang diperkirakan terjadi.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional, Rachmi Widiriani, mengungkapkan, ada empat hal yang harus

diantisipasi dalam kaitan ketersediaan pangan, yaitu kondisi geopolitik, perubahan iklim, perubahan kebiasaan konsumen pangan, dan peningkatan penyebaran penyakit hewan ternak.

Melihat perkiraan ancaman El Nino itu, Rachmi berpendapat, langkah antisipasi harus segera diambil agar tidak terjadi gangguan ketersediaan pangan. Badan Pangan Nasional, ujar dia, bertugas memperkuat cadangan pangan di tingkat pusat dan daerah. Jangan sampai, tegas Rachmi, terjadi kerawanan pangan.

Status ketahanan pangan di Indonesia, ujar Rachmi, berada pada posisi 63 dari 113 negara. Sejumlah upaya yang dilakukan Badan Pangan Nasional dalam mengupayakan ketahanan pangan, tambah dia, antara lain menggelar bazar pangan murah dan penguatan cadangan pangan,

pihaknya juga ikut mengkoordinir antar kementerian dan lembaga terkait dalam menjaga ketersediaan pangan. Rachmi juga mendorong pemanfaatan pangan lokal di setiap daerah, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ketua MPBI, Avianto Amri berpendapat, terkait sejumlah potensi ancaman perubahan iklim itu kita bisa saja bersikap bahwa semua kondisinya aman dan tenteram, tetapi kita juga harus bersiap pada skenario terburuk. Menurut Avianto, musim kemarau tidak bisa dicegah, yang bisa diantisipasi adalah dampaknya.

Langkah penting menghadapi El Nino, tambah Avianto, adalah bagaimana informasi terkait iklim dan cuaca dapat disampaikan dan dipahami dengan baik oleh masyarakat, termasuk dampak dan risikonya. Upaya mendorong partisipasi generasi muda dalam



agar harga pangan lebih terjangkau bagi masyarakat.

Menurut Rachmi, pada 2022 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) Indonesia, yaitu proporsi dari suatu populasi tertentu dengan konsumsi energi sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, tercatat 10,21%. Padahal, ujanya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada 2023 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ditargetkan hanya 5%.

Rachmi mengungkapkan, dengan kondisi tersebut, setiap ada peringatan dari BMKG

penyebaran informasi cuaca, menurut dia, merupakan langkah strategis mengingat dekatnya kelompok milenial dengan gawai dan informasi.

Pada kesempatan itu, wartawan senior, Saur Hutabarat, berpendapat, sejumlah lembaga terkait penanganan perubahan iklim dan dampaknya sudah menunjukkan kinerja yang baik. Masyarakat, ujar Saur, harus mengikuti dan tidak mengabaikan informasi terkait perubahan cuaca dan dampaknya, yang disampaikan sejumlah lembaga tersebut.

Informasi untuk menghemat air dan panen hujan, tambah dia, bukan semata anjuran dalam menghadapi kedaruratan, tetapi karena air adalah sumber kehidupan. □

Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI)

HNW: Agar Pendidikan Islam Jadi Unggul, Songsong 100 Tahun Indonesia Merdeka

Bila pembelajaran di masa ini, jika disikapi dengan penuh kepedulian dan terus mengembangkan diri maka akan berbuah 20-30 tahun ke depan. Bisa menghadirkan generasi emas tepat ketika Indonesia memasuki 1 abad kemerdekaannya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BILA pembelajaran di masa ini, jika disikapi dengan penuh kepedulian dan terus mengembangkan diri maka akan berbuah 20-30 tahun ke depan. Bisa menghadirkan generasi emas tepat ketika Indonesia memasuki 1 abad kemerdekaannya.

Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang di antaranya membidangi urusan agama, Hidayat Nur Wahid (HNW) menjadi narasumber dalam kegiatan Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI) bersama Kanwil Kemenag DKI Jakarta dan ratusan pimpinan dan anggota Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Jakarta Pusat.

HNW membuka kegiatan NGOPI yang berlangsung di Jakarta, Jumat (14/7/2023), dengan sebuah pantun: “Bukan kopi sembarang kopi, kopi dari pulau Seram lezat rasanya. Bukan ngopi sembarang ngopi, ngopi ngobrol pendidikan Islam berkah adanya.”

Selanjutnya, HNW menegaskan,

pendidikan Islam di Indonesia mampu bersaing dengan pendidikan umum dan diminati oleh banyak lapisan masyarakat. Terbukti, dari 5 besar sekolah dengan nilai UTBK tertinggi tahun 2022, nomor 1 diraih oleh MAN Insan Cendekia Serpong, dan nomor 4 MAN Insan Cendekia Pekalongan. Artinya madrasah terbukti bisa unggul, bahkan lebih unggul dari sekolah pendidikan umum. “Ini harus jadi motivasi dan inspirasi untuk semua pengelola pendidikan Islam, termasuk organisasi dan guru-guru Raudhatul Athfal,” ujar Anggota DPR-RI Dapil DKI Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri ini.

MAN Insan Cendekia misalnya didirikan pada tahun 1996 oleh B.J. Habibie. 25 tahun kemudian, upaya tersebut berbuah manis dengan terus hadirnya generasi-generasi unggul dari lembaga pendidikan tersebut. “Artinya, pengelola lembaga pendidikan Islam harus bersikap sabar dan ulet, sambil terus optimistis dan berpikir jangka panjang.

Baru setelah 20 tahunan semenjak didirikan, MAN Insan Cendekia menghadirkan hasil pendidikan yang unggulan.

Jadi, menurut HNW, bila pembelajaran di masa ini, termasuk di Raudhatul Athfal, jika disikapi dengan penuh kepedulian dan terus mengembangkan diri, akan berbuah 20-30 tahun ke depan, bisa menghadirkan generasi emas tepat ketika Indonesia memasuki 1 abad kemerdekaannya.

“Dengan demikian sesungguhnya peluang pendidikan Islam untuk berkontribusi positif sambut generasi emas yang akan bertemu dengan peringatan 100 tahun Indonesia Merdeka, sangatlah ada. Apalagi ideologi negara; Sila 1 Pancasila serta konsitusi; UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 31) sangat bisa dijadikan rujukan untuk maksimalkan peluang hadirkan pendidikan Agama (Islam) yang berkualitas tersebut,” tambahnya.

Namun, Hidayat juga menyoroti beragam tantangan yang harus menjadi perhatian

para guru dan siapapun yang peduli dengan pendidikan Agama. Di antaranya adalah soal moral peserta didik yang semakin mudah dirusak dengan hadirnya beragam kampanye negatif secara digital, seperti kampanye LGBT, games berlebihan, dan pergaulan bebas.

Juga beberapa kebijakan yang justru tidak akomodatif terhadap pendidikan Islam, misalnya minimnya alokasi APBN, upaya menghapuskan frasa agama dari peta jalan pendidikan, dan hilangnya tokoh-

tokoh Umat Islam dari Kamus Sejarah. Sekalipun dua tantangan terakhir itu sudah dapat diatasi.

“Saya bersama Fraksi PKS di DPR-RI terus mengawal agar ekosistem kebijakan nasional senantiasa berpihak pada pengamalan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 agar pendidikan, termasuk pendidikan Agama Islam, tetap dapat dihadirkan dengan cara yang baik dan benar. Sehingga, selalu bisa jadi alternatif solusi dan yang terbukti unggul menghadirkan generasi muda

berkualitas yang diharapkan dapat berkontribusi wujudkan cita-cita Indonesia Merdeka pada saat nanti mereka memperingati 100 tahun kemerdekaan Indonesia,” pungkasnya.

Kegiatan NGOPI bertema: ‘Peluang dan Tantangan Pendidikan Islam Menuju 1 Abad Indonesia Merdeka,’ dihadiri oleh Kepala Kanwil Agama DKI Jakarta Dr. Cecep Khairul Anwar, M.Ag., beserta jajarannya, dan diisi oleh 2 narasumber pakar pendidikan Islam: Dr. Rahmad Hidayat dan H. Itang Rusmana, Lc. M.H.

Sementara Ketua IGRA Jakarta Pusat, Fitri Ratnaningsih, mengapresiasi kegiatan NGOPI sebagai bentuk pelatihan yang dibutuhkan guru untuk terus berkembang. Dirinya berharap dukungan kebijakan bagi lembaga pendidikan Islam bisa senantiasa meningkat.

“Raudhatul Athfal atau PAUD adalah gerbang pertama pendidikan bagi seorang anak yang bisa turut membentuk masa depannya. Kami apresiasi Pak Hidayat yang terus berupaya hadirkan dukungan kebijakan untuk RA dan pendidikan Islam, baik dalam hal infrastruktur kelembagaan maupun kesejahteraan para guru,” ujar Fitri. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

NGOPI Bersama Ketua PCNU Jakarta Pusat

Peluang & Tantangan Pengembangan Madrasah Menuju Indonesia Emas

HAMPPIR dua minggu kemudian, persisnya hari Selasa (25/7/2023), acara diskusi memperbincangkan pendidikan Islam ini juga diselenggarakan oleh Wakil Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid, bersama Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, mengikutsertakan ratusan guru, dan pengelola Madrasah se-Jakarta Pusat.

Turut hadir dalam diskusi tersebut adalah Ketua PCNU Jakarta Pusat, KH. Syaifuddin, M.E., yang fasih dalam menyaingi tantangan untuk menghadirkan gagasan soal pengembangan madrasah dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Kita berada di era reformasi yang salah satu spiritnya adalah dukungan konkret bagi reformasi pendidikan dengan memerhatikan pendidikan keagamaan, termasuk lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Semua pihak harusnya mengawal agar dukungan ini terus berlanjut atau bahkan semakin meningkat hingga nanti 100 tahun Indonesia merdeka,” papar HNW.

Hidayat yang merupakan Anggota Komisi VIII DPR-RI yang di antaranya membidangi urusan agama ini, menjelaskan, sebelum era reformasi, terminologi “madrasah” tidak disebutkan dalam Undang-Undang. Dampaknya, belum ada dukungan nyata

Negara. khususnya dari segi legalitas formal dan anggaran untuk peningkatan mutu dan eksistensi pendidikan melalui lembaga madrasah. Frasa “Madrasah” baru diakui di era Reformasi, tepatnya melalui UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Unsur pendidikan Islam yang juga menjadi nilai-nilai lainnya di dalam agama, yakni meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia, sebelum reformasi juga merupakan sesuatu yang tidak ditemukan dalam produk hukum apa pun. Namun, setelah hadirnya era Reformasi, ketiga unsur penting pendidikan tersebut masuk sebagai tujuan pendidikan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

nasional dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat(3). Dalam konteks memajukan pendidikan, agama pun dipentingkan, sebagaimana termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 31 ayat 5.

“Kita bersyukur Konstitusi Indonesia sejak di era Reformasi ini membuka peluang besar untuk juga hadirnya pendidikan Agama (Islam) yang unggul dan berkualitas. Meskipun di tataran teknis kebijakan, ada PR yang terus kami perjuangkan, khususnya terkait keadilan alokasi anggaran antara pendidikan keagamaan dengan pendidikan umum, yang hingga kini masih sangat timpang,” ujarnya.

“Tetapi, era Reformasi ini juga menampilkan fakta berulang bahwa Madrasah juga

bisa menjadi lembaga pendidikan tingkat nasional yang sangat berkualitas, terbukti dengan selalu tampilnya Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Serpong sebagai sekolah yang sangat diunggulkan, bahkan tahun 2022 menjadi ranking satu secara nasional. Maka sangat dipentingkan peran serta para guru Madrasah tampil percaya diri, untuk bisa menjadi penggerak dan teladan, agar bonus demografi menuju generasi Indonesia Emas nanti akan menjadi positif bukan yang negative, karena salah dasar dan salah arah dalam berpendidikan. Apalagi menuju tahun 2045 tantangan-tantangan dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam, memang banyak dan

kompleks juga,” jelasnya HNW.

Ketua PCNU Jakarta Pusat yang akrab disapa Gus Syaifuddin menuturkan, Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat dan diproyeksikan berada di peringkat 5 besar ekonomi dunia pada 5-10 tahun mendatang. Oleh karena itu pendidikan Islam, termasuk Madrasah, harus sukses menghadirkan peserta didik yang berorientasi global dengan tetap mempertahankan prinsip ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sehingga bisa terlibat dalam segala bidang yang mendukung kemajuan Indonesia.

“Kunci lainnya adalah menghadirkan persatuan antarpemangku kepentingan pendidikan Islam. Forum diskusi seperti Ngopi yang digagas Pak Hidayat merupakan momentum penting penguatan soliditas dan kualitas, khususnya di kalangan unsur Madrasah di Jakarta,” tutup Gus Syaifuddin yang antusias menyambut kegiatan ini dan berharap agar bisa berkelanjutan.

Kegiatan “Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi)” kali ini dihadiri oleh ratusan guru dan tenaga kependidikan madrasah se-Jakarta Pusat, dan dibuka oleh Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag DKI Jakarta H. Slamet Abadi, M.Si. Turut hadir Dr. Suprananto sebagai narasumber akademisi kurikulum pendidikan, dan Dr. Supadi, M.Pd sebagai pemandu diskusi. □



Terima Bintang Abhinaya Jagadhita

Syarief Hasan: Penghargaan ini untuk Seluruh Insan Koperasi

“Kami terus berkomitmen mendorong Pemerintah untuk memberikan perhatian dan pembinaan serius terhadap pengembangan koperasi Indonesia,” ujar Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan.

WAKIL Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Prof. Syarief Hasan kembali menerima penghargaan “Bintang Abhinaya Jagadhita” dari Dewan Koperasi Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Tingkat Nasional ke-76 Tahun 2023 yang dilaksanakan di Auditorium Universitas Negeri Padang pada Ahad, (23/7/2023).

Penghargaan “Bintang Abhinaya Jagadhita” dari Dewan Koperasi Indonesia ini diterima oleh Prof. Syarief Hasan atas jasa dan kepeduliannya terhadap pengembangan koperasi. Syarief Hasan juga disebut mampu mempersatukan kembali Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang sempat terjadi dualisme kepengurusan.

Syarief Hasan yang kala itu menjadi Menteri Koperasi dan UKM pada masa pemerintahan Presiden SBY Periode 2009-2014 turut mendamaikan dan mempersatukan kembali Dewan Koperasi Indonesia. Kala itu, Dewan Koperasi Indonesia sempat mengalami dualisme selama 4 tahun, dan dapat dipersatukan kembali pada tahun 2009.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyampaikan apresiasinya terhadap Dewan Koperasi Indonesia. “Saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan terima kasih dan apresiasi dari lubuk hati paling dalam atas penghargaan yang diberikan Dekopin kepada kami. Penghargaan ini untuk seluruh insan koperasi di Indonesia,” ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan melanjutkan, ia memiliki perhatian besar terhadap koperasi kala menjadi Menteri Koperasi dan UKM. “Kala itu, kami mengangkat nama koperasi di tingkat internasional. Ada puluhan koperasi yang kami dorong dan berhasil mendapatkan pengakuan internasional ICA masuk 300 Koperasi Dunia sesuai standar internasional kala itu,” ujar Syarief Hasan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Selama menjadi Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan juga berhasil meningkatkan jumlah koperasi di Indonesia. Dari 110.470 unit koperasi pada tahun 2009 berkembang menjadi 203.701 unit pada tahun 2014. Jumlah anggota koperasi pun ikut berkembang dari 29,2 juta menjadi 35,2 juta. Sementara volume usaha meningkat dari Rp82,21 triliun menjadi Rp125,6 triliun.

Guru Besar Universitas Negeri Makassar ini juga menyebut, koperasi kala itu mampu bertransformasi dengan baik. Menurut Syarief Hasan, koperasi secara konsisten efisien dalam beberapa hal, antara lain layanan prima kepada anggotanya, efisien secara institusi, dan mampu menghindarkan dari pendanaan yang tidak perlu, karena sumber modal berasal dari anggota dan mampu adaptasi global serta kemajuan teknologi. “Itulah transformasi yang kami lakukan terhadap koperasi kala itu,” jelas Syarief Hasan.

la berkomitmen untuk terus mendorong

pengembangan koperasi di Indonesia. “Kami terus berkomitmen mendorong Pemerintah untuk memberikan perhatian dan pembinaan serius terhadap pengembangan koperasi. Koperasi sebagai salah satu tulang punggung ekonomi rakyat bisa bangkit kembali. Koperasi maju, ekonomi terus tumbuh dan merata,” tutupnya.:

Penghargaan Tokoh Reformasi Parlemen

Selain penghargaan dari Dewan Koperasi Indonesia, Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, pada tahun 2023 ini juga menerima penghargaan sebagai Tokoh Reformasi Parlemen. Penghargaan ini untuk kesekian kalinya diberikan oleh Media Teropong Senayan kepad Syarief Hasan sebagai bukti konsistensi politisi senior Partai Demokrat ini dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai legislator.

“Saya menyampaikan terima kasih dan terus mendorong Teropong Senayan untuk menyelenggarakan Awards ini secara

berkala. Ini penting agar publik dapat menilai kinerja wakil rakyatnya dalam menjalankan fungsi partisipasi. Setiap anggota DPR punya kewajiban memperjuangkan aspirasi konstituennya, termasuk dalam pembentukan aturan hukum, pengawasan, maupun penyusunan anggaran negara,” tutur Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Menurut Syarief Hasan, parlemen punya fungsi krusial dalam kehidupan bernegara. DPR bersama pemerintah membentuk kebijakan strategis yang ditujukan bagi kepentingan rakyat. Parlemen yang aspiratif, partisipatif, serta kritis akan berdampak pada kualitasnya kebijakan publik. Semua kiprah yang dilakukan ini adalah bagian dari perjuangan platform dan cita-cita partai. Partai Demokrat konsisten dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini berpendapat, salah satu ciri utama demokrasi adalah partisipasi aktif dan kritis parlemen dalam penyusunan kebijakan. Parlemen adalah representasi rakyat, maka suara parlemen mestinya adalah suara rakyat. Maka bentuk penghargaan oleh Teropong Senayan ini menjadi refleksi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bahwa kerja-kerja parlemen adalah gabungan dari kerja politik dan teknokratik. Parlemen dan pemerintah setara sebanding dalam menyusun kebijakan.

“Saya berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat. Penghargaan oleh Teropong Senayan ini tentu akan menjadi pengingat bahwa tugas utama

setiap Anggota DPR adalah berpihak pada rakyat. Saya tentunya mempersembahkan penghargaan ini kepada konstituen saya di Cianjur dan Kota Bogor, Keluarga Besar Partai Demokrat, serta rakyat Indonesia pada umumnya. Mari kita sama-sama mengawal demokrasi agar terus tumbuh dan berkualitas,” tutup Syarief. □

Delegasi PB. Sangkemi

HNW: Meminimalisir Potensi Ketegangan dengan Sentuhan Budaya Non Politik

Kontestasi politik, perbedaan pilihan, tidak semestinya membuat seluruh anak bangsa saling panas dan saling memanas.

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengungkapkan bahwa kontestasi di tahun politik 2024 bisa memunculkan potensi ketegangan di tengah masyarakat karena perbedaan pilihan parpol atau calon Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu, kata Hidayat, sangat diperlukan banyaknya sentuhan seni dan budaya non-politik menjadi semacam relaksasi nasional, agar rakyat dan para kandidat tersegarkan, tercerahkan, dan tetap

tersemangati.

HNW, begitu Hidayat Nur Wahid biasa disapa, menyatakan, sentuhan seni dan budaya non-politik itu sangat penting, mengingat Pemilu 2024 yang masih beberapa bulan lagi, namun nuansa ketegangan kompetisinya sangat terasa saat ini. Apalagi ranah media sosial dunia sangat mendominasi kehidupan, terutama di kalangan generasi milenial, generasi Z, dan lainnya.

HNW mengingatkan, jangan sampai ketika saat Pemilu dilaksanakan, ketegangan akan

berubah menjadi konflik. Ketika itu terjadi, potensi perpecahan akan sangat mungkin terjadi dan itu sama-sama sangat tidak kita harapkan.

“Kita ingin pemilu berdampak baik untuk semua pihak, yaitu rakyat, partai, para kandidat, dan masa depan bangsa dan negara. Karena, untuk pemilu pemerintah menggelontorkan APBN tidak kurang dari Rp 60 Trilyun, tentu itu bukan untuk menjadi pembuat pilu,” ujarnya, saat menerima kunjungan delegasi PB. Sangkemi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

(Sangkakala Kawula Muda Indonesia), di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sangat mengapresiasi berbagai elemen bangsa yang menaruh kepedulian yang besar terhadap isu tersebut, salah satunya dari komunitas atau organisasi seni, serta budaya Sangkemi.

Dalam dialog dengan HNW, Sangkemi yang diwakili oleh Ketua Umumnya, Garis Basuki, mengungkapkan sebuah ide besar bersama

MPR untuk membuat seni sandiwara, teatrical, dan lagu tentang kebangsaan, tentang bagaimana beratnya para pejuang bangsa memperjuangkan persatuan bangsa ini, sehingga berhasil meraih kemerdekaan sampai hari ini.

“Pimpinan MPR, termasuk Bapak HNW, di situ bisa berperan sebagai tokoh pejuang bangsa,” ujar Garis Basuki. Dia menyebut, pihaknya mengambil momentum nuansa tahun politik 2024 bersama MPR agar tujuan besarnya, yakni menyampaikan pesan damai bisa tersampaikan dengan maksimal.

Menurut Garis Basuki, kontestasi politik, perbedaan pilihan, tidak semestinya membuat seluruh anak bangsa saling panas dan saling memanas. “Demokrasi harus kita bangun dengan ide dan gagasan yang akan membawa kita semua kepada cita-cita bersama, hadirnya cita-cita negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana disepakati dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,” terangnya.

Alasan memilih MPR dalam sinergitas kegiatan seni dan budaya itu, kata Garis Basuki, karena MPR adalah rumahnya rakyat Indonesia. Seluruh Pimpinan MPR merepresentasikan seluruh kekuatan politik dan daerah. HNW merespon positif gagasan tersebut. HNW menyebut, pendekatan seni dan budaya seperti pagelaran wayang kulit, wayang orang, wayang golek sudah dilakukan MPR periode sebelumnya sebagai metode penyampaian Sosialisasi Empat Pilar MPR.

“Tentu gagasan Sangkemi ini, sebagai pengingat kami di MPR agar metode pendekatan menggunakan seni dan budaya kembali dimunculkan. Dan, tentu saja gagasan ini sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk masyarakat, agar suasana apalagi saat tahun politik, menjadi adem dan harmoni. Karena kita semua



ditingkatkan kembali untuk menomersatukan tujuan kemerdekaan Indonesia dan cita-cita Reformasi terus mementingkan keutuhan bangsa dan negara,” imbuhnya.

Di sesi akhir, HNW berharap, mudah-mudahan pagelaran budaya ini menciptakan

kedamaian. Dengan seni dan budaya ini, sebagai pengingat kepada masyarakat bahwa pelaksanaan dan hasil Pemilu 2024 harus terlaksana sesuai aturan yang disepakati dalam konstitusi, terselenggara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil.

“Sentuhan seni dan budaya juga bisa berkontribusi besar untuk hadirnya pemilu yang aman, lancar tanpa konflik, dan sesuai dengan harapan dan cita-cita para pejuang bangsa,” pungkasnya. □

Kongres Keluarga Indonesia

HNW: Membangun Keluarga Berkualitas Menyongsong Indonesia Emas 2045

Banyak tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya adalah globalisasi yang menghadirkan berbagai perilaku ataupun ideologi dan budaya yang tak sesuai dengan konstitusi dan budaya bangsa, serta cita-cita Indonesia merdeka.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR melaksanakan sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 di mana dalam UUD tersebut termuat hak asasi manusia untuk membentuk keluarga dari keturunan yang sah. Untuk itu, kami dari MPR mendukung Kongres III Keluarga Indonesia.

Wakil Ketua MPR, Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA., (HNW), menyampaikan hal itu usai menjadi pembicara utama atau *keynote speech* Kongres III Keluarga Indonesia di Gedung

Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 29 Juli 2024.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidang Perempuan Dan Ketahanan Keluarga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tema: ‘Kolaborasi Elemen Bangsa Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045’ dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai organisasi dan lintas tokoh agama, serta tokoh masyarakat dan akademisi.

Lebih lanjut, HNW mengatakan, keluarga

Indonesia harus berbasis pada konstitusi agar bisa menghadirkan pilar kokoh dan kuat untuk mempersiapkan panen bonus demografi yang positif. Untuk menuju Indonesia Emas Tahun 2045 anak-anak bangsa generasi milenial, Z maupun alpha, harus tumbuh kembang dalam suasana yang berkualitas. “Agar tumbuh berkualitas maka harus berada dalam keluarga yang berkualitas”, ujar alumni Pondok Pesantren Gontor itu.

Keluarga yang berkualitas, menurut HNW, adalah keluarga yang terbentuk sah secara



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

hukum dan agama. Hal demikian juga merupakan aturan yang diatur dalam konstitusi dan UU Perkawinan. Untuk itu HNW kembali menegaskan bahwa MPR menyambut baik dan berharap agar kongres yang juga melibatkan kaum bapak itu dapat memberikan dampak yang baik bagi bangsa dan negara.

“Kongres ini bukan hanya untuk kaum perempuan, namun bapak-bapak juga diundang sebab keluarga tidak hanya ibu, tapi juga mementingkan peran bapak,” tuturnya. Dan, mereka yang hadir di kongres ini didorong untuk berkolaborasi agar berkontribusi menghadirkan keluarga yang

berkualitas menyongsong dan menyelamatkan bonus demografi dengan hadirnya generasi berkualitas.

HNW menyebutkan, banyak tantangan menuju generasi emas ke depan. Salah satu tantangan itu, sebut HNW, adalah globalisasi yang menghadirkan berbagai perilaku ataupun ideologi dan budaya yang tak sesuai dengan konstitusi dan budaya bangsa, dan cita-cita Indonesia merdeka. Misalnya, beberapa negara barat sudah mengakui adanya budaya keluarga sejenis dan LGBT.

Perilaku demikian, menurut HNW, dalam konteks di Indonesia tidak sesuai dengan

Pancasila dan konstitusi. Bila kemudian keluarga sejenis dan LGBT mendominasi bisa dibayangkan siapa nanti anak-anaknya dan siapa yang akan menjadi anak, bagaimana pula kualitas kehidupan dan budaya mereka. Adanya manusia yang berkualitas dalam menyongsong bonus demografi, menurut pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu sangat penting karena dalam era ke depan pasti terjadi kompetisi yang luar biasa.

Bila anak-anak tidak tumbuh kembang dalam keluarga atau semangat berkualitas mungkin karena terkena narkoba, buang-buang waktu seperti main game serta frame anti sosial, terpengaruh LGBT, hal demikian tentu akan sangat membahayakan masa depan bangsa. “Bila kondisi yang demikian tercipta maka yang dipanen dari bonus demografi adalah bom waktu bonus demografi negatif,” papar HNW.

Bonus demografi negatif yang dimaksud HNW adalah di mana generasi muda yang ada tidak berkualitas, tidak kompetitif, sehingga mudah menjadi pasar dari narkoba dan budaya yang tak sesuai dengan Pancasila dan konstitusi, dan itu tidak sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Jadi, “Penting kolaborasi selamatkan keluarga dan generasi bangsa, songsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. □



Perubahan UUD untuk **Menjawab** Perkembangan Peradaban



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sejumlah pakar hukum tata negara dan politik serta anggota Badan Pengkajian MPR berkumpul di Makassar. Di sana, mereka melakukan FGD bertema: ‘Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD).’ Bagi para pakar, nilai konstitusi bukanlah harga mati. Konstitusi bisa diubah, untuk mengikuti perkembangan peradaban. Ada banyak faktor yang menyebabkan UUD bisa berubah.

PADA pekan kedua bulan Juli 2023, Badan Pengkajian MPR bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Muslimin Indonesia, menggelar *Focus Group Discussion* (FGD). FGD yang bertema: ‘Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD)’ itu digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Hadir dari anggota Badan Pengkajian sekaligus anggota MPR adalah Prof. Hendrawan Supratikno dari Fraksi PDI Perjuangan, Ajbar Abdul Kadir dari Kelompok DPD, Marwan Cik Asan dari Fraksi Partai Demokrat, dan Sri Wulan dari Partai Nasdem. Sedang dari pihak kampus, hadir Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., dan Prof. Muhammad dari Universitas Hasanuddin, Herman dari Universitas Negeri Makassar, dan Mohammad Arif dari Universitas Muslimin Indonesia.

Dalam pemaparan, Muhammad menguraikan teori-teori kekuasaan. Konsep kekuasaan negara (*Trias Politika*), menurut Muhammad, berasal dari konsep pemerintahan Negara Yunani klasik. Salah

seorang filsuf besar, Aristoteles, berpandangan, tidak ada satupun bentuk negara yang ideal, seperti aristokrasi, monarki, bahkan demokrasi. “Sehingga yang diperlukan adalah kombinasi ketiga bentuk tersebut,” ujarnya.

Lebih maju lagi, teori kekuasaan dibagi-bagi dalam klasifikasi yang lebih jelas. Dari pandangan John Locke, membagi kekuasaan negara atas eksekutif, legislatif, federatif. Montesquieu menyempurnakan konsep John Lock dengan yudikatif sehingga muncullah konsep Trias Politika. Disebutkan Trias Politika sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau suatu kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. “Konsep Trias Politika kemudian dikembangkan dan ditulis dalam berbagai konstitusi di banyak negara”, tuturnya.

Dalam paparan, dia menyebutkan, jumlah parlemen bertambah secara signifikan di seluruh dunia. Menurut kajian *The Inter-Par-*



liamentary Union (IPU), sebanyak 190 dari 193 negara memiliki lembaga perwakilan. Meskipun demikian, di antara jumlah itu, hanya 45% yang benar-benar lembaga demokratis, sementara 20% lainnya bercorak sebagai “hybrid regime.” “Dengan kata lain, keberadaan lembaga parlemen tidak serta merta bersinonim dengan demokrasi dan sebaliknya, keberadaannya amat ditentukan oleh faktor politik,” ungkapinya.

Lebih lanjut, Muhammad mengungkapkan, di sejumlah negara, lembaga perwakilan dinamakan “parliament” yang terambil dari bahasa Prancis “parler”, yang artinya berbicara, karena bagaimanapun itulah tujuan dari setiap anggota parlemen.

Hampir 40% nama parlemen di dunia ditujukan dengan istilah yang berarti “pertemuan” atau “majelis,” seperti *congress*, *diet* (Jepang), *knesset* (Israel), *skupstina* (di

beberapa negara Balkan), *majlis* (di banyak negara Arab). Dalam tradisi Nordic, istilah yang dipakai *riksdagen* (misalnya Finlandia, Swedia) yang dapat diterjemahkan sebagai “pertemuan nyata”; kemudian istilah *althingi* (Islandia), *folketinget* (Denmark), dan *storting* (Norwegia).

Di Mesir dan Tunisia, peran dan kekuasaan parlemen sangat penting untuk membahas pembentukan negara pasca revolusi. Serupa dengan itu, di negara Yaman, Yordania, dan Oman, janji untuk mengembalikan kedaulatan parlemen banyak dilakukan untuk memenuhi gugatan rakyat. Singkatnya, Parlemen tampak sebagai simbol dan elemen kunci pembentukan “pemerintahan perwakilan.”

Masuk ke dalam tema, Muhammad menuturkan, perubahan UUD adalah sebuah keniscayaan. Alasannya, UUD bukan kitab suci dan tidak bersifat mutlak/dogmatis,

walaupun harus dibuatkan syarat sangat ketat jika akan mengubahnya. UUD, katanya, kesepakatan tertinggi dari sekelompok orang cerdas untuk kepentingan orang banyak. “Karena sebagai kesepakatan tertinggi maka lembaga yang menetapkannya adalah lembaga tertinggi Negara,” ujarnya. “Sehingga MPR idealnya tetap menjadi lembaga tertinggi Negara,” tambahnya.

Ada mekanisme mengubah UUD. Faktornya adalah didorong oleh kekuatan besar (sosial, politik, ekonomi, budaya, perang/revolusi), baik secara positif maupun negatif. Tak hanya ada kekuatan besar yang bisa mengubah UUD, namun konvensi ketatanegaraan (kebiasaan ketatanegaraan), dan amandemen (perubahan formal) juga menjadi faktor UUD bisa berubah.

Senada dengan Muhammad, Hamzah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Halim menyebutkan, UUD atau konstitusi sangat mungkin mengalami perubahan dengan beberapa alasan yang mendasarinya. Alasannya, yakni: Perlunya mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tegas dalam memberikan pengaturan; Perlunya mengubah dan menambah pengaturan di dalam konstitusi yang terlampaui singkat dan tidak lengkap;

Perlunya memperbaiki berbagai kelemahan mendasar baik dalam isi maupun proses pembuatannya. Seperti memperbaiki konsistensi hubungan antarbab, antarpasal, serta antara bab dan pasal; dan, Perlunya memperbarui beberapa ketentuan yang tidak lagi relevan dengan kondisi politik dan ketatanegaraan suatu negara.

Disebut beberapa cara mengubah UUD,

yakni secara revolusi, perubahan arti dari kalimat yang tetap, perubahan formal. Keputusan hakim, dan kebiasaan konstitusi. Lebih jelas disebut hal-hal yang mendorong terjadi perubahan, “Adanya perkembangan peradaban, perang, krisis ekonomi, negara kesejahteraan, dan pandangan masyarakat”, ujarnya. □

AWG

Mekanisme Mengubah UUD

UUD bisa disempurnakan, karena mengubah konstitusi bukan hal yang tabu. Meski demikian, ada mekanisme yang perlu dilakukan agar perubahan yang dilakukan tertib hukum dan aturan.

DALAM pemaparannya, dosen Universitas Negeri Makassar, Herman, mengatakan, pilihan atas perubahan konstitusi di Indonesia, baik formal dan nonformal, dapat menimbang untung ruginya bagi kepentingan nasional, terutama bagi kepentingan rakyat Indonesia, yang telah secara nyata, baik implisit, maupun eksplisit mendapat jaminan konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945.

Efektivitas atau daya guna (*doeltreffendheid*) dan efisiensi atau hasil guna benar-benar dipertimbangkan dengan seksama, diteliti mendalam, dan melalui kajian yang komprehensif terhadap bentuk perubahan yang diinginkan. Perubahan konstitusi di Indonesia dengan amandemen formal dapat dilakukan, misalnya untuk mempertegas sistem presidensiil saja. Apabila secara konsisten menggunakan sistem presidensiil, maka setiap legislasi yang dilakukan benar-benar dibahas oleh lembaga legislatif, tanpa



melibatkan lembaga eksekutif, atau pemerintah dalam hal ini.

Lebih lanjut dikatakan, apalagi dikaitkan

dengan sistem perwakilan dua kamar (*bi-cameral system*), di dalam UUD, seharusnya dalam setiap pembahasan undang-undang

(legislasi) secara bersama-sama dua kamar perwakilan rakyat (DPR dan DPD) yang diberi kewenangan konstitusional. MPR disebutkan dalam undang-undang dasar terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Jika dihubungkan dengan keanggotaan MPR ini dengan Pasal 22D ayat (1), dan (2) UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, tidak memiliki relevansi dan bahkan dapat dikatakan saling menegasikan satu sama lainnya. Pasal 2 ayat (1) menganut pembagian kamar di MPR dengan dua kamar perwakilan rakyat (DPR dan DPD), atau dapat dikatakan, DPR dan

Untuk bagian pasal-pasal lainnya di dalam UUD dapat dilakukan melalui perubahan konstitusi non-formal. Berjalan, dan menyesuaikan perkembangan, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat di Indonesia, dan kenegaraan berdasarkan kepentingan bangsa dan negara. Selain, juga mengikuti perkembangan dan dinamika hubungan sosial-ekonomi yang berlaku secara internasional.

Pilihan atas perubahan konstitusi dapat dilakukan dengan cara formal, dan non-formal, tergantung pada kepentingan nasional, bangsa, dan negara. Mempertimbangan biaya-biaya yang muncul sebagai akibat dari perubahan konstitusi yang dilakukan. Biaya,

kaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. melalui ajudikasi, legislasi, dan bahkan delegasi perundang-perundang kepada lembaga eksekutif, atau pemerintah dalam hal ini.

Sementara itu, dosen Universitas Muslimin Indonesia, Mohammad Arif, menyebut, tata cara perubahan UUD yang diatur dalam Undang-Undang MD3 dan Peraturan Tatib MPR telah sesuai dengan amanat UUD sepanjang dimaknai bahwa tidak hanya dapat mengubah pasal-pasal, namun juga termasuk konstruksi UUD yang terdiri dari bab, judul bab, dan pasal-pasal, serta Pimpinan MPR tidak boleh mereduksi kewenangan konstitusional pengusul terkait penilaian terhadap alasan-alasan perubahan yang disampaikan oleh pengusul.

Kewenangan mengkaji usul perubahan UUD dari pengusul dapat dimaknai termasuk pengertian mengubah rumusan/redaksi pasal-pasal sepanjang tidak melenceng atau bahkan memperkuat esensi dari bagian/pasal yang akan diusulkan perubahannya.

Panitia Ad Hoc MPR dalam menjalankan tugasnya mengkaji usul perubahan tidak boleh mereduksi kewenangan konstitusional dari anggota MPR pengusul, namun panitia Ad Hoc dapat menjadi “bandul penyeimbang” untuk menjaga marwah konstitusi dan kelangsungan NKRI dengan cara merumuskan perubahan pasal-pasal, jika di dalam usulan ditemukan materi muatan yang : (1) dapat menghambat tercapainya tujuan/cita-cita Negara Republik Indonesia; (2) dapat mengembalikan budaya feodalisme dan mereduksi kedudukan sebagai Negara Republik; (3) dapat membahayakan eksistensi Negara Kesatuan (unitary state); (4) bertentangan dan dapat membahayakan eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara.

Lebih lanjut disebutkan, materi muatan yang perlu dilakukan perubahan di masa yang akan datang adalah: (1). Pembatasan kekuasaan amandemen konstitusi (unamendable provisions); (2). Penguatan fungsi DPD.; (3). Mengatur mengenai kemungkinan jalan keluar Ketika pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan; (4). Mengambil alih Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 tentang Kategori Hal Lhwal Kegentingan Memaksa; (5). Menambahkan kewenangan MK, yakni mekanisme pertanyaan konstitusional (*constitutional question*). □

AWG



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DPD, merupakan lembaga legislatif di dalam UUD NRI Tahun 1945, namun demikian, di Pasal 20 ayat (1), dan (2) disebutkan DPR adalah lembaga legislatif, dan undang-undang dibahas secara bersama-sama dengan pemerintah, tidak disebutkan DPD sebagai lembaga legislative. Dan, tidak juga disebutkan, DPR dan DPD membahas secara bersama-sama suatu undang-undang, atau dengan kata lain, tidak memberikan kewenangan legislasi kepada DPD.

Keikutsertaan pemerintah dalam pembahasan undang-undang menjadikan sistem presidensiil yang dianut di Indonesia mendapat pengaruh dari sistem parlementer, sehingga dapat dikatakan sebagai quasi parlementer.

dalam hal kemampuan keuangan Negara, terhadap perubahan konstitusi secara formal harus dipertimbangkan, termasuk dengan mengingat ongkos politik dan sosial, tenaga serta pikiran rakyat Indonesia, apabila pilihan perubahan formal konstitusi dilakukan.

Urgensi perubahan konstitusi secara formal dapat dilakukan terhadap pasal-pasal di dalam UUD, misalnya untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensiil, dan sistem dua kamar di MPR. Selebihnya, pasal-pasal di dalam UUD cukup dilakukan perubahan secara non-formal saja, atau keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara, dan rancangan undang-undang yang ber-



H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI

PPHN Sebagai Jaminan Konstitusional Proses Transformasi Indonesia 2045

PETA jalan menuju dan mewujudkan profil Indonesia Emas 2045 adalah rangkaian proses negara-bangsa bertransformasi untuk menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi dunia. Konsistensi proses itu harus dijaga dan dirawat oleh sistem hukum ketatanegaraan yang kuat dan efektif. Menjadi sangat ideal jika peta jalan, realisasi semua agenda strategis dan rangkaian prosesnya ditetapkan dalam Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang wajib dipatuhi setiap administrasi pemerintahan.

Dalam sistem hukum ketatanegaraan untuk pembangunan berkelanjutan, PPHN menjadi amat penting dan sangat dibutuhkan. Apalagi ketika negara-bangsa bertekad menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi dunia pada satu abad usia kemerdekaan Republik Indonesia, PPHN yang menjadi panduan proses pembangunan berkelanjutan itu idealnya dipahami sebagai jaminan konstusional mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu.

PPHN-lah yang menetapkan dan memerintahkan kepada setiap pemerintahan untuk berfokus pada Visi Indonesia 2045. Visi itu meliputi pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional, serta tata kelola pemerintahan.

Manakala visi itu sudah disepakati melalui lembaga perwakilan rakyat, masyarakat Indonesia harus memperoleh jaminan konstitusional melalui PPHN bahwa Peta Jalan Indonesia Emas 2045 dengan

segala programnya itu harus dan akan dilaksanakan oleh setiap administrasi pemerintahan dengan konsisten sesuai penjadualan. Jaminan konstitusional itu diperlukan, terutama karena Peta Jalan Indonesia Emas 2045 harus dipahami sebagai gerak maju negara-bangsa menanggapi perubahan zaman dengan segala tantangan dan peluangnya. Karena harus terus bergerak maju, tidak boleh ada toleransi bagi segala sesuatu yang menghambat atau menjadi penghalang.

Lebih dari itu, dengan adanya jaminan konstitusional itu, PPHN secara tidak langsung mencegah setiap administrasi pemerintahan—pusat maupun daerah—untuk bereksperimen melalui program-program yang tidak sejalan dengan target Profil Indonesia Emas 2045. Sudah barang tentu bahwa setiap presiden atau kepala pemerintahan memiliki rancangan program pembangunan. Tetapi, apapun rancangan programnya, tetap harus berpijak pada panduan PPHN bagi transformasi negara-bangsa mewujudkan profil Indonesia Emas 2045.

Dengan adanya PPHN, setiap administrasi pemerintahan di pusat dan daerah akan selalu diingatkan bahwa profil Indonesia Emas 2045 itu adalah kehendak semua elemen rakyat yang kesepakatannya ditetapkan oleh lembaga perwakilan melalui dokumen PPHN yang dirumuskan MPR. Ketidapatuhan pada PPHN tentu membawa konsekuensi logis sesuai amanat konstitusi.

Perubahan zaman, perkembangan teknologi serta ragam dampak perubahan iklim ibarat berkat tersembunyi (a blessing in disguise) bagi Indone-

sia. Di sela-sela dampak positif dan negatif dari semua itu, perubahan-perubahan tersebut justru menghadirkan momentum bagi Indonesia untuk bertransformasi. Dampak perubahan iklim, misalnya, mengharuskan Indonesia fokus pada upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan. Juga karena perubahan iklim, Indonesia harus mempercepat tersedianya energi baru terbarukan (EBT).

Sedangkan perkembangan teknologi mengharuskan Indonesia melakukan percepatan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan, dan segera memenuhi kebutuhan talenta digital. Percepatan tersedianya infrastruktur sangat perlu agar semua daerah, termasuk wilayah pelosok, terjangkau jaringan internet.

Selain itu, sumber daya alam (SDA) yang dikuasai negara ternyata menjadi begitu berharga karena dibutuhkan pasar dan komunitas internasional, kini dan di masa depan. Kecenderungan ini memperkuat keyakinan Indonesia untuk melaksanakan hilirisasi SDA. Dua tujuan strategis bisa diwujudkan melalui hilirisasi SDA, yakni memungkinkan negara memanfaatkan semua potensi SDA untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dan tak kalah pentingnya adalah melaksanakan pendalaman sektor industri untuk menciptakan banyak lapangan kerja serta menjadi negara produsen barang jadi.

Dengan begitu, adalah keniscayaan dan juga sangat beralasan jika dalam program pembangunan berkelanjutannya Indonesia menetapkan target besar dan strategis pada dua-tiga dasawarsa mendatang. Sebab, masyarakat Indonesia memiliki kekayaan SDA yang cukup berlimpah. Mulai dari emas, tembaga, bauksit, nikel, timah, batu bara, hingga kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao, teh dan rempah-rempah lainnya.

Indonesia pun mampu mempercepat tersedianya energi

terbarukan yang bersih. Sebagai bagian dari komunitas global yang telah bersepakat untuk menghentikan penggunaan energi fosil yang polutif, Indonesia sedang giat mewujudkan tersedianya energi alternatif. Untuk menyediakan EBT, Indonesia pun memiliki modal yang lebih dari cukup, dengan potensi lebih dari 400.000 Mega Watt (MW). Dan, 50% di antaranya atau sekitar 200.000 MW adalah potensi energi surya. Pemerintah telah mengeluarkan roadmap pemanfaatan energi surya yang menargetkan kapasitas PLTS terpasang hingga tahun 2025.

Selain itu, potensi energi hijau yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga hidro pun cukup besar karena Indonesia memiliki 4.400 sungai. Belum lagi potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal). Pembangkit geothermal sangat melimpah dengan potensi mencapai 29 ribu mega watt, namun baru bisa direalisasikan sekitar 2.000 Mega Watt.

Itulah beberapa agenda transformasi ekonomi yang harus menjalani proses berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Tentu saja rangkaian proses untuk merealisasikan semua agenda transformasi ekonomi itu menuntut konsistensi. Proses berkelanjutan itu akan terlaksana jika kehendak melakukan transformasi ekonomi diperintahkan, dijaga dan dirawat oleh sistem hukum ketatanegaraan yang kuat dan efektif. Dalam konteks ini, rahim hukum ketatanegaraan harus melahirkan PPHN demi terwujudnya profil Indonesia Emas 2045.

Tanpa PPHN, sama artinya tidak ada jaminan konstitusional bahwa peta jalan menuju dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 akan dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsisten oleh setiap administrasi pemerintahan. Sebab, sejalan dengan sistem politik, setiap lima tahun Indonesia bisa mengganti kepala pemerintahan, baik presiden maupun kepala daerah. Dan, karena tanpa PPHN, tidak ada kewajiban presiden atau kepala daerah untuk melanjutkan proses merealisasikan semua agenda transformasi ekonomi itu. □

Rapat Kerja DPW Kesti TTKKDH Provinsi Banten

Yandri Susanto : Kesti TTKKDH Jadikan Tjimande Mendunia

Kesti TTKKDH sebagai organisasi yang fokus pada pembinaan seni silat dan pembentukan budi pekerti anggotanya sangat menjaga tradisi yang diwariskan oleh para kasepuhan Tjimande.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI. H. Yandri Susanto S.Pt., mengapresiasi konsistensi pengurus Kebudayaan Seni Silat dan Tari Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir (Kesti TTKKDH) menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal di tengah maraknya infiltrasi budaya asing. Beranggotakan 6 juta

orang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara, membuktikan bahwa organisasi ini berhasil melestarikan kebudayaan asli Banten di tengah-tengah masyarakat.

“Kesti TTKKDH sangat konsisten dalam menjaga dan melestarikan budaya Tjimande kepada masyarakat di tengah maraknya

pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia,” ujar Yandri. “Kebudayaan lokal asli Banten ini tersebar ke berbagai wilayah Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara,” ujar Yandri pada acara Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah DPW Kesti TTKKDH Provinsi Banten di Hotel Horison Ultima Serang (30/7).

Turut hadir staf ahli Gubernur Banten M. Agus Setiawan, Ketua DPW Kesti Banten Hakim Sulaiman Akbar, Sekjen DPP Kesti Mahyudi Yusuf, dan Ketua DPP Kesti Wahyu Nurjamil.

Konsistensi Kesti TTKKDH dalam menjaga dan melestarikan budaya Tjimande, menurut Yandri, merupakan penerapan dari Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 di mana negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

“Pengurus Kesti TTKKDH sudah melaksanakan amanat ketentuan konstitusi dengan turut serta menjaga dan melestarikan budaya lokal Tjimande, serta memperkenalkannya ke berbagai wilayah Indonesia serta mancanegara,” ujar Yandri.





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“Saya berharap, Kesti TTKKDH dapat membawa budaya Tjimande mendunia. Dengan anggota yang tersebar sampai ke mancanegara, budaya asli banten ini dapat diperkenalkan ke negara-negara lain,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Untuk itu, Yandri berharap, pembentukan

karakter, budi pekerti dan disiplin juga ditanamkan bagi para anggota Kesti TTKKDH. “Karena kedisiplinan menjadi dasar bagi para anggota untuk belajar seni silat Tjimande yang diwariskan secara turun-temurun,” ujar anggota DPR asal Dapil Banten II ini.

“Sebagai organisasi yang fokus pada pembinaan seni silat dan pembentukan budi

pekerti anggotanya, keluarga Kesti TTKKDH sangat menjaga tradisi yang diwariskan oleh para kasepuhan Tjimande. Kelid, tari kolot, urutan, golempan, dan keceran, sebagai seni budaya yang sudah ada ratusan tahun lalu tetap terjaga dan kelestariannya sampai hari ini sebagai bukti para penerusnya menjaga tradisi,” tutup Yandri. □

Prevalensi Stunting Nasional

Upaya Preventif Penanggulangan Stunting Harus terus Ditingkatkan

Guna mencegah bayi mengalami stunting setelah lahir diperlukan pengukuran rutin menggunakan antropometri.

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (01/08), menegaskan: “Upaya promotif dan preventif dengan melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk mengakselerasi pencapaian target prevalensi stunting nasional perlu terus didorong.”

“Berbagai upaya preventif melalui deteksi

dini sangat penting dalam mengakselerasi pencapaian target prevalensi stunting yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Rerie, sapaan Lestari Moerdijat. Maka, “Dengan gencarnya upaya preventif upaya pencegahan stunting bisa mulai dilakukan sejak 100 hari pertama kelahiran, yang merupakan masa krusial untuk mengatasi stunting,” katanya.

Pada awal tahun ini Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia secara khusus berfokus pada

program deteksi dini stunting yang dilakukan melalui pengukuran di Posyandu. Guna mencegah bayi mengalami stunting setelah lahir, menurut Rerie, diperlukan pengukuran rutin menggunakan antropometri. Diagnosis stunting dilakukan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan dengan antropometri, dan alat



Benteng Pendem di Kota Ngawi **Nasibnya Berubah Setelah Jokowi Datang**

Nasib bangunan itu sangat mengenaskan. Atapnya hilang, dindingnya roboh, dan dilumat oleh pohon. Bangunan yang dulunya megah dan kokoh menjadi tempat yang kotor dan angker. Kelelewar pun menjadi penghuninya. Dunia mistis menyelimuti sehingga muncullah aura negatif di sana. Semua ingin bangunan bersejarah yang bernama Benteng Van Den Bosch atau Benteng Pendem itu direstorasi. Harapan itu didengar oleh Presiden Joko Widodo. Saat meninjau ke sana, dia sepakat bangunan itu harus dipugar sehingga peninggalan bersejarah itu hidup kembali. Melebihi Lawang Sewu.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SAAT mudik Lebaran pada tahun 2018, Irma menuju ke kampungnya lewat exit tol Ngawi. Meski kampung halamannya bukan Ngawi, namun dia sekedar ingin menikmati Kota Ngawi. Setelah menyusuri sejumlah ruas jalan, salah satu daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur itu memiliki tata kota yang tak berbeda dengan daerah-daerah lain, yakni di kanan kiri jalan berdiri toko, rumah, dan restoran yang terkesan padat, bahkan tampak sesak.

Satu dari sekian tempat yang ingin dituju Irma di kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah itu adalah Benteng Van Den Bosch. Melalui *googling*, dia tahu bahwa bangunan peninggalan Belanda itu termasuk salah satu tujuan wisata di Ngawi.

Untuk menuju ke sana, sangat mudah, sebab lokasi benteng tersebut berada di Kelurahan Pelem. Kelurahan ini masih berada di wilayah jantung Kota Ngawi. Begitu memasuki kawasan banteng, kita langsung menjumpai lapangan yang terhampar luas, yang luasnya lebih dari setengah lapangan sepakbola.

Saat berada di sana, dia berjumpa dengan banyak pengunjung yang juga punya tujuan ingin melihat benteng. Meski saat itu masih bulan puasa, namun tak mengendorkan minat masyarakat untuk jalan-jalan seraya menikmati suasana yang ada di sana.

Begitu tiba di lokasi yang dituju, Irma pun segera menuju pintu gerbang benteng. Setelah itu, ia pun berjalan memasuki bagian dalam benteng. Saat berada di dalam, dia mengaku takjub melihat bangunan besar dan

panjang yang memiliki banyak pintu dan jendela. Bentuk bangunan model seperti itu banyak dijumpai di kota-kota di Eropa atau kota-kota tua atau kota lama di Indonesia.

Ketakjuban Irma atas bangunan kuno tersebut sedikit hambar setelah menyaksikan banteng yang dibangun selepas Perang Jawa itu mengalami banyak kerusakan. Selain terdapat bagian bangunan yang runtuh di sana-sini, juga sudah tidak memiliki atap. Akibat kondisi yang dibiarkan tak terawat itu, hingga menghilangkan kesan indah, kokoh, dan banyak bagian yang memiliki nilai seni dan sejarah menjadi hilang. Bahkan, berubah menjadi tempat yang angker dan banyak 'penghuninya'.

Kondisi bangunan banyak yang runtuh,

rusak, dan tak terawat itu menjadi keprihatinan semua pihak. Semua ingin agar benteng itu direnovasi, dipugar, agar tidak terlanjur rusak parah atau hancur. Hal itu penting dilakukan, selain untuk melestarikan nilai bangunannya yang indah dari segi arsitektur, juga agar nilai sejarahnya yang tinggi dalam sejarah bangsa Indonesia tetap terjaga.

Kabar mengenai kondisi Benteng Van Den Bosch itu ternyata sampai di telinga Presiden Joko Widodo. Untuk itu, saat melakukan kunjungan ke Ngawi, Presiden menyempatkan diri melihat banteng tersebut. Pada 1 Februari 2019, dalam kunjungan itu, mantan Walikota Solo itu berkeliling melihat ruang-ruang yang ada di sana. Dari pejabat





setempat, Joko Widodo mendapat penjelasan tentang kondisi Benteng Van Den Bosch yang memprihatinkan, dan memerlukan pemugaran. Setelah mengetahui kondisi bangunan benteng yang sudah parah, Joko Widodo menyetujui adanya usulan pemugaran. "Warisan pusaka seperti ini memang harus dijaga dan dipelihara," ujarnya dalam berbagai berita yang tersebar.

Mantan Gubernur Jakarta ini bisa jadi sudah mendapat laporan dari staf-stafnya sehingga memerintahkan agar pelaksanaan penugasan bangunan bersejarah, didampingi oleh ahli-ahli purbakala yang jago dalam restorasi. Joko Widodo menargetkan renovasi yang dilakukan selesai dalam waktu dua tahun.

Pada 21 Desember 2020, ada juga yang menyebut 10 Desember, dimulailah restorasi, renovasi, dan pemugaran Benteng Van Den Bosch. Dalam budaya.jogjaprovo.go.id disebutkan, pemugaran dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nilai kontrak sebesar Rp 113,7 miliar. Pemugaran menasar 13 bangunan di kompleks benteng.



Dalam jawapos.com, Sabtu, 28 Januari 2023, diungkap, restorasi Benteng Van Den Bosch meliputi 13 bangunan utama. Rinciannya: 7 bangunan inti, 4 bastion (benteng), serta 2 gerbang masuk, di depan dan belakang. Selain pembenahan struktur bangunan, interior, dan eksterior Benteng Pendem juga diperbaiki. Sejumlah fasilitas baru untuk mendukung fungsi bangunan juga ditambahkan. Seperti mekanikal elektrik plumbing dan pedestrian yang mengitari benteng.

Lebih lanjut diungkap, dinding benteng juga dibenahi. Plesteran lama dikupas, lalu diganti baru. Dengan konsep plesteran yang bisa bernapas. Sebab, selama ini kadar garam tinggi dan kelembapan di sekitar benteng membuat struktur dinding rentan rusak. Dengan konsep plesteran bisa bernapas, air di dalam dinding bisa keluar dan air dari luar tidak bisa masuk. Meski demikian tak semua dinding benteng diplester dan dicat ulang. Ada sebagian yang dibiarkan kelihatan batu batanya. Ini sebagai media edukasi kepada masyarakat tentang sejarah struktur bangunan.

Saat Irma berkunjung kembali ke sana,



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

benteng itu sudah mengalami perubahan. Dinding benteng yang dulunya berwarna hitam kecoklatan menjadi putih bersih. Pintu dan jendela yang dulunya tak ada, sekarang menjadi tertutup. Bangunan yang dulunya tak beratap, sekarang sudah beratap. Di sekeliling benteng pun juga dibangun pedestrian atau trotoar tempat pengunjung untuk melihat bangunan dari berbagai sudut.

Berada di tempat itu sekarang seolah-olah berada di Kota Tua Jakarta atau Kota Lama Semarang. Di sinilah Benteng Van Den Bosch menjadi sasaran para *fotografer*, *facebooker*, *youtuber*, dan penggiat media

sosial lainnya. Mereka memburu gambar bangunan itu untuk selanjutnya di-*share* ke berbagai media sosial.

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, dalam *beritajatim.com*, 14 Desember 2022, mengatakan, ada beberapa fakta unik yang luar biasa ditemukan oleh tim selama proses revitalisasi benteng. Pertama, Benteng Van Den Bosch memiliki 510 buah lubang pintu dan jendela, yang mana melebihi Lawang Sewu yang 429 buah lubang pintu dan jendela. Kedua, 70% struktur bangunan asli dengan kedalaman pondasi benteng sedalam 5 meter, sehingga menjadikan benteng ini berdiri kokoh sejak tahun 1845.

Ketiga, total luas lahan kawasan Benteng Pendem, yakni 21,18 hektar atau setara dengan seperempat luas lahan Monas Jakarta.

Ony Anwar dalam *jawapos.com* menegaskan, Benteng Van den Bosch nantinya memiliki tiga fungsi utama. Yakni: edukasi sejarah, destinasi wisata, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. "Akan ada *multiplier effect*. Selain sebagai sarana edukasi, pengembangan sektor wisata, juga diharapkan akan berdampak pada perekonomian warga sekitar," tuturnya dalam laman itu. □

AWG/dari berbagai sumber

Akibat Trauma dari Perang Diponegoro dan Pasukan Inggris

Benteng Van Den Bosch berdiri selepas masa-masa pahit dialami Belanda ketika terjadi Perang Diponegoro dan direbutnya Jawa oleh Inggris. Agar tidak mengulang masa lalu, Belanda selanjutnya membangun benteng dengan ukuran besar, kokoh, dan kuat. Benteng Van Den Bosch dibangun sebagai poyek raksasa ditutup pada tahun 1905.

SEBAGAI daratan yang lokasinya berada di pertemuan Bengawan Solo dan Bengawan Madiun membuat Ngawi dianggap strategis dan penting oleh Pemerintah Kolonialisme Belanda. Sungai besar yang membelah daratan pada masa itu digunakan oleh masyarakat dan para pedagang untuk melakukan aktivitas keseharian.

Dengan perahu kayu, para pedagang mengangkut berbagai hasil bumi, seperti padi, palawija, rempah-rempah, dan hewan ternak ke pasar-pasar yang ada di Ngawi,

Madiun, dan Surakarta. Bengawan tidak hanya sebagai jalur perdagangan masyarakat, namun juga digunakan untuk mengangkut persenjataan dan pasukan saat terjadi Perang Jawa pada tahun 1825-1830.

Sebagai pusat perdagangan dan pelayaran yang strategis membuat Belanda ingin daerah itu dikuasai dan dipertahankan. Untuk itu, selepas Perang Diponegoro atau Perang Jawa, atas inisiatif Menteri Urusan Koloni atau Gubernur Jenderal Hindia-Belanda ke-43, Jenderal Johannes Van Den Bosch, dibangunlah sebuah benteng pertahanan.

Benteng didirikan di daerah yang sekarang bernama Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Inisiatif Van Den Bosch ini juga dipicu pula oleh adanya perintah dari Raja William I agar pemerintah di Hindia-Belanda memulihkan perekonomian sekaligus menjaga stabilitas wilayah Jawa setelah Perang Jawa dan perginya Inggris.

Pada tahun 1839, *groundbreaking* pembangunan dilakukan. Karena atasi inisiatif Van Den Bosch maka selanjutnya benteng itu disebut Benteng Van Den Bosch.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Luas yang dibutuhkan untuk membuat benteng adalah 165 meter x 80 meter. Posisinya di tepi Bengawan. Dalam pembangunan, selain membuat tembok-tembok besar dan ruang-ruang yang dibutuhkan, juga posisi bangunan dibuat lebih rendah dari tanah. Ini dilakukan untuk kamuflase atau tersembunyi sehingga musuh tidak mengetahui benteng tersebut.

Meski dengan posisi lebih rendah dari dataran, namun arsitek-arsitek yang ada mampu merancang saluran air di dalam benteng yang canggih sehingga mampu menghindarkan benteng dari genangan air, bahkan banjir. Posisi yang berada di bawah permukaan tanah itulah yang membuat benteng itu juga disebut dengan Benteng Pendem.

Dalam *telusuri.id*, 27 April 2023,

diceritakan, benteng dirancang dengan parit keliling dan penyeberangan berupa jembatan angkat. Dulu air memenuhi parit benteng. Hal demikian sebagai upaya pertahanan dari serangan artileri musuh. Tanah sisa hasil galian parit tidak dibuang namun digunakan untuk gundukan pelindung tembok benteng. Di sisi kiri dan kanan pintu gerbang, tampak gundukan tanah setinggi bangunan benteng. Gundukan ini menjadi pelindung utama benteng yang berguna untuk meredam daya hantaman peluru musuh.

Fungsi lain dari gundukan tanah terdapat di sekeliling benteng itu dengan maksud untuk melindungi benteng dari luapan air bengawan Solo. Dan, dengan adanya gundukan tanah itu membuat benteng itu bila dilihat dari luar seolah berada di bawah tanah, meski sejatinya tidak seperti itu.

Setelah proses pembangunan selesai, pada tahun 1845, di benteng tersebut ditempatkan sebanyak 310 tentara yang terbagi dalam Kompi Senapan 250 orang dan Kavaleri 60 orang. Sebagai pasukan tempur maka dalam benteng tersebut tersimpan ratusan bedil dan 6 meriam.

Van Den Bosch membangun benteng dengan ukuran besar dengan pasukan yang lengkap, karena dia belajar dari pengalaman sebelumnya. Pengalaman tersebut adalah: *Pertama*, Perang Jawa yang sangat dahsyat dan lama. Perang Jawa atau Perang Diponegoro berkobar tidak hanya di Yogyakarta, Magelang, Purworejo, namun juga terjadi di daerah-daerah Jawa lainnya, termasuk Ngawi. Di *Wikipedia* disebut, perlawanan melawan Belanda di Ngawi dipimpin oleh Adipati Judodiningrat, Raden Tumenggung Surodirjo, dan Wirotani.

Dengan pasukan yang terlatih dan bersenjata lengkap membuat Ngawi jatuh ke tangan Belanda. Takluknya Ngawi dan daerah sekitarnya, seperti Magetan, tidak membuat Pangeran Diponegoro tinggal diam. Bersama dengan salah satu pengikut setianya yang bernama Kiai Haji Muhammad Nursalim, Pangeran Diponegoro melanjutkan perlawanan terhadap Belanda.

Nursalim tidak hanya berusaha merebut Ngawi, namun juga menyebarkan agama Islam. Dirinya menyemangati masyarakat setempat untuk terus berjuang melawan kaum penjajah. Nursalim bukanlah orang sembarangan. Dirinya disebut oleh banyak orang sebagai manusia yang memiliki kekuatan. Dikatakan, ia kebal terhadap peluru dan senjata.

Apa yang dimiliki oleh Nursalim membuat pasukan Belanda kocar-kacir ketika Nursalim dan pejuang lainnya melakukan perlawanan. Karena susah untuk mengalahkan perlawanan Nursalim membuat Belanda mencari siasat dengan tidak mengerahkan pasukan besar-besaran, namun dengan cara menculiknya. Siasat yang dilakukan berhasil dan untuk menghabisi Nursalim, Belanda tidak perlu memberondongnya dengan tembakan, namun dikubur hidup-hidup. Nursalim dikubur hidup-hidup di hutan yang mana hutan tersebut selanjutnya menjadi lokasi dibangunnya benteng, sehingga saat ini di benteng tersebut ada makam Nursalim.



Dari kisah di atas, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengingatkan, Benteng Van Den Bosch merupakan bukti dahsyatnya Pangeran Diponegoro dalam menghadapi penjajah. "Melalui restorasi Benteng Van Den Bosch, sejarah inilah yang ingin disampaikan masyarakat," ujarnya kepada wartawan.

Kedua, Van Den Bosch membangun benteng dengan ukuran , sebab pasukan Belanda merasakan pengalaman pahit di masa-masa sebelumnya. Pada tahun 1811-an, Pasukan Inggris di Jawa dengan mudah menghancurkan benteng-benteng milik VOC. Benteng milik VOC mudah dibobol pasukan Inggris, sebab struktur pertahanannya lemah

sehingga Jawa pun direbut oleh Inggris.

Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pun marah sehingga ia menghancurkan benteng-benteng VOC yang ada di pesisir Jawa. Kondisi yang demikian membuat pertahanan di Jawa semakin lemah. Ketika Van Den Bosch menjadi Menteri Urusan Koloni, dirinya memerintahkan Detasemen Zeni yang dipimpin Kolonel Van Der Wijck membangun benteng pertahanan besar-besaran dengan lokasi di pesisir dan pedalaman Jawa ([telusuri.id](#)).

Dari sinilah di Jawa banyak benteng berdiri dengan bentuk besar, kokoh, dan kuat.

Benteng-benteng karya Van Der Wijck adalah: Benteng Willem I di Ambarawa, Benteng Prins Frederik di Jakarta, Benteng Pangeran Oranye di Semarang, Benteng Pangeran Hendrik di Surabaya, Benteng Jenderal Van den Bosch di Ngawi, dan Benteng Gèneraal Coohius di Gombang, Kebumen.

Meski dibangun dengan biaya tinggi oleh Belanda, namun benteng itu memiliki masa layak huni. Oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1905, Benteng Van Den Bosch ditutup, sebab dianggap tidak layak untuk garnisun tentara. □

AWGI/dari berbagai sumber

Sosok Van Den Bosch, si Keras Kepala

Saat tiba di Jawa, pangkat Van Den Bosch masih letnan. Karier di dunia militer melejit hingga dirinya menjadi mayor jenderal. Sikapnya keras dan kaku. Ide cerdasnya membuat Negeri Belanda sejahtera dan makmur. Saat dirinya menjadi Menteri Urusan Koloni, benteng besar dibangun di Ngawi, tujuannya untuk menjaga dan menguasai jalur perekonomian.

DALAM *Wikipedia* diungkap, Johannes Graaf Van Den Bosch lahir pada 2 Februari 1780 di Herwijnen, Belanda. Herwijnen merupakan kota yang berada di Provinsi Gelderland. Kota ini merupakan bagian pemukiman Lingewaal, dan terletak sekitar 11 km timur Gorinchem.

Van Den Bosch merupakan seorang tentara dan politikus Belanda. Dalam perjalanan hidupnya, banyak jabatan yang diemban. Di Hindia-Belanda dirinya merupakan Gubernur Jenderal ke-43 yang memerintah pada 1830–1834. Di Hindia-Belanda juga pernah menjabat sebagai komandan KNIL pada 1830–1831. Setelah kembali ke Belanda, dirinya menjadi Menteri Urusan Koloni pada 30 Mei 1834–1 Januari 1840, dan Anggota Tweede Kamer 7 November 1842–28 Januari 1844.

Pada tahun 1797 ia tiba di Jawa setelah berminggu-minggu menempuh perjalanan laut dari Belanda ke Batavia. Saat tiba di daerah yang jauh dari Belanda, pangkat tentara yang disandang masih letnan. Karena prestasinya bagus, pangkatnya cepat naik menjadi kolonel. Van Den Bosch adalah seorang yang memiliki prinsip keras. Buktinya, pada tahun 1810 dia dipulangkan ke Belanda karena berbeda pendapat dengan Gubernur Jenderal Herman Willem



Johannes Graaf Van Den Bosch

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Daendels.

Di negerinya sendiri, Van Den Bosch tidak tinggal diam. Pada November 1813, ia beragitasi untuk kembalinya Wangsa Oranje. Wangsa ini merupakan cabang dari Wangsa Nassau yang memainkan peran penting dalam politik dan pemerintahan Belanda. Hal ini terjadi pada saat masa kekuasaan Willem

I dari Oranye yang mencanangkan revolusi melawan penguasa Spanyol yang mana setelah perang tigapuluh tahun membawa Belanda menjadi republik independen.

Pada masa itu, Van Den Bosch diangkat menjadi Panglima Maastricht. Di sini kariernya melejit hingga menjadi mayor jenderal. Di luar militer, dirinya banyak



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

menceritakan kepada masyarakat Belanda tentang wilayah koloni yang mengalami kemiskinan akut. Kepedulian terhadap daerah koloni itulah yang membuat pemerintah Belanda pada tahun 1827 mengangkat ia menjadi jenderal komisar dan ditugaskan kembali ke Batavia. Prestasinya di Batavia sangat bagus sehingga Van Den Bosch dipercaya sebagai gubernur jenderal sekaligus Komandan KNIL.

Setelah jabatan sebagai gubernur jenderal tidak diperpanjang, Van Den Bosch

kembali ke Belanda. Di kampung halamannya ia tidak nganggur, namun diangkat menjadi Menteri Urusan Koloni. Saat memangku jabatan Menteri Urusan Koloni, program tanam paksa, *cultuurstelsel*, merupakan kebijakannya yang sangat fenomenal. *Cultuurstelsel* kebijakan yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya teh, kopi, dan kakao. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan,

dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.

Diberitakan, tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia-Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC, karena ada target penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditas tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonial liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940.

Bagi rakyat tanam paksa adalah derita, namun bagi Pemerintah Belanda adalah suatu keuntungan besar. Dari kebijakan Van Den Bosch tersebut Belanda bisa makmur dan sejahtera. Hal demikian membuat Van den Bosch dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda, pada 25 Desember 1839.

Saat dirinya menjadi Menteri Urusan Koloni pula di Ngawi dibangunlah benteng yang selanjutnya disebut Benteng Van Den Bosch. □

AWG/dari berbagai sumber

Biar Van Den Bosch Tambah Cantik

Agar pengunjung lebih menikmati suasana Benteng Van Den Bosch, Khofifah mengusulkan, ada fasilitas tambahan di Kawasan itu. Penambahan fasilitas wisata diyakini akan menambah banyak wisatawan datang ke Ngawi. Bekerja sama dengan tim dari Belanda.

AGAR lebih menarik masyarakat untuk berkunjung ke Benteng Van Den Bosch yang berada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa mengusulkan sejumlah penambahan fasilitas wisata guna memperkuat daya tarik wisata masyarakat ke benteng.

Dalam *kominfo.jatimprov.go.id*, 4 Agustus 2022, Khofifah mengatakan, penambahan fasilitas wisata itu di antaranya dengan penambahan wahana wisata air. Alasan demikian sangat mungkin, sebab di belakang



Khofifah Indarparawansa

benteng terdapat aliran sungai bahkan dulu merupakan Pelabuhan Tempuran (bertemunya Bengawan Solo dan Bengawan Madiun, *red*). Juga perlu ditambah dengan ruang untuk mengenal lebih utuh Benteng Van Den Bosch melalui artificial intelligence sehingga nuansa wisata edukasinya juga kuat.

Paparan di atas disampaikan saat gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu meninjau progres pemugaran cagar budaya pada Rabu (4/8/2022). Usulan Khofifah itu akan didiskusikan secara langsung bersama tim ahli dari Belanda yang saat itu tengah menyiapkan wisata air Sungai Wlingi.

“Saat ini, tim dari Belanda sedang mendukung wisata air sungai Wlingi di Pasuruan. Kemudian ditambahkan di belakang Grahadi anak sungai Kalimas dan sudah disetujui untuk dipercantik juga. Maka saya menyampaikan insya Allah saya usulkan untuk ditambahkan membuat wisata air di belakang benteng ini. Semoga tim Belanda tidak keberatan, karena ini bagian *heritage* yang memiliki nilai sejarah berkaitan dengan Belanda”, ujarnya seperti yang tertulis di web milik pemerintah Jawa Timur itu.

Lebih lanjut, dalam web itu dikatakan, dukungan wisata air di Van Den Bosch akan membuat benteng ini lebih indah dan semakin potensial sebagai tempat wisata. Selain itu, konektivitas destinasi wisata satu dengan destinasi wisata berikutnya semakin terintegrasi. “Orang akan menikmati Kabupaten Ngawi dengan dengan keunggulan komparatif maupun kompetitif”,



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tamnbahnya.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengusulkan kepada Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, apabila benteng sudah selesai direnovasi segera menyiapkan *guide* bagi pengunjung yang masuk ke dalam benteng, mengingat sejarah benteng ini cukup panjang dan menarik untuk diketahui.

Ini penting, sebab setiap pengunjung perlu mengetahui secara detail *spot-spot* yang ada di dalam bangunan tersebut. Sebab, wisata di benteng ini tidak sekadar menjadi tempat rekreasi, melainkan juga untuk mengeksplorasi nilai historis dan sisi edukatif. “Mulai sekarang bisa dicicil apa saja yang bisa dijelaskan terkait benteng ini. Kontennya disiapkan. Saya langsung membahas dengan tim budpar, perpustakaan, dan kominfo apa yang bisa di-support Pemprov, khususnya terkait *digital library* dengan *artificial intel-*

ligence,” ujarnya.

Dalam kunjungan itu, Khofifah menyampaikan kepada bupati agar bisa dibuat hotel, berbagai pertemuan, ekspo UMKM, peragaan busana, dan sebagainya sehingga benteng memiliki keindahan yang sangat mempesona. Bisa multi fungsi.

Dikatakannya, kawasan Benteng Van Den Bosch merupakan cagar budaya, penataannya harus dilakukan secara hati-hati agar nilai historikal dan kulturalnya tetap terjaga. Menurutnya, rehabilitasi bangunan peninggalan Belanda itu dapat menjadi daya tarik wisata baru. Baik wisatawan domestik maupun mancanegara. “Kawasan benteng itu dapat menjadi wisata edukasi sejarah dan cagar budaya yang dilengkapi papan informasi di setiap sudutnya,” ujarnya seperti yang termuat dalam kominfo.jatimprov.go.id. □

AWGI dari berbagai sumber



Aldy M. Fanggih

Ketua BEM Universitas Pelita Harapan

Generasi Milenials Perlu Memahami Makna Bela Negara



SETIAP warga negara Indonesia pasti memiliki kewajiban dan keinginan untuk melakukan bela negara. Sebagai generasi milenials, saya dan seluruh generasi muda di tanah air ini juga merasakan itu.

Bila negara membutuhkan untuk maju membela negara jika dalam keadaan negara diserang, pasti generasi muda siap, pantang mundur. Namun, di era modernisasi sekarang ini perang bukan lagi secara frontal, tapi meluas menjadi perang ekonomi, budaya dan sosial. Inilah perang sesungguhnya yang mampu menghancurkan negara.

Sebagai mahasiswa, kami sadar betul akan hal itu. Untuk itulah, selain tekun menimba berbagai ilmu pengetahuan dan teknomogi, kami juga berupaya mempertebal jati diri dan kebanggaan kami sebagai anak bangsa Indonesia, dengan berbagai cara.

Salah satunya dengan menyelenggarakan acara-acara diskusi atau sosialisasi tentang pentingnya bela negara, dengan metode yang kekinian sehingga bisa dipahami kaum milenials. Kami rasa banyak juga mahasiswa yang melakukan itu dan hal itu harus didukung semua pihak, seperti yang dilakukan Pimpinan MPR, Pak Yandri Susanto, yang mendukung acara "Pembebas UPH" tentang Bela Negara di kampus kami. □

DER

Indriyani Kulupani

Kepala Desa Dunu, Gorontalo

Perhatikan Potensi Wisata di Pelosok Desa

WALAU PUN desa kami yakni Desa Dunu di Kecamatan Monano, Gorontalo Utara, terbilang sangat terpencil, tapi desa kami memiliki potensi wisata laut dan pantai yang sangat kaya. Tapi, karena promosinya tidak besar, banyak wisatawan domestik dan mancanegara yang belum mengetahui.

Untuk itulah para pemuda desa kami bergerak, tidak hanya mengandalkan kekayaan alami pantai dan lautnya saja, mereka juga melakukan berbagai inovasi dan kreativitas untuk mencari bentuk wisata baru guna disandingkan dengan wisata laut dan pantai, yakni Paralayang dari tebing dan wisata camping atau glamping

Paralayang dan berkemah semuanya dikelola dan dijalankan oleh pemuda desa kami. Namun, kami dibatasi oleh infrastruktur dan fasilitas yang terbatas. Kami berharap, pemerintah daerah dan pusat bisa mendukung dalam bentuk pelatihan dan promosi untuk meningkatkan potensi wisata kami. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Zulkifli: si Pahlawan Air Hujan

Penggagas Gerakan Menabung dan *Memanen Air Hujan*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SEBAGAI anggota ASN di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, secara ekonomi kehidupan Zulkifli alias Ipin relatif mapan. Gaji dan tunjangan yang didapat oleh pria 47 tahun ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi itu tidak membuatnya tenang. Pasalnya, pada musim kemarau, masyarakat di sekitar tempat tinggalnya mengalami kesulitan air bersih, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Puncaknya terjadi pada 2015, saat ketersediaan sumber air baku benar-benar tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan masyarakat. Sementara kiriman air dari PDAM terbilang sangat sedikit, hanya satu

kali dalam seminggu, dan itu jauh dari kata mencukupi. Sehingga masyarakatpun semakin gusar, terlebih bagi warga yang hidupnya kekurangan, tidak memiliki kemampuan membeli air, sebagaimana warga lainnya. Akibatnya, mereka dipaksa menerima kenyataan, mengonsumsi air kualitas rendah, bahkan air payau.

Menyadari kondisi tersebut, Zulkifli pun menggagas Gerakan Menabung dan Memanen Air Hujan Kecamatan Kota Ternate Utara (Gemma Camtara). Gerakan ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2015 di Kelurahan Tobelevu, Kota Ternate Utara. Gemma Camtara adalah program inovasi yang digagas oleh

Zulkifli. Gerakan ini bertujuan untuk mengajak semua pihak agar bersama-sama melakukan konservasi air tanah.

Pada tahap pertama, Zulkifli membuat sumur di kantor Kecamatan Kota Ternate Utara, juga 14 kantor kelurahan sekecamatan Kota Ternate Utara dan beberapa rumah warga kurang mampu. Sumur itu digunakan untuk menampung air hujan, sehingga bisa digunakan saat dibutuhkan sekaligus sebagai sumur resapan.

“Sumur itu berguna untuk menahan air hujan agar tidak langsung terbuang ke laut. Kami menampungnya untuk memenuhi kebutuhan air dalam jangka pendek, juga





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

berguna untuk memperbesar resapan, sekaligus menahan resapan air laut ke daratan,” kata Zulkifli.

Agar air hujan yang hendak ditampung ke dalam sumur memiliki kualitas yang baik, Zulkifli menambahkan reactor pembersih berupa saringan air. Tujuannya adalah memisahkan air dari debu yang sempat menempel di genteng dan saluran air lainnya, selama musim kemarau.

Cara ini ternyata memberi dampak cukup signifikan. Secara perlahan, kebutuhan air masyarakat mulai terpenuhi. Pada saat yang sama, ketergantungan terhadap kiriman air dari PDAM bisa diminimalisir. Akibatnya, banyak anggota masyarakat yang terinspirasi dan ikut membuat sumur secara swadaya.

Sadar bahwa upayanya mulai memberikan hasil, Zulkifli pun menambah usahanya dengan membuat banyak sumur resapan biopori di 14 kelurahan se-kecamatan Ternate Utara. Gerakan ini dilakukan untuk memperbanyak kandungan air dalam tanah, dan bisa dimanfaatkan saat musim kemarau.

“Seiring berjalannya waktu, dengan

memanfaatkan dana CSR, kita bikin reactor yang mampu mengolah air hujan menjadi air siap konsumsi. Dan, itu usaha ini mampu memberi kepercayaan masyarakat, bahwa kita bisa mengupayakan sendiri kebutuhan air, dengan cara bersahabat dengan alam,” kata Zulkifli lagi.

Berkat usaha dan kerja keras Zulkifli, saat ini kesulitan air yang pernah dirasakan masyarakat kecamatan Kota Ternate Utara sudah tidak ada lagi. Sepanjang tahun, masyarakat bisa memperoleh kebutuhan airnya dengan mudah. Mereka juga bisa mengonsumsi air yang lebih baik, bukan air payau seperti yang dulu pernah mereka rasakan.

Pahlawan Air Hujan

Berkat keberhasilan tersebut, teknologi pemanfaatan air hujan yang diterapkan oleh Zulkifli banyak ditiru oleh masyarakat, termasuk masyarakat di luar Kota Ternate Utara. Dan, karena Gerakan yang dilakukannya, Zulkifli dikenal sebagai Pahlawan Air Hujan. Ia banyak mendapat simpati atas keberhasilannya

mengembangkan Gemma Camtara. Bukan hanya dari masyarakat, tetapi juga dari pemerintah pusat.

Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Zulkifli mendapat anugerah penghargaan Kalpataru, sebagai pejuang lingkungan hidup tahun 2022. Penyerahan penghargaan Kalpataru kepada Zulkifli disampaikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong, di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Rabu (20 Juli 2022).

Penghargaan Kalpataru diberikan kepada mereka yang terbukti memiliki kepedulian, komitmen, prakarsa, inovasi, motivasi, dan kreativitas secara berkelanjutan, sehingga berdampak positif terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, seperti yang dilakukan Zulkifli sejak 2015.

Zulkifli sendiri sempat menolak saat tahu dirinya hendak diusulkan menjadi calon penerima Penghargaan Kalpataru Tahun 2022 oleh DLH Provinsi Maluku Utara. Saat itu, ia merasa dirinya kurang layak karena pada saat yang sama di Maluku Utara terdapat banyak pegiat dan penggiat lingkungan hidup. Lagi pula, dia merasa penghargaan dari negara melalui ajang Kalpataru bukanlah tujuan yang ingin dicapainya. Tetapi untuk menambah motivasi dan memperteguh komitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan pengabdianya selama ini.

“Ini bukan penghargaan untuk saya pribadi, tetapi buat semua orang yang telah membantu mengentaskan kebutuhan air. Karena berkat bantuan mereka sehingga masalah kebutuhan air bisa teratasi. Semoga, Gerakan Menabung dan Memanen Air Hujan Kecamatan Kota Ternate Utara bisa menginspirasi daerah lain yang juga merasakan kesulitan air,” pungkasnya. □

MBO

Strategi Beretika dalam Kampanye

Sudah jamak terjadi, dalam pemilu, suara rakyat jadi rebutan oleh partai politik, peserta pemilu. Karena satu orang, misalnya, akan dipengaruhi oleh puluhan partai politik maka di sinilah kemungkinan terjadinya senggolan antarpeserta pemilu, yang ujung-ujungnya bisa saja terjadi pelanggaran hukum. Maka, di situlah perlunya aturan yang di dalamnya mengatur etika dalam berkampanye. Nah, apakah perlu adanya etika dalam berkampanye? Berikut pendapat politisi dari berbagai partai.

Masinton Pasaribu, Anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan

Perubahan Masyarakat Sangat Cepat

PASTI setiap partai mempunyai strategi masing-masing untuk bagaimana meraih suara, berebut pemilih yang jumlahnya kurang lebih 204 jutaan. Kalau kita lihat dari 204 juta lebih kurang dari DPT yang ada, populasi terbesarnya ada di pemilih muda, usia 40 tahun ke bawah, yang jumlahnya 110 juta. Artinya, pertarungan ke depan adalah ditentukan oleh anak-anak muda.

Tentu setiap partai mempunyai strategi bagaimana mendekati pemilih pemula. Tentu ini tantangan zaman di mana hari ini perkembangan dunia dan juga kehidupan masyarakat berubah sangat cepat, arus informasi menjadi sangat cepat. Bayangkan, peristiwa yang terjadi hari ini, seketika itu juga peristiwa itu bisa diketahui di bagian dunia lainnya.

Kita harus adaptif dengan itu dan alhamdulillah PDI Perjuangan secara manajemen keorganisasian membenahi terus-menerus, karena berpartai ini kan bukan hanya ramai menjelang pemilu tapi berpartai itu ya *day to day* adalah aktivitas politik.

Bagi kami, persiapan menuju 2024 dengan berbagai strategi. Bagaimana memetakan di setiap daerah pemilihan, masing-masing calon legislatif itu harus menyatu. Di kami adadikenal yang namanya struktur partai, ada yang disebut kader, simpatisan, komunitas, yang menjadi bagian dari dinamika pergerakan partai di masyarakat.

Tentu tantangan dengan berbagai macam problem, dinamika organisasi, dinamika di



FOTO-FOTO: ISTEMEWA

lapangan merebut suara masyarakat juga begitu. Kita lihat bisa seketika masyarakat beralih karena *floating mass* juga sangat besar maka perebutan di *floating mass* yang cair ini yang belum menentukan pilihan boleh jadi bagian dari strategi-strategi partai untuk melakukan pendekatan-pendekatan ke sana.

Secara umum dengan mengacu pada DPT,

berkisar 204 juta lebih kurang, tentu ini adalah target perburuan oleh masing-masing partai politik untuk bisa merebut suara hati masyarakat yang 60%-nya adalah para pemilih muda di usia 40 tahun ke bawah, tentu ini adalah bagian dari ceruk yang harus digarap oleh seluruh partai politik. □

AWG

Luluk Nur Hamidah, Anggota MPR Fraksi PKB

Masyarakat Tidak Bisa Didikte

MENJELANG pemilu kita bisa saling tengok jendela tetangga masing-masing dan bagi rakyat sebagai momentum untuk mengenal lebih baik, serta ruang untuk menilai tentang partai-partai yang akan berkontestasi di Pemilu 2024.

Perlu kita apresiasi dan patut syukuri bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia makin hari makin matang. Di usia reformasi yang kesekian puluh tahun terakhir ini, kita lihat ada keterbukaan politik yang jauh lebih bermakna. Kemudian juga proses demokratisasi yang semakin menunjukkan pematangan.

Walaupun di sana-sini ada catatan, mungkin karena partai politik yang baru ikut kontestasi, secara normatif tidak ada hambatan, secara konstitusional bagi lahirnya partai-partai politik itu baik. Tinggal apakah mereka menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi peraturan-peraturan itu.

Masyarakat saat ini selernya tidak bisa didikte. Menyikapi hal ini merupakan sesuatu yang menarik dan tetap positif bagi pendewasaan, serta sekaligus pematangan demokrasi kita. Pasti ada kelompok di dalam masyarakat yang tidak sepenuhnya bisa dipuaskan aspirasinya dari kehadiran partai-partai yang ada.

Partai juga tidak mungkin bisa menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang tersebar di Indonesia. Penduduk Indonesia ada 273 juta dan hak pilih yang ikut pemilu juga sangat besar, meskipun partisipasi di pemilu bagus



FOTO-FOTO: ISTMENWA

tapi kan tidak pada angka 100%, sehingga membuka ruang kemungkinan bagi partai-partai baru untuk memperebutkan suara-suara yang sebelumnya, misalkan belum menentukan pilihannya atau kemudian juga *swing voter* yang sampai hari ini — kalau berdasarkan *up date* dari berbagai lembaga survei — masih relatif cukup tinggi.

Ini juga ditengarai dari munculnya kelompok baru, misalnya pemilih milenial yang waktu pemilu terakhir mereka masih umur 15-14 tahun. Di pemilu tahun ini mereka sudah umur 17 tahun, 18 tahun, dan mereka benar-benar akan mengikuti situasi ini berdasarkan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, bagaimana *peergroup* itu berjalan dan bagaimana media sosial itu juga bisa mempengaruhi mereka dan ini saya kira

akan menjadi tantangan bagi semua pihak baik itu partai yang baru ataupun juga partai-partai yang lama.

PKB sendiri partai yang lahir dan tumbuh seiring dengan semangat reformasi. Sejak pertama lahir sudah langsung melejit di posisi ketiga secara berturut-turut dalam dua kali pemilu, tahun 1999 dan 2004, namun pada 2009 mengalami *declining* sedikit karena memang konflik di internal. Meski demikian, sesuai dengan namanya, PKB, kita boleh jatuh sedikit tetapi seketika itu pula kita harus bangun dan kemudian bangkit dan itu bisa dibuktikan dengan pemilu tahun 2014 dan 2019. Bukan hanya sekedar eksis, tetapi benar-benar menunjukkan kinerja dan perform partai yang sangat bagus. □

AWG

Delegasi BEM Muhammadiyah

HNW: Generasi Milenial Berperan Strategis untuk Peningkatan Kualitas Demokrasi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., atau HNW mengungkapkan pentingnya seluruh anak bangsa berkontribusi menjaga dan melanjutkan demokrasi, karena ternyata selain ada peluangnya, tapi juga besar tantangannya. Hal ini perlu diperhatikan generasi muda bangsa, sebab jika demokrasi tidak dikelola dengan baik maka demokrasi yang diharapkan akan membuat negara aman dan maju, dengan rakyatnya yang makmur dan sejahtera akan sulit terwujud. Tapi, jika dikelola dengan baik maka yang diharapkan rakyat akan terwujud.

Hal ini, sebagaimana terjadi di beberapa negara Timur Tengah, dengan terjadinya *The Arab Spring*. Peristiwa politik yang memberikan efek domino terhadap stabilitas perpolitikan di Timur Tengah yang awalnya memberikan harapan, tapi dalam perjalanannya malah menunjukkan iklim demokrasi yang tidak membaik. Bahkan, demokrasi yang dibangun malah hancur atau dihancurkan.

“Demokrasi di Indonesia, Alhamdulillah masih terjaga, sekalipun dengan berbagai catatan kritisnya. Seperti, soal kualitas demokrasi kita yang tidak hanya harus dijaga, tapi mesti dikoreksi dan ditingkatkan, agar tidak hanya prosedural yang bisa menimbulkan apatisisme atau ketidakpercayaan rakyat terhadap demokrasi, yang akhirnya bisa membuat mereka bisa tergiur dengan propaganda

terkait radikalisme maupun intoleransi,” ujar HNW.

“Di sinilah peran konstruktif dan kontributif generasi muda pelajar dan mahasiswa, termasuk dari kalangan Muhammadiyah, menjadi sangat dipentingkan dan strategis,” tambahnya, saat menerima kunjungan dan berdialog dengan Delegasi Pimpinan BEM Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan BEM Muhammadiyah se-Jawa Timur dan Bali, yang hadir di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2023). Selain silaturahmi dan berdialog. Delegasi mahasiswa ini juga mengundang HNW menjadi narasumber dalam Silatnas yang akan digelar di Surabaya, pada akhir Juli 2023.

Lebih kongkret lagi, Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa peran dan kiprah strategis itu, misalnya terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebab, mayoritas pemilih pada Pemilu 2024 akan didominasi dari generasi muda dari kelompok generasi Z sekitar 22,85% dan generasi milenial sekitar 33,60%.

“Dengan menjadi mayoritas pemilih dengan jumlah melampaui 55% itu, tentu posisi mereka akan sangat strategis dan sangat menentukan. Maka, akan sangat disayangkan jika generasi muda bangsa, termasuk yang beragama Islam, tidak memaksimalkan kedaulatan,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

hak dan peluang yang mereka miliki dengan bersikap negatif, menjauhkan diri, tidak berperan dalam penyelenggaraan pesta

demokrasi rakyat lima tahunan nanti, apalagi bila mereka sampai termakan isu yang menyesatkan soal relasi antara agama (Is-

lam) dan negara,” tegas HNW.

Menurut HNW, hal itulah yang harus diingat para pemuda Indonesia, termasuk dari kalangan aktifis mahasiswa, termasuk BEM di lingkungan Muhammadiyah. Jika, generasi muda, termasuk yang Muslim, tidak memiliki kepedulian dengan demokrasi maka Indonesia akan dipimpin oleh pihak yang juga tidak memperdulikan kualitas demokrasi.

“Khusus buat kalian generasi muda Islam, jika kalian tidak memperdulikan demokrasi Islam atau politik Islam. Maka jangan disalahkan ketika Indonesia nanti dipimpin oleh mereka yang memenangkan kontestasi demokrasi, tapi tidak peduli dengan Islam dan masa depan generasi muda dari kalangan umat Islam,” tambahnya.

Ditegaskan HNW, banyak sekali jalan atau cara mencerahkan yang bisa dilakukan para generasi muda untuk berkontribusi agar warga peduli dengan demokrasi Indonesia



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Jakarta, Senin (17/7/2023).

Fadel Muhammad menyebutkan, bidang Studi Administrasi Publik merupakan salah satu bidang yang ditekuninya. Walaupun Fadel lebih dikenal sebagai seorang insinyur lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB). Bahkan, Fadel mendirikan pabrik Bukaka Teknik Utama yang telah berkembang, dari semula hanya puluhan karyawan hingga ribuan karyawan, dan menjadi perusahaan terbuka.

Ternyata, Fadel mulai menekuni bidang studi Administrasi Publik ketika masih menjabat Gubernur Gorontalo. “Ketika saya menjadi Gubernur Gorontalo, saya mengambil Program Doktor Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada. Sekarang, saya adalah Guru Besar Bidang Administrasi Publik

di Universitas Brawijaya,” tutur Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD ini.

Administrasi publik, lanjut Fadel Muhammad, merupakan salah satu ilmu yang terus berkembang. Pada waktu lalu, di Universitas Gadjah Mada dikenal dengan OPA (Old Public Administration), kemudian berkembang dengan munculnya New Public Management (NPM). NPM terus berkembang, ada yang mengembangkan menjadi New Public Administration, ada yang mengembangkan menjadi New Public Service.

“Saya sendiri mengembangkan pemikiran *entrepreneur government*, yaitu pemerintahan yang berorientasi pada jiwa dan spirit entrepreneur. Pemikiran ini telah mewarnai buku-buku saya, dan sampai

sekarang saya mengajar di mana-mana mengenai *entrepreneur government*,” ujar Senator dari Provinsi Gorontalo ini.

Fadel berpendapat, jiwa dan spirit kewirausahaan sangat penting untuk melekat dalam pemerintahan, baik di pusat, terutama pemerintahan daerah. “Karena itu saya terus mengembangkan pemikiran ini dan banyak menulis buku tentang *entrepreneur government*. Satu buku yang populer dan dipakai pemerintah daerah, adalah *Re-inventing Local Government*, atau mendaur ulang pemerintah daerah,” imbuhnya.

Fadel Muhammad kemudian menerapkan public administration dengan new public management yang berorientasi pada jiwa dan spirit entrepreneur ketika menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. “Saya berhasil menaikkan produksi ikan yang sangat tinggi. Ketika itu tercatat kenaikan produksi ikan sekitar 300% yang merupakan rekor di kementerian KKP. Jadi, bidang studi public administration atau administrasi publik memang sangat penting untuk ditekuni,” tuturnya.

Di hadapan mahasiswa Unbita, Fadel Muhammad juga menjelaskan panjang lebar tentang tugas dan kewenangan MPR, keanggotaan MPR, dan tugas MPR menyosialisasikan Empat Pilar MPR (Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara). □



Lomba Foto Jurnalistik dan Stand Up Comedy Kritik MPR

Kegiatan MPR Menyambut HUT MPR RI Tahun 2023



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, menyambut HUT MPR RI Tahun 2023, MPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) menyelenggarakan berbagai kegiatan. Antara lain, Lomba Karya Foto Jurnalistik dan Stand Up Comedy Kritik MPR. Tema besar kegiatan ini adalah seputar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tentang Semangat Bergotong Royong Membangun Indonesia Pasca Pandemi Covid-19, Peran Pemuda dalam Merajut dan Kerekatkan Keragaman Nasional serta Memaknai Nilai-Nilai Kemerdekaan dan Kepahlawanan di Era Masa Kini.

“Kita juga menggagas Turnamen Catur Antar Wartawan se-Indonesia memperebutkan Piala Bergilir Ketua MPR RI. Pesertanya tidak hanya dari para wartawan yang bertugas di MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, melainkan turut melibatkan para wartawan yang bertugas di berbagai penempatan, seperti di Istana Negara, Kementerian/Lembaga, hingga di pemerintahan Provinsi, serta Kabupaten/Kota. Sehingga bisa merajut ikatan soliditas, solidaritas, dan kebersamaan dari sesama profesi wartawan,” ujar Bamsuet usai menerima pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), di Jakarta, Senin (17/7/23).



Pengurus KWP yang hadir, antara lain: Ketua Ariawan, Sekjen Johan O. Tallo, Bendahara Kiswondari, Wakil Ketua Bidang Eksternal Rafyq Panjaitan, Wakil Ketua Bidang Internal Syafril Amir, Wakil Ketua Bidang Olahraga Farid Kusuma, serta Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keanggotaan Erwin Syahputra Siregar.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, event lainnya adalah Stand Up Comedy Kritik MPR, yang tahun ini memasuki tahun kedua. Di tahun pertama penyelenggaraan pada Maret 2022, Juara 1 diraih Citra Sari, Juara 2 Rizky Shandi, Juara 3 Muklis Milu, serta Juara Favorit diraih Intan Latut Tuti.

Sebelumnya, pada saat menjadi Ketua DPR RI, Bamsuet juga telah membuat dua kali event Stand Up Comedy Kritik DPR RI. Pertama, di tahun 2018, Juara I diraih Aji, Juara II Marshal Widiyanto, serta Juara III Kiki Saputri. Kedua, di tahun 2019, Juara I diraih Yudha Ilham, Juara II M. Al Japri, Juara III Oby, serta juara favorit Ical Kate. Para alumni Stand Up Comedy Kritik DPR maupun Stand Up Comedy Kritik MPR, kini telah banyak yang sukses meniti karir sebagai komika.

“Stand Up Comedy merupakan cara kreatif saya dalam memimpin DPR RI dan MPR RI untuk menyerap aspirasi. Sekaligus menangkap, mencerna, mengelola, dan merespon berbagai realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Di samping memberikan kesempatan kepada para komika untuk mengasah dan menunjukkan kemampuannya dalam membawakan materi, sehingga bisa menjadi batu loncatan bagi mereka untuk menapaki profesi sebagai komika,” jelas Bamsuet.

Mantan Pemimpin Redaksi Harian Suara Karya dan Pemimpin Redaksi Majalah Ekonomi Info Bisnis ini juga mendukung rencana pengurus KWP meluncurkan buku ‘Catatan Jurnalis Parlemen’ yang ditulis oleh para wartawan yang bertugas meliput di MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Sebagai seorang wartawan yang kini mendapatkan kepercayaan sebagai Ketua MPR RI, Bamsuet turut diminta oleh pengurus KWP

untuk membuat tulisan cerita di balik berita seputar pengalamannya sebagai Ketua Komisi III DPR yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan, Ketua DPR RI dan Ketua MPR RI dalam buku tersebut.

“Selain sebagai catatan perjalanan memimpin MPR RI selama hampir empat tahun, serta sebelumnya sebagai Ketua DPR RI dan juga sebagai Ketua Komisi III DPR RI, tulisan saya dalam buku tersebut juga untuk

berbagai ilmu dan pengetahuan seputar pengembangan diri di dunia jurnalistik. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan yang saat ini berprofesi sebagai wartawan,” pungkas Bamsuet. □

Nobar Pagelaran Wayang Kulit ‘Bimo Bangkit.’

HNW: Bangkit untuk Menghadirkan Cita-Cita Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEJAK pukul 19.00 WIB, 15 Juli 2023, Lapangan Balaikota Jakarta Timur, Jakarta, sudah dipenuhi oleh masyarakat. Kehadiran mereka di sana untuk bermalam minggu dengan nonton bareng (nobar) pentas seni pagelaran wayang kulit.

Pagelaran wayang untuk memperingati Milad II Komunitas Wayang Nusantara, juga Hari Ulang Tahun ke-496 Jakarta itu diprakarsai oleh pimpinan KWN (Komunitas Wayang Nusantara), mengambil lakon ‘Bimo Bangkit’ dengan dalang milenial: Totok Asmoro dkk.

Pagelaran wayang kulit malam itu dihadiri Wakil Ketua MPR Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., (HNW), budayawan dan seniman Erros Djarot, pimpinan PEPADI Jakarta, Komunitas Wayang Nusantara (KWN), dan Keturunan Jawa Tulen (Kejawen) dll.

HNW dalam sambutannya memaparkan bahwa sejak kecil, di kampung halamannya di Klaten, Jawa Tengah, dia oleh

orangtuanya, sudah dibiasakan nonton wayang. “Sampai malam hingga menikmati Goro-Goro di mana para punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong menghibur para penonton”, ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

“Karena kami tumbuh kembang dalam apresiasi terhadap budaya adiluhung bangsa, seperti wayang, hingga kami hafal berbagai kisah yang ada dalam Kitab Mahabarata dan Ramayana,” imbuh alumni Pondok Pesantren Gontor kelahiran Prambanan Klaten itu.

HNW menyampaikan apresiasi dan selamat kepada KWN dan Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) yang terus bersemangat dan berjuang untuk melanjutkan dan melestarikan wayang, budaya bangsa yang adiluhung, mengharumkan nama Indonesia hingga diakui oleh UNESCO sbg warisan budaya dunia.

HNW juga mengapresiasi bahwa

sekalipun di tengah arus globalisasi, bangsa Indonesia masih berkomitmen menjaga dan melestarikan wayang kulit sebagai budaya unggulan. Buktinya, hadirnya dalang-dalang dari generasi milenial, dan banyaknya anak-anak yang ikut menyaksikan pagelaran wayang kulit, selain Pemerintah yang menetapkan adanya Hari Wayang nasional tanggal 6 November. “Ini semua patut didukung, apalagi banyaknya anak muda generasi milenial yang bukan hanya menggemari, tapi bahkan menjadi dalang dalam pertunjukan wayang kulit. Generasi muda ternyata tidak putus dengan budaya bangsanya. Alhamdulillah,” tambahnya.

Apalagi, sebut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, pagelaran wayang kulit malam itu adalah sebagai bukti untuk menegaskan kembali komitmen mewujudkan cita-cita Presiden Soekarno dengan gotong-royongnya, agar menjadi inspirasi dan berkontribusi menghadirkan Indonesia jaya



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

raya, makmur, berdaulat, dan bermartabat.

Cita-cita tersebut bisa tercapai, tambah HNW, karena kita mempunyai pegangan yang kokoh dan kuat, yaitu kecintaan pada kebudayaan bangsa seperti wayang. "Warisan budaya bangsa yang diakui oleh UNESCO ini penuh ajaran positif kehidupan untuk hadirkan keutamaan,"katanya.

Lakon Bimo Bangkit menurut alumni Universitas Madinah Arab Saudi itu disebut

sangat mengena dengan kondisi saat ini. "Lakon Bimo Bangkit itu menginspirasi dan mengajak kepada kita semua untuk berkontribusi dan berkolaborasi bangkit dari dampak2 covid, maupun dari kondisi lainnya untuk segera bisa menghadirkan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa dan negara" tuturnya.

Di tahun politik seperti sekarang ini, pesan dan spirit dari lakon Bimo Bangkit diharap

terus diperkuat, disosialisasikan, serta disebarluaskan bahkan dijadikan pegangan bagi para pemimpin bangsa, politisi, termasuk rakyat.

HNW berharap acara malam itu dapat diresapi oleh rakyat Indonesia seluruhnya, sehingga mereka ikut berperan serta membangkitkan Indonesia. "Dengan pagelaran wayang saat bangsa menyongsong Pemilu, diharapkan juga mampu menghadirkan dan menguatkan situasi dan laku politik yang berkebudayaan, agar hadir juga hasil Pemilu yang berbudaya luhur"harapnya.

Disampaikan oleh HNW kepada para penggemar wayang kulit bahwa MPR dalam Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, juga mempergunakan berbagai metode, salah satunya melalui budaya seperti pagelaran wayang. "Metode seperti ini akan saya usulkan agar kembali dapat dilakukan", tegasnya. "Sehingga bisa menguatkan kesatupaduan warga bangsa, menjalankan kehidupan bernegara dengan mengapresiasi dan melestarikan budaya bangsa"pungkasnya. □

Terima Pengurus DPP Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat

Bamsoet Ajak Sukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPi Bambang Soesatyo mengingatkan, di masa lalu Indonesia menjadi rebutan bangsa-bangsa besar karena memiliki kekayaan rempah-rempah. Para penjajah memanfaatkan tingkat heterogenitas bangsa Indonesia yang tinggi dengan melancarkan Devide et Impera, politik pecah belah atau adu domba, untuk membuat bangsa Indonesia terpecah sehingga bisa menguasai rempah-rempah dengan mudah.

Di masa kini, bangsa Indonesia tetap menjadi rebutan karena memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Antara lain, nikel terbesar pertama dunia;



batu bara terbesar ke-2 dunia, emas terbesar ke-6 dunia, tembaga terbesar ke-7

dunia, serta gas alam terbesar ke-13 dunia. "Dengan jumlah penduduk lebih dari 273



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

juta jiwa, terdiri dari 1.340 suku yang memiliki 733 bahasa, serta menganut 6 agama serta puluhan aliran kepercayaan, menjadi faktor sosiologis yang menempatkan tingkat heterogenitas bangsa kita sangat tinggi. Ditambah posisi geografis yang strategis dalam lalu lintas kemaritiman, telah menempatkan kita sebagai magnet bagi berbagai kepentingan global, sekaligus menempatkan kita pada posisi yang rentan dari ancaman perpecahan. Oleh karena itu, merawat persatuan dan kesatuan bangsa agar tak bisa diadu domba dan dipecah belah merupakan sebuah keharusan,” ujar Bamsuet usai menerima pengurus DPP Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat, di Jakarta. Kamis (20/7/23).

Pengurus DPP Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat yang hadir, antara lain Ketua Umum Hariara Tambunan, Sekjen M. Agus Miftah, Bendahara Umum M. Bowmen Marbun, Ketua I Bidang OKK Johannes Ratag, Ketua III Bidang Pemuda Hamka Yandu, Ketua V Bidang Hukum M. Iqbal Ramadhani, Ketua VI Bidang Pendidikan Muhammad Iqbal, Ketua VII Bidang Olahraga Herawati, dan Ketua VIII Bidang Perempuan Sofie Mandagi.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengingatkan, Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang sudah semakin dekat, harus disambut dengan suka cita sebagai pesta demokrasi rakyat. Jangan

sampai pesta tersebut berubah menjadi bencana dan bergeser menjadi konflik horisontal, karena dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk menyebar hoax dan memecah belah bangsa hanya karena kepentingan kekuasaan golongannya saja.

“Kerentanan penyebaran hoax selama proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 melalui media sosial patut diwaspadai. Mengingat tingginya tingkat penetrasi internet di tanah air. Hingga awal Maret 2023, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah menyentuh angka 215,6 juta user atau sekitar 78,2% dari total populasi,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, laporan We Are Social menunjukkan, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023, setara 60,4% dari populasi di dalam negeri. Pengguna Facebook mencapai 135,05 juta pengguna, Instagram mencapai 89,15 juta pengguna, serta Twitter mencapai 14,75 juta anggota.

“Tingginya penetrasi internet dan pengguna media sosial juga harus diimbangi dengan keadaban digital. Ironisnya, dari laporan hasil survei Microsoft bertajuk Digital Civility Index (Indeks Keadaban Digital) tahun 2020 yang dirilis Februari 2021, Indonesia menempati urutan 29 dari 32 negara yang disurvei, atau yang ‘terburuk’ untuk kawasan Asia Pasifik,” pungkas Bamsuet. □



Sosialisasi di Desa Poowo Barat

Fadel Muhammad: Masyarakat Hendaknya Bijak Gunakan Hak Pilihnya



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya di Pemilu tahun 2024 nanti. Suara rakyat siapapun dia, termasuk ibu-ibu, akan menentukan arah bangsa ini ke depan.

“Jangan gegabah dan asal dalam memilih. Sesuaikan dengan hati nurani. Pelajari dengan betul pilihan-pilihan yang ada. Apakah yang dipilih itu akan mampu membawa rakyat sejahtera atau tidak. Hal ini bisa dilihat dari rekam jejaknya, jika calon itu sudah pernah memegang jabatan publik,” ujar Fadel Muhammad, dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR, di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Sabtu malam (22/7/2023).

Hadir dalam acara sosialisasi tersebut, Stafsus MPR Hasan Shahab, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat, mulai dari kaum bapak, ibu, dan generasi muda setempat sebagai peserta.

Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini juga mengingatkan bahwa panduan dan parameter dalam memilih calon pemimpin yang baik nanti, selain latar belakang juga

harus berlandaskan kepada nilai-nilai luhur bangsa yang ada dalam Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).

“Teguhnya seluruh elemen bangsa dalam memegang nilai-nilai luhur bangsa, seperti Pancasila, akan berdampak positif buat bangsa ini dalam menghadapi dan menjalankan ajang kontestasi Pemilu 2024,” imbuhnya.

Dengan tertanamnya Pancasila dalam sanubari seluruh anak bangsa, lanjut Sena-

tor asal Gorontalo ini, maka kontestasi Pemilu akan terasa biasa saja walaupun berbedabeda pilihan. “Mengapa itu bisa terjadi, karena bangsa ini sudah terbiasa berbeda. Di Gorontalo ini saja penduduknya bermacam-macam, bukan hanya penduduk asli tapi dari suku lainnya juga ada, dan tidak ada masalah sama sekali,” tambahnya.

Di sesi akhir, Fadel Muhammad mengajak seluruh masyarakat Gorontalo dan seluruh rakyat Indonesia membuat satu pemahaman bahwa kontestasi politik 2024 nanti adalah



pesta demokrasi rakyat. Sebuah 'pesta' yang bertujuan untuk kemajuan bangsa dan menyejahterakan rakyat. Sehingga tanggung jawab untuk menjaga,

menyukseskan, lepas dari konflik adalah tanggung jawab semua.

"Dengan memohon perlindungan kepada Allah SWT., kita berdoa semoga Pemilu 2024

akan berlangsung seperti yang sama-sama kita harapkan, yakni lancar, sukses, aman, dan berdampak baik untuk semua," tandasnya. □

Sosialisasi Gerakan Pemuda Marhaen

Fadel Muhammad: Pancasila Ideologi Negara Tak Bisa Diperdebatkan Lagi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

JUGA di Gorontalo, dua hari sebelumnya, tepatnya Kamis (20/7/2023), Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR di depan Gerakan Pemuda Marhaen. Acara yang digelar di El Madinah Hotel, Bulotadaa, Gorontalo, itu diikuti para santri Al-Khairaat dan pemuda setempat.

Fadel Muhammad dalam kesempatan itu menegaskan, pondasi, ideology, dan dasar negara Indonesia satu-satunya adalah Pancasila, tidak bisa diubah dan bukan untuk diperdebatkan lagi. Hal itu, katanya, harus tertanam kuat dalam diri setiap anak bangsa, terutama generasi mudanya.

Pancasila menjadi penting, menurut Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini,

karena Pancasila adalah elemen luar biasa yang mampu mempersatukan segenap bangsa Indonesia yang sangat beragam. "Pancasila juga terbukti mampu menjaga bangsa ini dari segala permasalahan dan tantangan sejak Pancasila lahir hingga kini," ujar Fadel dalam acara yang juga dihadiri oleh tokoh Gorontalo Haji Lala, dan Staf Khusus MPR Hasan Shahab.

Pancasila, lanjut Fadel Muhammad, adalah salah satu elemen dari nilai-nilai luhur bangsa yang ada dalam Empat Pilar MPR RI. Tiga unsur lainnya adalah UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR, katanya, sangat memahami dan *concern* dengan masalah ini. Dan, karenanya, MPR gencar melaksanakan gerakan pemahaman kembali nilai-nilai luhur kepada seluruh anak bangsa, yang dikenal dengan sebutan Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Sosialisasi Empat Pilar MPR yang berlangsung di kota berjuduk: "Serambi Madinah" itu diikuti dengan ansiasme oleh generasi milenials di kota itu. "Jika seluruh generasi muda Indonesia memiliki kecintaan begitu besar kepada nilai-nilai luhur bangsanya, saya yakin bangsa ini di masa depan akan berada di tangan yang tepat, yakni manusia unggul yang berkarakter kebangsaan tinggi," ujar mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu.

Di sesi akhir, Hasan Shahab tampil menggelar kuis dadakan Empat Pilar kepada para peserta. Dalam kuis itu, peserta generasi muda diuji wawasannya seputar MPR dan kebangsaan. Fadel Muhammad memberikan penghargaan dan apresiasi kepada sebagian besar peserta, walaupun terlihat malu-malu tapi mampu menjawab seluruh pertanyaan kuis. □



Pelepasan Social Expedition ke Pulau Nain

HNW: Bukti Generasi Muda Masih Cinta Negara dan Bangsa Indonesia



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKITAR duaratus anak muda yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, Senin, 24 Juli 2023, berkumpul di Aula Serbaguna, Balai Kota Manado, Sulawesi Utara. Kehadiran kaum muda milenial di ibukota provinsi yang berbatasan dengan negara Filipina itu adalah dalam rangka mengikuti 'Social Expedition Edisi Bunaken Pulau Nain' dan 'Temu Tokoh Nasional'.

Para generasi muda ini, selama beberapa hari, mengikuti berbagai aktivitas sosial dan lingkungan di Pulau Nain. Pulau Nain adalah sebuah pulau yang letaknya tak jauh dari Pulau Bunaken, dan berada di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Upacara pelepasan peserta Social Expedition Edisi Bunaken Pulau Nain' ini dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., Wakil Walikota Manado dr. Richard H. M Sualang, Tokoh Masyarakat Sulawesi Utara Syarifudin Saafa, ST., MM; Founder 1000 Generasi Emas Fahrin Umarama, dan Direktur Yes Go Indonesia Devitasari.

Hidayat Nur Wahid, yang biasa disapa HNW, menyatakan, MPR sangat mendukung

kegiatan anak-anak muda yang dikoordinir oleh Komunitas 1000 Generasi Emas dan Yes Go Indonesia itu. "Sosial ekspedisi yang diinisiasikan oleh anak-anak muda ini sangat luar biasa," ujar HNW kepada wartawan yang mencegatnya.

HNW menyebut, kegiatan ini merupakan langkah terobosan yang menginspirasi dan membuktikan generasi muda masih mencintai Indonesia. Dia mengakui, banyak orang

mengkhawatirkan nasionalisme atau rasa cinta bangsa dari para generasi muda. Seolah-olah mereka jauh dari aktivitas yang memupuk jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak cinta pada Indonesia.

"Ternyata, melalui kegiatan ini, generasi milenial membuktikan dirinya cinta pada bangsa dan negara," tegas HNW. Apalagi, tambah alumni Pondok Pesantren Gontor itu, mereka menampilkan kreasi yang orisinal, sehingga mampu mengumpulkan 200 anak dari seluruh Indonesia.

Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kegiatan di pulau-pulau kecil menguatkan apa yang pernah diperjuangkan bangsa Indonesia akan hadirnya negara kepulauan lewat Deklarasi Juanda. Dengan deklarasi itu membuat Indonesia bukan hanya sebagai negara daratan saja, namun mewujudkan negara bangsa bernama nusantara. "Seluruh pulau dan laut bersatu padu menjadi Indonesia", ujarnya.

Dengan demikian, lanjut HNW, laut dan selat tidak membuat bangsa ini pecah dan tersekat. Penegasan Indonesia sebagai nusantara disebut dalam Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: NKRI adalah





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. "Nah, kegiatan dari para generasi muda itu menegaskan kembali tentang kenusantaraan Indonesia," ujar HNW.

Meski mengakui minim pendanaan, namun para peserta ekspedisi ini tetap semangat. Semangat yang membara dari para generasi muda itu, menurut HNW, mengulangi semangat besar yang dahulu dicontohkan

oleh para generasi muda di tahun 1920-an, seperti anak muda dari Sulawesi Utara bernama AA. Maramis. Pada masanya, AA Maramis dengan segala keterbatasannya berani merantau dari kampung halamannya menuju ke Batavia untuk sekolah dan melanjutkan sekolah ke Leiden, Belanda.

"Setelah lulus. AA. Maramis kembali ke Indonesia dan ikut melanjutkan perjuangan

Indonesia merdeka", ujarnya HNW. AA Maramis, jelas politisi PKS ini, merupakan anggota BPUPK dan kemudian Panitia 9. "Dia adalah Bapak Bangsa yang ikut menyepakati dasar negara Pancasila dalam Piagam Jakarta yang menjadi Pembukaan UUD 45," tambahnya.

HNW mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan Social Expedition Edisi Bunaken Pulau Nain. Dia menegaskan, kegiatan itu penting disukseskan, dikomunikasikan, dan disosialisasikan sehingga menjadi semangat yang bisa ditularkan ke seluruh generasi muda khususnya, dan masyarakat umumnya. "Kegiatan ini bisa dikembanguaskan, bahkan bila kegiatan ini ingin ditindaklanjuti di Jakarta, kami siap mendukung dan menerima mereka di MPR," ujar pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu.

MPR mendukung secara konstitusi, sebab kegiatan itu menegaskan kembali tentang kesatuan dan dukungan kita terhadap NKRI yang bercirikan Nusantara. "Terobosan anak2 muda ini, menegaskan kembali sikap generasi muda yang tetap cinta Indonesia dengan nusantaranya,"pungkasnya. □



Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Alumni ITB

Bamsoet Ajak Seluruh Elemen Bangsa Perkuat Wawasan Kebangsaan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan, membangun wawasan kebangsaan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan secara instan dan serta merta. Tetapi membutuhkan proses agar benar-benar matang dan membumi.

Membangun wawasan kebangsaan harus dilaksanakan masif agar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat dan mengisi setiap ruang publik. Dan, yang tidak kalah pentingnya, membangun wawasan kebangsaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar tertanam kuat, dan tidak mudah goyah oleh arus perubahan zaman.

"Melalui wawasan kebangsaan yang kuat terbukti kita mampu menghadapi pandemi Covid-19 dengan solid. Namun, kewaspadaan harus tetap mengiringi berbagai kebijakan di sektor perekonomian. Karena, hingga saat ini, perekonomian glo-

bal tidak sedang baik-baik saja. Bahkan, beberapa negara saat ini masih berjibaku menghadapi inflasi, bahkan hiper inflasi. Misalnya Argentina dengan angka inflasi menyentuh 104,3% dan Turki mencapai 50,5%," ujar Bamsoet saat memberikan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan kepada para Alumni ITB, di Lemhannas, Jakarta, Jumat (28/7/23).

Turut hadir, antara lain: Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas Laksda TNI Edi Sucipto, Deputi Bidang Kebangsaan Lemhannas Laksda Edi Sucipto, Direktur Pelatihan untuk Pelatih Lemhannas Marsma TNI Antar Samudera, Direktur Pembinaan dan Pelaksanaan Lemhannas Brigjen Marinir Nana Rukmana, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Lemhannas Masneli, serta Ketua Umum Ikatan Alumni ITB Gembong Primajaya.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, masih kurang

dinamisnya kondisi geopolitik global yang dipicu oleh perang Rusia - Ukraina yang belum kunjung usai, meningkatnya eskalasi potensi konflik di Semenanjung Korea, perebutan kepentingan ekonomi, strategi, dan politik di kawasan Laut Cina Selatan, serta ketegangan hubungan Turki dan Yunani, semuanya menjadi variabel yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan langkah kebijakan bangsa Indonesia. Karena bagaimanapun, sebagai bagian dari komunitas global, bangsa Indonesia tidak bisa terlepas diri dari pengaruh situasi dan kondisi dunia internasional.

"Karena itu, Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat. Sehingga bisa melanjutkan roda pemerintahan yang sudah sukses dilakukan Presiden Joko Widodo. Kita juga membutuhkan road map pembangunan agar berbagai capaian pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo, seperti IKN Nusantara, bisa dilanjutkan oleh presiden selanjutnya. Untuk itulah saat ini MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sedang mempersiapkan Pokok-pokok Haluan Negara sebagai road map pembangunan bangsa,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menerangkan, pasca kemerdekaan, dengan telah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga telah bergulir periodisasi kepemimpinan nasional. Mulai dari era Presiden Soekarno pada awal berdirinya Republik Indonesia, hingga saat ini, era pemerintahan Presiden Jokowi, telah menggoreskan tinta kesejarahan dengan ciri khas kepemimpinan dan pencapaian masing-masing.

Pada masa kepemimpinannya, Presiden Soekarno berhasil membangun semangat

revolusi dan nasionalisme yang bermuara pada terwujudnya cita-cita Indonesia merdeka, serta menyatukan Papua Barat ke dalam NKRI. Terbentuknya Gerakan Non Blok pada penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955, menjadi bukti kepiawaian Presiden Soekarno membangun aliansi dan meraih simpati internasional untuk membebaskan diri dari bayang-bayang hegemoni blok Barat dan Timur.

“Pada kepemimpinan Presiden Soeharto, dalam 32 tahun masa pemerintahannya, berhasil meletakkan pondasi pembangunan di Indonesia melalui REPELITA. Membangun stabilitas sosial-politik, serta mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Dilanjutkan kepemimpinan Presiden BJ

Habibie, walaupun singkat namun tidak menafikan kenyataan bahwa banyak hal yang telah beliau persembahkan. Khususnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan,” terang Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, Presiden Megawati Soekarnoputri, merupakan sosok yang memiliki karakter dan kepribadian kuat, menjunjung tinggi adat ketimuran. Selama kepemimpinannya, dikenal tegas dan berpegang teguh pada prinsip: berpolitik dengan ideologi, sesuai konstitusi. Tidak heran jika Megawati menolak perpanjangan masa jabatan dan periodisasi presiden.

Kepemimpinan nasional dilanjutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dikenal sebagai sosok demokratis, serta menghormati kompromi dan konsensus demi menghindarkan sikap otoriter. SBY adalah karakter pemimpin yang mengedepankan sikap kehati-hatian, kecermatan dan kematangan berfikir sebelum mengambil suatu keputusan. Semasa kepemimpinan SBY, Indonesia berhasil menyelesaikan batas maritim Indonesia dengan dua negara sahabat, yaitu Singapura dan Filipina.

Presiden Joko Widodo yang saat ini menjabat untuk masa jabatan keduanya, memiliki karakter partisipatif dan karismatik, dekat dengan rakyat. Program pemerataan pembangunan terasa begitu nyata, dengan menggalakkan pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa. Kepedulian pada kehidupan rakyat dimanifestasikan melalui berbagai program bantuan sosial, seperti KIP dan BPJS, yang sangat dirasakan manfaatnya oleh kelompok ekonomi lemah.

“Dari berbagai periodisasi pemerintahan yang telah kita lalui, kita dapat mengambil satu benang merah dalam konteks kepemimpinan nasional. Meskipun dihadapkan pada tantangan kehidupan kebangsaan yang beragam dan dinamis, namun semuanya memiliki satu keseragaman visi, yaitu mewujudkan tujuan nasional melalui pembangunan untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Bamsuet. □



Lomba Game SANG PATARA

Ketua MPR RI Bamsoet dan ILMCI Gelar Lomba Game SANG PATARA



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, bersama I Love My Country Indonesia Corporation (ILMCI Corporation), didukung Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (KABAIS TNI), Letjen TNI Rudianto, menyelenggarakan Lomba Game 'SANG PATARA' bagi anak-anak Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Lomba ini, jelas Bamsoet, diselenggarakan untuk memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dan HUT MPR RI Tahun 2023, sekaligus cara kreatif MPR RI dalam

menanamkan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) kepada generasi muda bangsa melalui cara kreatif dalam bentuk permainan," jelas Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo.

SANG PATARA merupakan game yang dapat di download di playstore. Berisi kuis seputar Pancasila yang dapat membantu anak-anak memahami nilai-nilai Pancasila secara mudah. Di dalamnya terdapat karakter pemain (Patriot) yang merepresentasikan para pahlawan dan tokoh Indonesia. Antara lain, Patriot

Gajahmada, Patriot Cut Nyak Dhien, Patriot Diponegoro, Patriot Dewi Sartika, serta Patriot Hasanuddin.

"Melalui karakter patriot, para pemain game harus melawan para monster sebagai representasi dari paham radikalisme. Di sela permainan, juga terdapat pertanyaan seputar nilai-nilai Pancasila yang harus dijawab oleh para pemain. Teknis perlombaan dan bagaimana cara pendaftarannya diinfokan lebih detail melalui akun media sosial MPR RI," ujar Bamsoet usai menerima KABAIS TNI Letjen TNI Rudianto, di Jakarta, Rabu (26/7/23).

Turut hadir, antara lain: Anggota Komisi X DPR RI Robert Kardinal, Presiden dan CEO ILMCI Corporation Sofian Tjandera, serta Chief Information Technology Officer ILMCI Corporation Leonardo Tandra.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga menyoroti semakin pesatnya teknologi informasi yang tidak mungkin bisa dilawan. Melainkan harus dihadapi dengan bijaksana. Seperti halnya yang dilakukan ILMCI Corporation dengan menghadirkan game SANG PATARA, agar dunia game tidak hanya dibanjiri dengan game hiburan yang tidak memiliki pesan dan nilai kebangsaan.

Saat ini, kata Bamsoet, kita juga tengah dihadapkan pada perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam bentuk platform ChatGPT yang bisa menjawab berbagai hal secara cepat dengan tingkat keakuratan yang nyaris tepat. Perkembangan AI yang semakin pesat tersebut bukan hanya mendatangkan manfaat, melainkan juga bisa mendatangkan malapetaka bagi kehidupan manusia. Karena, jika tidak disikapi dengan bijak, AI berpotensi mengaburkan pandangan manusia pada kebenaran dan kebohongan. Sebagai contoh, saat ini sedang marak di Youtube AI Cover Song yang menampilkan suara Presiden Joko Widodo dan Menko Marinvest Luhut Panjaitan menyanyikan berbagai lagu dengan suara



karakter mirip Presiden Jokowi. Padahal, beliau tidak pernah menyanyikannya,” jelas Bamsoet.

Dosen Tetap Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini, menerangkan, untuk menghadapi perkembangan AI yang semakin

pesat, Indonesia perlu memiliki regulasi yang jelas dan kuat. Khususnya, dengan memberikan penguatan kepada peran intelijen, baik terhadap BIN, BAIS TNI, hingga Baintelkam Polri dan Kejaksaan.

“Saat ini, pemanfaatan AI di Indonesia hanya mengacu kepada Dokumen Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045 yang dikeluarkan Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi/BPPT (kini menjadi BRIN). Dokumen tersebut perlu diperkuat dengan adanya regulasi yang lebih tinggi setingkat undang-undang, peraturan presiden, ataupun peraturan pemerintah yang dapat mengatur penggunaan, etika, keamanan, serta perlindungan terhadap tenaga kerja dalam setiap pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia,” pungkash Bamsoet. □

Pesan Persatuan dan Empat Pilar

Ahmad Muzani Ajak Santri Bijak Menentukan Pilihan di Pemilu 2024

WAKIL Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, menghadiri sekaligus menjadi pemateri utama dalam gelar acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Arasyadi Kalimantan Timur, di Aula Pertemuan, Kompleks Ponpes Al-Arasyadi, Senin (31/7/2023).

Kepada seluruh santri dan santriwati Ponpes Islam Al Arsyadi sebagai peserta sosialisasi, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Empat Pilar itu adalah Empat Pilar bernegara sebagai penyangga seluruh bangsa ini dalam bernegara.

“Empat pilar ini adalah satu kesatuan, tidak bisa tiga pilar apalagi hanya satu. Seperti sebuah bangunan, dia akan kuat jika ditopang empat pilar. Jika hanya tiga atau satu, bangunan itu akan mudah roboh,” ujar Pimpinan MPR dari Partai Gerindra ini.

Lebih jauh, Ahmad Muzani menjabarkan, pilar pertama Pancasila. Sebagai rumusan dalam bernegara yang telah disepakati para pendiri bangsa, Pancasila memastikan bahwa kehidupan seluruh anak bangsa Indonesia, tetap dalam ideologi Pancasila.

“Pancasila itu adalah rumusan tengah kesepakatan para pendiri negara kita untuk mendirikan Indonesia, yang lahir dari hasil perdebatan yang panjang para Bapak Bangsa. Dalam perdebatan itu, ada yang menginginkan negara didasarkan pada nasional sekuler tanpa perlu sentuhan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

agama. Pendapat lain menginginkan, negara harus berdasarkan Islam, karena mayoritas pemeluk Islam. Dari hasil pemikiran yang dalam dan panjang, keluarlah Pancasila sebagai jalan tengah sebagai dasar kita dalam bernegara,” papar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini.

Pilar kedua, lanjut Ahmad Muzani, ada UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusi yang merupakan sebuah rancang bangun aturan dasar yang ada di Indonesia. Pasal-pasal dalam UUD itu diterjemahkan dalam aturan turunannya, yakni UU yang kemudian dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

“Pelaksanaan atau mewujudkan amanah

dari UUD itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemimpin bangsa sebagai pengelola negara. Contohnya, bagaimana melaksanakan UUD Pasal 33 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya, digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga benar-benar memberikan keadilan dan kemakmuran secara nyata,” imbuhnya.

Oleh karena itu, tegas Ahmad Muzani, betapa sangat pentingnya para santri yang juga sebagai generasi muda bangsa harus berperan aktif menyukseskan sekaligus memberikan suara dengan benar dan bijak dalam proses demokrasi lima tahunan, yang akan dihadapi bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ini pada tanggal 14 Februari 2024. Proses di mana bangsa Indonesia harus mencari pemimpin yang bisa mewujudkan amanah konstitusi, yakni menciptakan rakyat yang adil dan makmur.

“Dalam proses demokrasi itu, selain akan mendapatkan pemimpin nasional yang amanah dan tangguh, rakyat akan mendapatkan juga wakil rakyat, baik pusat, provinsi, serta kabupaten/ kota yang juga amanah. Karena merekalah yang nantinya akan menjadi mitra pemerintah dalam membuat dan mengesahkan UU, menyusun anggaran, dan melakukan pengawasan jalannya pemerintahan sesuai amanah UUD,” terangnya.

Intinya, lanjut Ahmad Muzani, dalam

bernegara dan melaksanakan Empat Pilar, ujungnya adalah persatuan dan kebersamaan. Sebab, tanpa itu semua bangsa ini akan sangat mudah tercerai berai dan segala aktivitas dalam mengisi pembangunan bangsa tidak akan berjalan.

“Coba pikirkan, kita ini bisa duduk ditempat ini, bisa dengan tenang belajar, orang tua kalian bisa ke sawah atau kebun, bisa ke kantor, bisa mengajar, bisa ngaji, bisa ke masjid karena ada persatuan, karena ada kebersamaan, karena ada kerukunan yang ujungnya adalah perdamaian, yang ujungnya adalah ketenangan,” tegasnya.

Ahmad Muzani mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk bersyukur, di Indonesia masih terjaga persatuan, persaudaraan, dan

kerukunan sehingga tercipta keamanan.

“Karena itu, saya mengajak agar suasana damai harus sama-sama kita jaga mulai saat ini, pra dan pasca pelaksanaan Pemilu 2024, sebab itu merupakan tanggung jawab bersama. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta ke sini hanya ingin membawa pesan ini, pesan persatuan untuk saudara-saudaraku di Kalimantan Timur,” tandasnya.

Sosialisasi Empat Pilar sendiri berlangsung lancar, turut hadir dalam acara, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ir. H. Seno Aji; Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara, Alif Turiadi; Pemimpin Yayasan Ponpes Al-Arasyadi, Abuya KH. Saifuddin Marzuki, dan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Arasyadi. □



Apel di Sunanul Muhtadin Kertosono

Gus Jazil: Santri Harus Berani Bercita-cita Besar

Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, akan terus berusaha untuk menjadikan Pesantren Modern Sunanul Muhtadi sebagai salah satu pesantren unggulan dan bisa mencetak generasi Islam yang unggul.

GUS JAZIL, sapaan Jazilul Fawaid, mengajak para santri untuk berani memiliki cita-cita besar. Mimpi dan motivasi besar tersebut harus dimiliki setiap santri sehingga bisa terpacu untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh dan serius dalam menatap masa depan.

"Seluruh santri saya harapkan punya cita-cita yang besar, cita-cita yang tinggi, sekaligus kemauan yang besar untuk menjadi pejuang, untuk menjadi teladan, dan juga menata masa depan," ujar Gus Jazil saat memimpin apel perdana Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Pondok Pesantren Modern Sunanul Muhtadin, Kertosono, Sidayu, Gresik, Senin (17/7/2023).

Di hadapan para santri Sunanul Muhtadin, terutama santri baru, Gus Jazil mengatakan bahwa masa-masa di pesantren adalah momentum emas untuk mengukir sejarah sebagai bekal menjalani kehidupan di masa mendatang. "Kita sedang mengukir sejarah baru. Bagi santri yang baru mudah-mudahan semua kerasan di pondok, nyaman dan tentunya serius dan bersungguh-sungguh untuk mencari, mendalami, belajar ilmu pengetahuan, khususnya Alquran, ilmu bahasa dan keterampilan lainnya sebagai bekal kita menuju masa depan," tuturnya.

Ketua Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) Jakarta ini juga mengajak siswa dan para guru di Pesantren Sunanul Muhtadin agar bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa tidak merasa terbebani saat belajar di pesantren. "Belajarlah yang sungguh-sungguh, serius, tapi saya berharap ketika proses belajar-mengajar diberikan dengan cara yang tepat dan tidak membebani siswa," urainya.

Gus Jazil yang juga pendiri Pondok Pesantren Sunanul Muhtadin mengatakan, pesantren yang dirintisnya tersebut usianya masih sangat muda, baru tiga tahun. Namun, dirinya sangat bersyukur karena saat ini



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Ponpes Sunanul Muhtadin sungguh luar biasa. Setiap tahun, jumlah santri terus bertambah signifikan. Menariknya, santri tidak hanya datang dari wilayah Gresik saja, namun banyak datang dari luar kota bahkan luar pulau.

Dirinya terus berusaha untuk menjadikan Pesantren Modern Sunanul Muhtadi sebagai salah satu pesantren unggulan dan bisa mencetak generasi Islam yang unggul. "Semua guru yang ada kita hadirkan, guru-guru terampil, bermutu dari berbagai lulusan perguruan tinggi unggulan agar para santri bisa belajar dengan baik," katanya.

Selain itu, kata Gus Jazil, sarana pendidikan dan berbagai sarana penunjang lainnya terus dilengkapi, baik berupa fasilitas asrama yang nyaman, perpustakaan, laboratorium bahasa asing, baik Inggris, Arab

maupun Mandarin, serta sarana lainnya. "Memang belum lengkap semua, tapi akan terus kita lengkapi, terpenting anak-anak bisa nyaman untuk belajar. Kita juga punya mushaf Alquran selebar 1,5 meter dan lainnya," tutur Gus Jazil.

Saat ini, Pondok Pesantren Modern Sunanul Muhtadin sudah memiliki jenjang pendidikan tingkat SMP, Madrasah Aliyah (MA) Tahassus Alquran, dan juga SMK dengan Kompetensi Keahlian Perhotelan dan Jasa Pariwisata, Desain Komunikasi Visual, Teknologi Laboratorium Medik, serta Farmasi Klinis dan Komunitas.

"Kami ingin mencetak generasi bervisi qurani yang mampu menguasai, mengajarkan dan menerapkan akidah, syariah dan akhlak dengan benar, serta memiliki keilmuan yang relevan dengan perkembangan zaman," kata Gus Jazil. □

Kunjungan Mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah

Siti Fauziah: Perpustakaan MPR Telah Melakukan Digitalisasi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEBANYAK 30 mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada Senin, 17 Juli 2023, melakukan kunjungan ke Perpustakaan MPR. Kehadiran mereka di perpustakaan yang berlokasi di Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, untuk mengikuti 'Penyuluhan Perpustakaan'.

Kehadiran mereka di Gedung Perpustakaan MPR disambut oleh Plt. Bidang Administrasi yang sekaligus menjabat Kepala Biro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah, S.E., M.M.

"Selamat datang kepada Delegasi UIN," sapa Siti Fauziah mengawali sambutannya. Kunjungan mahasiswa semester empat itu dinilai sangat tepat, karena apa yang dilakukan sesuai dengan ilmu yang mereka geluti. "Kunjungan ini akan menambah ilmu",

tuturnya.

Lebih lanjut Siti Fauziah menjelaskan, Perpustakaan MPR memiliki banyak koleksi buku. Koleksi yang ada disebutnya lengkap, bahkan ada buku yang tidak diperdagangkan. Lengkapnya buku yang ada bisa dijadikan bahan referensi bagi mereka bila hendak menyusun skripsi.

Menurut perempuan asal Bandung, Jawa Barat, itu Perpustakaan MPR selain memiliki buku dalam bentuk manual, fisik, atau print, juga memiliki koleksi *e-book*. *E-book* tersedia, karena Perpustakaan MPR telah melakukan digitalisasi baik buku maupun perpustakaan (e-library).

Dari digitalisasi buku dan perpustakaan membuat masyarakat bisa mengunjungi Perpustakaan MPR kapan saja. "Bisa datang sendiri-sendiri atau bersama-sama. Datang ke sini saat jam kerja kapan saja boleh untuk melihat koleksi buku yang ada," paparnya. "Bila tidak sempat datang langsung ke sini, bisa berkunjung lewat *e-library* dan *e-book* yang kami sediakan," tambahnya.

Siti Fauziah berharap, dari kunjungan ini membuat para mahasiswa bisa mengelola perpustakaan. "Adik-adik bisa menimba ilmunya di sini," ujarnya. Apa yang didapat di Perpustakaan MPR diharap dapat bermanfaat bagi diri dan lingkungan. "Sosialisasikan kunjungan di Perpustakaan MPR kepada keluarga dan lingkungan bahwa di sini ada fasilitas *e-book* dan *e-library*," paparnya.

Kepada delegasi UIN, Siti Fauziah menyebut bahwa mereka akan mendapat penyuluhan perpustakaan dari tiga narasumber, yakni Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Indro Gutomo S.H., M.H.; Pustakawan Madya Yusniar S.H.; dan Pustakawan Muda Titin Hartini, S.Sos.



Indro Gutomo: Kita Akan Jadikan Perpustakaan MPR Sumber Referensi Ketatanegaraan

Perpustakaan Setjen MPR berkeinginan untuk menjadi sumber referensi ketatanegaraan bagi masyarakat. Untuk itu banyak hal yang perlu dibenahi. Pertama, mengupayakan digitalisasi perpustakaan, *e-library*. Kedua, melakukan penyuluhan kepada pelajar, mahasiswa, guru, serta pengunjung perpustakaan. Ketiga, melakukan pengenalan perpustakaan MPR kepada setiap delegasi yang menjadi tamu MPR. Keempat, restrukturisasi organisasi. Mengubah pegawai yang sebelumnya pegawai struktural menjadi fungsional.

Paparan di atas disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR Indro Gutomo S.H., M.H., saat menerima 30 mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta melalui kegiatan yang bertajuk 'Penyuluhan Perpustakaan' yang digelar pada 17 Juli 2023 di Gedung Perpustakaan MPR, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut, Indro Gutomo mengatakan, saat ini MPR banyak menerima delegasi dari berbagai sekolah dan kampus serta kelompok masyarakat. Mereka datang ke MPR untuk mengenal lebih jauh tentang tugas dan wewenang lembaga ini. "Nah, selepas kegiatan itu, kita dorong mereka berkunjung ke perpustakaan, apalagi saat ini koleksi buku perpustakaan MPR RI sangat memadai, khususnya mengenai sejarah MPR RI dari masa ke masa, maupun risalah amandemen UUD 1945," ujarnya. "Setiap delegasi yang berkunjung, kita wajibkan singgah di perpustakaan," tambahnya.

Langkah-langkah di atas, menurut Indro Gutomo, merupakan cara agar Perpustakaan MPR keberadaannya mampu menjadi sumber referensi masyarakat, khususnya terkait ke-MPR-an dan ketatanegaraan. "Kita sedang berkembang menuju ke sana, dan proses-proses akreditasi sedang kita upayakan," ujar alumni Fakultas Hukum UGM itu. "Hasil akhirnya kita ingin perpustakaan ini menjadi perpustakaan yang besar dan mandiri," harapnya.

Ini dilakukan sebab, menurut pria asal Yogyakarta itu, Perpustakaan MPR masih semi mandiri, belum seperti perpustakaan besar lainnya. "Cita-cita kami adalah menjadikan Perpustakaan MPR menjadi perpustakaan besar dan mandiri," harapnya.

Tentu banyak tantangan untuk menjadikan Perpustakaan MPR seperti di atas. Digitalisasi perpustakaan misalnya tentu membutuhkan kreatifitas. Saat ini banyak aplikasi yang senada. Untuk itu, perlu dibuat aplikasi yang canggih agar pengunjung semakin banyak. "Pastinya hal demikian membutuhkan anggaran," ungkapnya.

Menjadi pustakawan yang handal, menurut Indro Gutomo, sama seperti menjadi profesi-



profesi yang profesional lainnya. Semua profesi yang handal dikatakan harus memiliki tiga kecerdasan, yakni kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional.

Pustakawan yang handal selain memiliki pengetahuan tentang pengelolaan pustaka, tetap harus diimbangi dengan kecerdasan lainnya. "Agar seimbang," tuturnya. Bila tiga hal itu seimbang maka apapun yang dilakukan oleh seorang professional akan berhasil, termasuk pustakawan.

Selain Indro, narasumber lainnya adalah Yusniar, selaku pustakawan madya dan Titin Hartini selaku pustakawan muda. Kedua Pustakawan MPR RI ini menjelaskan mengenai kondisi perpustakaan MPR saat ini, serta perpustakaan digital yang dapat di-download di android.

Yusniar menyebut, perpustakaan yang dipimpinnya mempunyai visi: terwujudnya perpustakaan sebagai pusat layanan koleksi sumber daya informasi legislatif yang layak, lengkap, akurat, dan terbuka.

Acara penyuluhan yang dibuka oleh Plt. Administrasi sekaligus Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah SE., MM. ini berlangsung interaktif dengan dipandu oleh moderator Satria Yudha. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kunjungan Delegasi Universitas Serang Raya

Indro Gutomo: MPR Aktif Melakukan Komunikasi Publik dengan Berbagai Kampus



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEBANYAK 70 mahasiswa dari Universitas Serang Raya, Kota Serang, Banten, Selasa, 18 Juli 2023, melakukan kunjungan ke MPR. Kedatangan mahasiswa dari berbagai jurusan di Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, itu diterima langsung oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR, Indro Gutomo bersama Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Layanan Informasi, Euis Karmilah, dan Kepala Sub Bagian Hulembaga, Yenita Revi.

Riyan Alkhoir, perwakilan mahasiswa mengatakan, kedatangan mereka ke MPR untuk melakukan edukasi profesi sesuai dengan jurusan dan fakultas yang digeluti, serta ingin melihat pelayanan publik di MPR. Riyan mengucapkan terima kasih kepada Humas MPR yang telah menyambut hangat kedatangan mereka. "Sebelum berada di Ruang GBHN ini kami telah diantar melihat gedung-gedung yang ada di sini," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Indro Gutomo mengucapkan selamat datang kepada delegasi Universitas Serang Raya. Sebagai Rumah Kebangsaan, MPR RI terbuka menyambut kedatangan masyarakat, termasuk dari kalangan akademisi. Mahasiswa juga dapat belajar banyak mengenai ketatanegaraan di MPR RI. Untuk itu dirinya mempersilahkan mahasiswa bila mau magang di Kesetjenan MPR.

Lebih lanjut Indro menyatakan, terkait pelayanan publik saat ini, MPR tengah aktif melakukan komunikasi publik dengan berbagai kampus, utamanya dengan perguruan tinggi yang pernah berkunjung ke MPR. Hal ini dilakukan agar MPR mendapatkan masukan dan saran terkait peningkatan pelayanan publik.

MPR, seperti dikatakan oleh seorang mahasiswa dalam forum itu, bahwa lembaga ini kurang dikenal. Menanggapi hal itu Indro Gutomo mengatakan, Forum Komunikasi Publik selain untuk meningkatkan pelayanan publik di MPR sekaligus juga untuk menyosialisasikan berbagai kegiatan dan aktivitas MPR.

Dalam forum tersebut, menurut Indro Gutomo, banyak masukan dari civitas akademika untuk meningkatkan informasi, komunikasi, serta peran MPR. "Kita serap aspirasi masyarakat lewat forum tersebut". Pada kesempatan tersebut, Indro juga mempersilahkan para mahasiswa untuk lebih mengenal MPR RI melalui Perpustakaan MPR RI. Di sana (Perpustakaan) banyak sekali referensi buku ketatanegaraan, antara lain sejarah MPR RI dari masa ke masa, serta risalah amandemen UUD 1945.

Sementara, Yenita Revi dalam pertemuan tersebut memaparkan tentang kelembagaan MPR, khususnya terkait tugas dan wewenang MPR, keanggotaan, serta alat kelengkapan MPR RI.

Dilanjutkan oleh Euis Karmilah, yang memaparkan tentang struktur organisasi Setjen MPR RI, serta tugas dan fungsi Biro Hubungan





Masyarakat dan Sistem Informasi. Euis mengapresiasi kedatangan para delegasi. Euis mengatakan, salah satu tugas Kehumasan MPR adalah memublikasikan aktivitas pimpinan dan kegiatan MPR ke

berbagai media, termasuk media sosial.

Acara penerimaan delegasi berjalan sangat interaktif, dipandu oleh moderator Muhammad Alfaroby. □

Kunjungan Delegasi SMAN 1 Padarincang Serang, Banten



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE., Anggota MPR Fraksi PPP

Sistem PPDB Perlu Dievaluasi Menyeluruh

SETIAP tahun ajaran baru, untuk melanjutkan sekolah ke SMP Negeri atau SMA Negeri, siswa harus mengikuti pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB. Ada empat jalur untuk dapat diterima di sekolah negeri yang dituju, yaitu melalui jalur seleksi afirmasi, jalur prestasi, perpindahan tugas orangtua atau wali, dan jalur zonasi. Keempat jalur seleksi tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi peserta didik tanpa kecuali untuk bersekolah di sekolah negeri.

Salah satu jalur PPDB adalah zonasi, yaitu jalur seleksi penerimaan bagi siswa sesuai ketentuan wilayah atau zonasi domisili. Jalur seleksi zonasi dalam penerimaan siswa baru merupakan jalur seleksi bagi peserta didik dengan memperhitungkan jarak dari tempat tinggal ke sekolah yang dituju. Dari perhitungan jarak tersebut, peserta didik terbagi atas zonasi prioritas satu, dua, dan tiga.

Untuk jalur seleksi zonasi ini, kriteria pertama yang dilihat adalah zonasi prioritas peserta didik, apakah masuk prioritas satu, dua, atau tiga. Kedua, usia peserta didik.

Ketiga, urutan sekolah saat memilih sekolah tujuan. Dalam seleksi jalur zonasi ini tidak ada kriteria nilai raport peserta didik. Dalam PPDB, penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi mencapai 50% untuk SMA Negeri.

Seleksi melalui jalur zonasi dalam PPDB di Indonesia sudah diperkenalkan ke publik tahun 2016, dan diberlakukan secara efektif pada tahun 2017 sesuai Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ini dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan di Indonesia, karena berupaya untuk mereduksi adanya label pada sekolah tertentu sebagai unggulan dan non unggulan atau sekolah favorit dan non-favorit.

Namun, dalam perjalanannya, ternyata masih banyak terjadi penyalahgunaan atau indikasi kecurangan untuk masuk sekolah yang masih dianggap favorit di zona atau kawasan tersebut. Berbagai modus dilakukan agar peserta didik bisa diterima di sekolah favorit melalui zonasi PPDB,

misalnya, jual beli kursi, manipulasi Kartu Keluarga (KK), domisili tidak sesuai KK. Akhirnya, proses PPDB melalui jalur seleksi zonasi di sejumlah wilayah malah diwarnai adanya indikasi kecurangan.

Karut marut seleksi melalui jalur zonasi mendapat perhatian dari anggota Komisi X DPR RI yang membidangi masalah pendidikan. Berikut pemaparan anggota MPR dari Fraksi PPP yang juga anggota Komisi X DPR RI Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE., mengenai polemik jalur seleksi zonasi dalam PPDB. Berikut kutipannya.

Penerimaan siswa baru melalui jalur seleksi zonasi dalam PPDB di sejumlah daerah diwarnai dengan adanya indikasi kecurangan, seperti manipulasi kartu keluarga, domisili yang tidak sesuai dengan KK, bahkan ada peserta didik yang domisilinya dekat dengan sekolah justru tidak diterima. Bagaimana ibu melihat penerapan seleksi jalur zonasi dalam PPDB ini?

Memang persoalan dalam proses penerimaan siswa baru menjadi masalah

klasik yang ditemui setiap tahun ajaran baru. Pemerintah kadang membuat kebijakan dengan tidak berbasis survei atau kajian akademik. Misalnya, apa yang kami (di Komisi X) bahas mengenai Peta Jalan Pendidikan, kemudian program Merdeka Belajar, kita sudah mengkritisi dan menyuarakan aspirasi terhadap kebijakan Kemendikbud, tetapi kondisinya tetap tidak berubah.

Tentu kita menyangkan adanya indikasi kecurangan dalam seleksi jalur zonasi dalam PPDB ini. Kita akhirnya mendapatkan perilaku-perilaku buruk dari masyarakat kita yang terpaksa melakukan kecurangan dan kebohongan, bahkan termasuk ketika para orangtua ingin menyekolahkan anaknya.

Sistem seleksi PPDB telah dilakukan setiap tahun. Tetapi mengapa masih muncul kecurangan-kecurangan, terutama dalam seleksi penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi?

Penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi dalam PPDB ini dimaksudkan untuk pemerataan akses dan layanan pendidikan, karena akses dan layanan pendidikan di Indonesia belum merata. Sebab, masih ada kesenjangan di antara sekolah-sekolah. Keberadaan sekolah-sekolah favorit dan unggulan, yaitu sekolah-sekolah berprestasi yang banyak diminati para calon siswa baru jumlahnya sangat sedikit dibanding sekolah-sekolah yang bukan unggulan dan standar.

Penerimaan siswa baru melalui seleksi jalur zonasi sejak diterapkan selama tujuh



tahun belakangan ini memang belum memberikan dampak yang maksimal. Padahal, aturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB dimaksudkan domisili peserta didik menjadi satu kriteria untuk bisa mengakses layanan pendidikan lebih mudah. Tetapi seperti terjadi di Bogor, misalnya, ternyata peserta didik yang berada dekat lingkungan sekolah justru tidak diterima dan tidak bisa mengakses layanan pendidikan itu.

Apa yang menjadi penyebab penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi dalam PPDB ini selalu timbul masalah?

Kalau kita bicara tentang seleksi melalui jalur zonasi dalam PPDB ini, kita juga bicara tentang layanan kependudukan. Seharusnya, sistem kependudukan kita bisa mendeteksi mengapa terjadi perpindahan orang dalam jangka waktu tertentu. Sistem kependudukan itu kita evaluasi juga. Kemarin kita lihat ada kepala daerah yang melakukan pengecekan kependudukan pada saat seleksi penerimaan siswa melalui jalur zonasi dalam PPDB.

Kepala daerah yang turun langsung melakukan pengecekan tentu suatu langkah yang baik. Karena dengan begitu bisa diketahui secara persis perilaku masyarakat yang masih memanipulasi data agar anaknya bisa diterima di sekolah yang terbaik. Tetapi, kadang-kadang perilaku itu disebabkan karena anaknya tidak mau sekolah yang bukan unggulan di tempat lain.

Jadi, apakah memang munculnya masalah dalam seleksi siswa baru melalui jalur zonasi ini lebih disebabkan adanya sekolah-sekolah favorit sehingga mendorong orangtua memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah favorit itu?

Dari jalur seleksi peserta didik dalam PPDB, yaitu jalur prestasi, afirmasi, dan jalur zonasi, kuota penerimaan siswa melalui jalur prestasi memang lebih kecil dibandingkan penerimaan siswa melalui jalur zonasi. Kita mengharapkan, penerimaan siswa baru melalui jalur prestasi ini lebih banyak. Karena, dengan demikian, semua sekolah menerima banyak siswa berprestasi yang akan menaikkan prestasi sekolah dan terjadi pemerataan kualitas pendidikan.

Jadi, para orangtua tidak lagi harus mencari-cari sekolah yang favorit karena semua kualitas pendidikan merata. Para siswa didik juga pasti mencari sekolah yang terbaik. Akhirnya, lama-kelamaan sekolah-sekolah menjadi favorit semua, karena adanya pemerataan kualitas dan prestasi sekolah. Seharusnya, memang ada target-target yang ingin dicapai sehingga terjadi pemerataan pendidikan.

Apa langkah dari Komisi X DPR RI ini dan apa yang harus dilakukan Kemendikbud untuk membenahi penerimaan siswa baru (PPDB), khususnya seleksi melalui jalur zonasi?

Memang tidak semua daerah mengalami masalah dalam penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi. Masalah yang muncul dalam penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi hanya kasus per kasus. Kita mengharapkan masalah yang muncul dalam penerimaan siswa melalui jalur zonasi, seperti adanya manipulasi data, tidak menular ke wilayah-wilayah lain.

Meski demikian, masalah yang timbul dalam penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi dalam PPDB ini harus menjadi evaluasi. Maka, kami di Komisi X DPR ini mendesak pemerintah dalam hal ini Mendikbudristek untuk melakukan evaluasi menyeluruh seleksi penerimaan siswa baru dalam PPDB ini. Evaluasi ini perlu melibatkan para tokoh, organisasi yang peduli pendidikan, sehingga Kemendikbud tidak keliru dalam mengeluarkan kebijakan. □



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Marha Rifani, Siswi MAN IC Gorontalo

Bersama Dua Rekannya Mengikuti KSN *di Korea Selatan*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MARHA Rifani Fayza Bahsuan, siswi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Gorontalo, akan meluncur ke Korea Selatan untuk mengikuti Olimpiade Standar Internasional, yang berlangsung 21-23 Agustus 2023.

Bersama dua rekannya satu sekolah: **Nabilah Zukaeka Putri Darmawangsih** dan **Tiara Myreen Alilatulbariza Husain**, mereka akan tampil di ajang Kompetisi Standardisasi Nasional (KSN) dengan mengusung tema ‘Agroteknologi,’ yang ditampilkan dalam bentuk penulisan esai tentang

Autonomous Electric Vehicle dikolaborasi dengan system AI dan AR.

Pemilihan tema tersebut, menurut Marha, setelah melihat pertanian Indonesia, khususnya di Gorontalo, masih cukup lambat. Sehingga, mereka mencari inovasi agar pertanian menjadi lebih cepat dalam proses produksinya.

Di ajang KSN, yang memang khusus untuk siswa tingkat SMA/SMK ini, Marha Rifani dan rekannya akan berhadapan dengan para kontestan dari bagian dunia lainnya. □

DER

Kompetisi Robotik Dunia Tiga Pelajar Indonesia Sabet Emas

TIGA siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 (MTs.N) Kota Tangerang Selatan: **Fawaaz Amaar Abdul Mughni**, **Razin Anandri Firdaus**, dan **Muhammad Garibaldi Aziz**, yang tergabung dalam Tim Madtsane Robotic berhasil menyabet Gold Prize untuk kategori Creative Design dalam kompetisi 'The 10th Anniversary International Youth Robotic Competition 2023', di Daejeon Convention Centre, Korea Selatan, 4-5 Agustus 2023.

Dalam kompetisi itu, tiga siswa ini menampilkan robot ciptaan mereka yang diberi nama: LEWS (Landslide Early Warning System). Fungsi robot ini adalah sebagai pendeteksi dini potensi terjadinya tanah longsor sebagai efek dari bencana alam, seperti hujan ekstrim dan gempa bumi.

Selain mendapatkan medali emas, salah satu anggota kontingen MTs.Negeri 1 Tangsel, Fawaaz Amaar Abdul Mughni, juga berhasil meraih Medali Perunggu/juara 3, saat ikut bertanding di Liga Individual terbuka semua umur, kategori Humanoid Robot Mission. □

DER



Haruka Nakagawa

Dititip Pesan Kaisar Jepang Soal Indonesia

ARTIS cantik dan penyanyi bergenre J-Pop kelahiran Jepang, **Haruka Nakagawa**, ditunjuk sebagai perwakilan pop culture dalam acara kunjungan kenegaraan Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito dan permaisuri Masako di Jakarta beberapa waktu lalu.

Artis kelahiran Februari 1992 ini memulai debut keartisannya dengan bergabung di kelompok Japan Pop AKB 48 pada 2007-2012. Pindah ke Indonesia, lalu merintis karirnya dengan bergabung dalam kelompok JKT 48, sejak 2012 hingga 2016.

Saat bertemu Kaisar dan Permaisuri, Haruka tak sendiri. Ia ditemani artis Jepang, yang juga berkarir di Indonesia, Hiroaki Kato. "Kaisar berpesan kepada kami berdua agar menjaga dan memperkuat hubungan yang sudah harmonis dengan Indonesia," ujar Haruka bangga. □

DER



Taman Literasi Martha Tiahahu Belajar di Taman, Kenapa Tidak

TAMAN Literasi Martha Christina Tiahahu di kawasan pusat perbelanjaan dan terminal bus Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menjadi tempat yang kerap digunakan untuk transit sekaligus oase di tengah kota metropolitan. Dari pagi, siang, petang, hingga malam, ada saja pengunjung yang datang ke tempat tersebut. Mereka datang bukan sekedar untuk melihat dan mengunjungi taman, tetapi kehadiran mereka terkandung berbagai makna.

Ada yang datang untuk menikmati kenyamanan perpustakaan dan buku-buku yang tersedia di tempat tersebut. Ada yang sekedar berhenti sesaat, sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat yang hendak dituju. Atau, janji bertemu dengan seseorang. Hingga mereka yang sengaja istirahat sejenak dari penatnya pekerjaan. Yang pasti, banyak alasan membuat orang mampir dan berkunjung ke Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, karena tempat tersebut sangat strategis. Dan, berada di berbagai titik persimpangan.

Kepada Majalah *Majelis*, seorang pengunjung mengaku nyaman menikmati suasana perpustakaan di Taman Literasi



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Martha Christina Tiahahu. Selain buku-buku yang tersedia relatif lengkap, suasana ketenangan di perpustakaan tersebut sangat terasa. Padahal, taman tersebut berada di salah satu sudut kota tersibuk Jakarta. Namun, kebisingan yang ada di luar tidak mengganggu hingga ke arena perpustakaan.

Meski pengunjung Taman Literasi Martha Christina Tiahahu mengalir dan silih berganti sepanjang waktu, tetapi petang hari dan saat malam mulai menjelang adalah waktu yang paling diminati masyarakat berkunjung ke sana. Bisa jadi karena mereka

sengaja menunda perjalanan menghindari macet. Atau sekedar menikmati pemandangan di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu yang memang terlihat sangat indah.

Saat malam menjelang, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu mampu menghadirkan keindahan alam yang sempurna. Perpaduan antara cahaya langit yang kian meredup dengan temaram lampu di taman, sanggup hadirkan suasana yang syahdu. Apalagi, pada jam-jam tersebut angin di kawasan tersebut berhembus nakal, sepoi-sepoi ringan. Ditemani secangkir



kopi dan makanan ringan yang banyak dijajakan di sana perjalanan menyusuri petang akan terasa semakin cepat. Dan, saat tersadar, malam sudah semakin tinggi bersemayam dalam peraduannya.

Tidak seperti kawasan terbuka hijau lain di Jakarta, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu mampu mencitrakan dirinya sebagai taman belajar. Buku dan pamflet yang ada di sana memperkuat munculnya kesan itu. Setidaknya, itulah yang ditemui Majelis saat berkunjung di sana beberapa waktu lalu.

Saat itu ada puluhan anak sekolah dasar yang berkunjung ke tempat tersebut. Mereka tidak sekedar bermain, laiknya di taman. Sebaliknya, mereka tengah berasyik-masyuk memerhatikan dan juga mendengarkan arahan petugas kepolisian seputar cara berkendara yang baik. Mereka juga memerhatikan setiap gerakan yang diperagakan oleh anggota polisi. Juga rambu-rambu yang sengaja dikenalkan agar para siswa itu mengerti sejak dini.

Instagramable

Sebagai kawasan yang sempat menjadi buah bibir, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu memang sangat menarik. Munculnya ruang baca di tempat tersebut begitu menonjol, dan memberi kesan kuat sebagai Taman Literasi. Sebagai tempat terbuka hijau, ruang publik ini memiliki desain arsitektur bangunan yang estetik, instagramable, dan memiliki sudut-sudut yang juga berfungsi sebagai spot-spot foto.

Taman Literasi Martha Christina Tiahahu memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Taman yang direvitalisasi dan diresmikan era Gubernur DKI Jakarta Anies



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Baswedan ini tidak hanya diperuntukkan bagi rekreasi alam, tetapi juga untuk peminat berolahraga jalan sehat.

Area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dibangun di atas lahan seluas 9.710 meter persegi. Kawasan ini memiliki berbagai fitur dan area yang sangat menarik. Antara lain paviliun literasi, selasar pandang, amphitheatre, taman plaza, taman bermain, healing garden, hingga kolam teratai.

Bila Anda berkunjung ke taman ini, dari depan pintu masuk sudah terlihat kolam teratai berbentuk lingkaran. Kolam itu berada di area Plaza Kabareasi, yang di sekelilingnya diisi kursi panjang untuk pengunjung duduk-duduk santai. Kursi-kursi yang disebut sebagai Amphitheatre, itu memiliki dua tingkatan, sehingga kapasitas pengunjung yang bisa duduk juga cukup banyak.

Di taman ini terdapat beberapa kafe yang bisa menjadi pilihan. Selain duduk-duduk, pengunjung juga bisa berjalan kaki ke

area lantai dua. Di sini terdapat taman atap Abubu yang juga berbentuk melingkar, mengikuti area bawah.

Dari tempat ini terlihat pemandangan yang sangat menarik dari kawasan Blok M dan taman di bawahnya. Di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu juga ada taman bermain anak dan healing garden yang bisa ditemukan di area belakang taman ini. Healing garden sendiri ditumbuhi pepohonan rindang dan ada banyak kursi yang cocok untuk tempat mengobrol bersama teman-teman. Tempat ini sangat cocok untuk curhat, atau mendengarkan curhatan teman yang butuh teman untuk menceritakan kesedihan yang tengah di hadapinya.

Jadi, kalau Anda butuh tempat untuk ngobrol, curhat atau bahkan mencari inspirasi, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu bisa jadi alternatifnya. Bahkan, untuk belajar atau sekedar membaca buku, kenapa tidak. □

MBO

Rapat Konsultasi Pimpinan MPR RI dengan Presiden RI

Bamsoet: Presiden Jokowi Pastikan Hadir dalam ST MPR RI, 16 Agustus

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memastikan, Presiden Joko Widodo akan hadir dan menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam Sidang Tahunan (ST) MPR RI Tahun 2023, di Gedung Nusantara MPR RI pada 16 Agustus 2023.

Selain membahas persiapan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023, serta Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI, dalam rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo tersebut, Bamsoet bersama pimpinan MPR RI lainnya juga menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa MPR RI melalui Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan tengah melakukan kajian mendalam dan menyeluruh atas UUD NRI Tahun 1945.

Indonesia harus mulai memikirkan melakukan perubahan terhadap konstitusi untuk menjawab berbagai persoalan kebangsaan, sekaligus menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman. Namun, waktu yang tepat adalah setelah selesainya Pemilu (Pileg dan Pilpres) 2024, sehingga suasana lebih kondusif.

Pimpinan MPR RI juga menyampaikan kepada Presiden, sesuai tugas konstitusionalnya, MPR RI saat ini tengah melakukan pengkajian sistem ketatanegaraan. Meskipun telah dilakukan empat kali amandemen, ternyata masih banyak persoalan besar yang belum terakomodir dalam konstitusi. Misalnya, jika menjelang Pemilu terjadi sesuatu di luar dugaan, seperti bencana alam yang dahsyat, peperangan besar, pandemi penyakit yang belum diketahui cara menanganinya, krisis ekonomi dan keuangan yang mengancam stabilitas dan kemandirian negara, maka lembaga negara manakah yang berwenang menunda Pemilu?



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“Jika Pemilu ditunda, bagaimana pengaturan konstitusionalnya terhadap masa jabatan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi hingga Kabupaten/Kota, serta jabatan para Menteri kabinet yang harus berhenti tepat lima tahun? Berbagai masalah tersebut belum ada jalan keluar

konstitusionalnya setelah amandemen keempat konstitusi. Karena itu, perlu perhatian yang sungguh-sungguh dari kita semua sebagai warga bangsa,” ujar Bamsoet usai melakukan Rapat Konsultasi antara Pimpinan MPR RI dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/8/23).





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi itu dihadiri oleh seluruh Pimpinan MPR. Selain Bamsuet, mereka adalah Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Yandri Susanto, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, amandemen konstitusi juga diperlukan selain untuk menghadirkan kembali Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dan Utusan Golongan juga untuk menambah ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) agar jangan hanya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Melainkan juga memasukkan unsur ruang udara yang keseluruhannya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Selain terkait amandemen konstitusi, persoalan konstitusional kebangsaan lainnya yang perlu dijawab, yakni apakah MPR RI masih dapat melahirkan TAP MPR RI

yang dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti dicontohkan tadi? Dimasa sebelum amandemen keempat konstitusi, MPR RI memang telah menetapkan berbagai ketetapan yang bersifat pengaturan untuk melengkapi kevakuman pengaturan di dalam konstitusi kita. Persoalannya saat ini, apakah setelah berbagai amandemen terhadap konstitusi tersebut, MPR RI masih memiliki kewenangan untuk melahirkan ketetapan-ketetapan? Persoalan ini sangat perlu untuk dipikirkan dan diskusikan bersama demi menjaga keselamatan dan keutuhan kita sebagai bangsa dan negara,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menambahkan, MPR RI juga menilai telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam 20 tahun terakhir. Antara lain perubahan dalam dinamika geopolitik, hingga lompatan teknologi yang melahirkan kebutuhan untuk melakukan transformasi pertahanan dan keamanan.

Untuk itu, Indonesia perlu mengantisipasi berbagai kebutuhan transformasi ini dengan menghadirkan kembali haluan negara yang kini sedang disiapkan oleh MPR RI dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Keberadaan PPHN sebagai road map pembangunan bangsa sangat penting.

“Selain terkait dengan pertahanan, keamanan, serta tentang fungsi TNI dan Polri untuk memastikan Indonesia memiliki kerangka kerja konstitusional yang mampu menangkap perubahan terkini, PPHN juga dapat memastikan berbagai program pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo tetap dilanjutkan oleh penerusnya. Misalnya pembangunan IKN Nusantara, kereta cepat Jakarta hingga Surabaya, maupun konektivitas transportasi publik Jabodetabek. Bentuk hukum paling ideal terhadap PPHN, yakni melalui TAP MPR RI, sehingga tidak bisa dijudicial review ke Mahkamah Konstitusi maupun di ‘torpedo’ oleh Perppu,” pungkas Bamsuet. □



H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI

Menjawab Aspirasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Ketatanegaraan

PEMBANGUNAN berkelanjutan menjadi salah satu tema yang paling banyak dibahas berbagai elemen masyarakat akhir-akhir ini, di sela-sela persiapan menuju Pemilihan Umum 2024. Kecenderungan itu didorong oleh fakta bahwa realisasi dari ragam program pembangunan tahun-tahun terakhir ini nyata-nyata telah menghadirkan nilai tambah bagi kehidupan bersama, dan mayoritas rakyat ingin agar sejumlah program dapat dilanjutkan. Sangat bijaksana jika sistem ketatanegaraan dapat mengakomodir aspirasi tentang pembangunan berkelanjutan itu.

Kendati belum dapat memuaskan semua elemen masyarakat, dinamika pembangunan selama hampir satu dekade terakhir ini tak hanya menunjukkan hasil nyata, melainkan juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kebanyakan pada berbagai aspek kehidupan. Memang, di tengah dinamika pembangunan yang masif itu, masyarakat tak jarang dibuat kecewa oleh perilaku tak terpuji aparaturnegara melalui pengungkapan beberapa kasus, terutama kasus-kasus korupsi, bentuk-bentuk lain penyalahgunaan wewenang, termasuk minimnya kepedulian sejumlah pemimpin daerah pada masalah riil di daerahnya. Ragam permasalahan itu menjadi bukti nyata yang menjelaskan betapa tidak mudahnya revolusi mental itu. Hasil dari sebuah revolusi mental butuh proses yang amat panjang.

Sekalipun masih digelayuti masalah klasik seperti tersebut di atas, tekad dan semangat pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan setidaknya sudah diperlihatkan dan dibuktikan. Data-data infrastruktur baru di seluruh wilayah tanah air lebih dari cukup untuk menjelaskan tentang wujud

nyata pemerataan pembangunan itu. Kendati sebagian masih dibiayai dengan utang luar negeri, pembangunan tidak lagi terfokus di Jawa, melainkan berpijak pada kebijakan Indonesia sentris. Melalui penyaluran dana desa, semua desa diberi wewenang untuk membangun wilayahnya. Sempat menghadapi Pandemi Covid-19 selama dua tahun dengan segala risiko kerusakannya, stabilitas ekonomi nasional terbukti tetap terjaga, bahkan sempat mencatatkan pertumbuhan impresif.

Semua pencapaian sepanjang satu dekade terakhir ini memang mendapat apresiasi dari sebagian besar masyarakat. Namun, disaat bersamaan, disadari juga bahwa pencapaian itu belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan negara-bangsa. Apalagi jika dikaitkan dengan target-target strategis mewujudkan profile Infonesia Emas 2045. Masih banyak yang harus dikerjakan di dekade-dekade mendatang. Sebutlah program ketahanan dan kemandirian pangan, percepatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pemenuhan kebutuhan akan talenta digital, pendalaman sektor industri melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA) hingga percepatan tersedianya energi baru terbarukan (EBT).

Dari dinamika pembangunan dengan segala hasilnya itu, ada fakta dan kecenderungan yang patut digarisbawahi. Paling utama tentu saja fakta tentang tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Berpijak pada indikator kepuasan publik itu, kesimpulan yang layak dikedepankan adalah mayoritas masyarakat telah memberi persetujuan terhadap prioritas program yang direalisasikan selama satu dekade terakhir ini. Dan, dari aspek kepuasan publik itu pula, kecenderungan

yang muncul kemudian adalah kehendak atau aspirasi mayoritas rakyat agar arah pembangunan nasional dengan sejumlah program yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman dilanjutkan.

Gambaran tentang kepuasan publik itu sebelumnya telah dipublikasikan. Pada Mei 2023, lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengumumkan hasil survei terbaru mereka yang memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 81,7%. Demikian pula hasil survei oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipublikasikan pada pekan kedua Juli 2023 nyaris sama. LSI mencatat, tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 81,9%.

Selain itu, Survei SMRC juga menunjukkan bahwa 57% responden menginginkan sosok calon presiden (Capres) hasil dari pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dapat melanjutkan program dan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris sama, hasil survei Voxpol Center Research and Consulting juga menyebutkan bahwa bahwa 51% responden menilai program Presiden Jokowi layak dilanjutkan oleh Presiden RI terpilih dari Pemilu 2024.

Dari hasil survei itu, pesannya sangat jelas. Mayoritas masyarakat berkehendak agar pemerintah selalu memberi prioritas pada program-program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan rakyat, dan juga relevan dengan ragam tantangan baru seturut perubahan zaman. Pesan penting lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk semua program atau proyek yang nyata-nyata telah memberi nilai tambah dan manfaat pada berbagai aspek kehidupan bersama.

Makna dari pesan mayoritas masyarakat itu sangat strategis. Pesan itu menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus menunjukkan kehendak baiknya dengan sungguh-sungguh peduli pada kebaikan bersama. Berani membuat keputusan atau kebijakan, sekalipun kebijakan itu belum tentu menyenangkan semua orang. Pemimpin harus berani fokus pada program-program prioritas yang relevan dengan kebutuhan negara-bangsa.

Dan, dalam konteks membangun negara-bangsa, seorang pemimpin tidak boleh beres eksperimen dengan program-program yang tidak relevan dengan kebutuhan rakyat. Oleh karena Indonesia harus memilih Presiden baru pada 2024, semua elemen masyarakat diingatkan untuk bijaksana dalam menggunakan hak pilihnya. Sejatinya, Indonesia tetap dan selalu membutuhkan sosok pemimpin yang sungguh-sungguh peduli pada kebaikan bersama, dengan melanjutkan ragam program pembangunan yang nyata-nyata menjadi kebutuhan riil negara-bangsa.

Paling menarik untuk dicerna dari kecenderungan sekarang ini adalah kepedulian masyarakat kebanyakan terhadap pentingnya agenda pembangunan berkelanjutan. Kecenderungan ini menjelaskan bahwa masyarakat sudah memahami arah pembangunan nasional. Berpijak pada pemahaman itulah masyarakat terus dan selalu mengamati realisasi proyek-proyek pembangunan di berbagai sektor. Dari situlah muncul kehendak agar program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dilanjutkan

Dengan begitu, patut dibuat kesimpulan bahwa prinsip tentang urgensi pembangunan berkelanjutan sudah menjadi aspirasi masyarakat yang telah disuarakan dengan lantang akhir-akhir ini. Aspirasi ini hendaknya segera ditanggapi lembaga perwakilan rakyat dengan menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem ketatanegaraan. MPR RI, saat ini, terus memproses rumusan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai penunjuk arah proses pembangunan berkelanjutan negara-bangsa.

PPHN menjadi keniscayaan, karena mewujudkan profil Indonesia Emas 2045 adalah proses bertransformasi untuk menjadi negara maju. Proses itu tak lain adalah pembangunan berkelanjutan yang harus dirawat dengan konsisten oleh sistem hukum ketatanegaraan yang kuat dan efektif. Maka, pembangunan berkelanjutan dengan semua agenda strategis dan rangkaian prosesnya itu harus ditetapkan dalam PPHN yang wajib dipatuhi setiap administrasi pemerintahan. □

Memperkaya Pancasila dengan Nilai-nilai Islam

KETIKA kita bicara tentang Pancasila, ada dua hal yang kita diajarkan untuk tidak perlu atau tidak boleh lagi mempersoalkannya. Pertama, rumusan formal kelima sila-nya yang kita sudah diajarkan sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kedua, tentang kedudukannya sebagai dasar negara, idiologi bernegara dan filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Namun demikian, agar prinsip-prinsip yang terkandung di dalam setiap sila Pancasila tetap aktual dan relevan dengan perkembangan zaman dan realitas dan kultur masyarakat yang dinamis maka Pancasila perlu kita tempatkan sebagai Ideologi bernegara dan berbangsa yang terbuka dan dinamis.

Sebagai sebuah ideologi bernegara yang terbuka, Pancasila tidak seyogianya mendapat tafsiran sekali jadi untuk selamanya (*once for all*). Tidak seyogianya pula satu badan menjadi penafsir tunggal yang memiliki hak untuk menafsirkannya secara "final dan mengikat" sebagaimana di negara-negara totaliter. Masyarakat harus memiliki ruang partisipasi dalam menjabarkan nilai-nilai yang dikembangkan dari Pancasila sebagai ideologi bernegara dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, sistem politik yang terbuka, yang demokratis, yang memberi keleluasaan kepada warga negara untuk menyatakan pendapat perlu terus dikembangkan.

Pengalaman sejarah kita menunjukkan bahwa pada masa-masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, Pancasila telah ditafsirkan secara "hegemonik." Pada masa Demokrasi Terpimpin, menyusul Dekrit 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengenalkan gagasan Manipol/USDEK sebagai "tafsir" Pancasila. Pancasila dan Manipol/USDEK disebut sebagai satu kesatuan, sebagaimana Alquran dan Hadis. Bung Karno mengatakan, "Quran dan Hadis sah merupakan satu kesatuan maka Pancasila dan Manifesto Politik dan USDEK pun merupakan kesatuan. Alqur'an dijelaskan dengan

Hadis, Pancasila dijelaskan dengan Manifesto Politik serta intisarinya yang bernama USDEK. Manifesto Politik adalah pemancaran daripada Pancasila. USDEK adalah pemancaran daripada Pancasila. Manifesto Politik, USDEK, dan Pancasila adalah terjalin satu sama lain."

Adapun pada masa Orde Baru, tafsir "hegemonik" terhadap Pancasila diwujudkan dalam bentuk Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila alias P4. Tafsir "tunggal" Pancasila pada masa Orde Baru ini memang menjadikan Pancasila sebagai sebuah ideologi yang komprehensif: sumber dari segala sumber hukum, jiwa dan kepribadian bangsa, pandangan hidup, tujuan, perjanjian luhur, dasar negara, dan seterusnya. P4 yang berisi 36 butir ini disosialisasikan di lembaga-lembaga pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi melalui pelajaran-pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), serta penataran-penataran P4 untuk berbagai kalangan masyarakat. Pada masa Orde Baru pula partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan harus menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Sebagaimana halnya Manipol/USDEK-nya Bung Karno yang berakhir eranya setelah terjadinya peristiwa G-30-S., maka Orde Baru yang menggantikan orde sebelumnya, juga tergeser oleh kekuatan reformasi pada tahun 1998. Orde Reformasi meniadakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai tafsir Pancasila yang "hegemonik".

Kini, Pancasila telah menjadi ideologi bersama dan telah membuka dirinya untuk diperkaya dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dan, organisasi politik serta organisasi kemasyarakatan boleh menganut nilai-nilai yang diambil dari ajaran dan ideologi lain sepanjang tidak ditransformasikan menjadi ideologi politik yang berlawanan dengan Pancasila. Hal ini tampak pada partai-partai politik Islam yang menggunakan atau mengenakan kembali asas Islam seperti halnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan ormas-ormas keagamaan Islam yang mencantumkan asas

Oleh:
Arsul Sani
Wakil Ketua MPR RI



Islam tersebut.

Sebagai ideologi terbuka maka pemaknaan terhadap Pancasila membuka perspektif yang tidak tunggal. Perspektif yang tidak satu dalam melihat Pancasila ini tentu kita harapkan akan menjadikan Pancasila bukan saja kaya akan nilai-nilai, tapi juga akan menjadi subur dan bertambah kuat dengan diamalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-nya oleh masyarakat. Bagi umat Islam, misalnya, sejak zamannya Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, dan tokoh-tokoh Islam lainnya yang berperan dalam merumuskan dasar negara, sampai generasi sekarang, memaknai sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai tauhid. Pemahaman ini juga dianut oleh Mohammad Hatta yang kita kenal sebagai tokoh nasionalis-religius. Dalam sebuah brosur khusus (1981), Bung Hatta kembali mengemukakan bahwa sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sama dengan tauhid. Bung Hatta juga berpendapat bahwa keempat sila lainnya - Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia — semuanya merupakan penjabaran dari sila pertama dalam sila atau bidang bersangkutan.

Dalam kaitan ini, salah seorang ulama besar Indonesia yang menjadi ketua umum MUI pertama, yaitu Buya Hamka, menyatakan bahwa Pancasila merupakan pangkal pokok dalam kehidupan. Sila ke satu: Ketuhanan Yang Maha Esa, kata Hamka, menjadi pangkal dari keempat sila lainnya. Ajaran Islam yang berpangkal pada tauhid ini merupakan pokok isi kandungan dari Ketuhanan Yang Maha Esa. "Pancasila wajib diamalkan dan diamankan. Bila umat muslim mengamalkan ketaatan terhadap agamanya maka dengan sendirinya Pancasila akan terjamin keselamatannya. Dan, orang yang tidak mengamalkan agamanya berarti dia tidak mengamalkan dan mengamankan Pancasila," kata Buya.

Buya Hamka juga menyatakan, Pancasila menjadikan negara In-

donesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga tercipta cita-cita bersama yaitu *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kata Buya Hamka, menumbuhkan kelapangan dada (*tasamuh*) dari rasa hormat kepada pemeluk agama lainnya. "Tapi pedoman hidup berasal dari Alquran, maka Alquran yang mewajibkan untuk berlapang dada," ungkap Buya Hamka. Lebih jauh, Buya menyatakan, Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia akan hidup dengan subur dan dapat terjamin jika kaum muslimin sungguh-sungguh memahami agamanya, sehingga agama menjadi pandangan dan memengaruhi seluruh langkah hidupnya. Kata beliau, tidak ada suatu agama dan paham atau ideologi yang dapat menjamin kesuburan Pancasila di Indonesia melebihi Islam. Pertama karena dijamin oleh kesatuan ajaran Islam itu sendiri. Kedua, karena pemeluk Islam-lah yang terbesar di Indonesia. Beliau mengingatkan, banyak bisik-bisik yang menyebutkan bahwa kaum muslimin anti-Pancasila, banyak dari ulama dan pemimpinnya yang anti-Pancasila. Bahkan dikatakan sebagian besar menerima Pancasila karena terpaksa. "Pancasila adalah pangkal pokok dalam kehidupan. Kita harus kembali kepada Pancasila yang murni, bahwa segala pokok pangkal Pancasila ialah percaya kepada Tuhan, dan Tuhan itu Esa adanya.

Tentu saja, pemahaman atau tafsir Ketuhanan Yang Maha Esa yang oleh umat Islam dimaknai tauhid itu tidak serta merta menjadikan sila ini eksklusif milik umat Islam. Kalangan non-muslim pun pasti punya pemahaman sendiri sesuai dengan ajaran mereka masing-masing. Di sinilah perlunya umat Islam memiliki sikap *tasamuh* atau toleransi yang diartikan Buya Hamka sebagai lapang dada itu. Sikap-keberagaman kaum muslimin yang harus toleran ini diperkuat dengan sikap-sikap lainnya seperti *tawasuth* (moderat), *tawazun* (seimbang). Nilai-nilai inilah antara lain yang memperkaya dan memperkokoh ideologi Pancasila. □

Berpolitik Tanpa Kebencian

Berbagai lontaran dan pendapat Mardani Ali Sera kerap menghiasi berbagai media massa. Apa yang dikatakan sebagai kritik kepada kekuasaan. Ketegasan yang dibalut dengan kelembutan tak hanya ditampilkan di depan publik. Di buku yang ia tulis, anak Betawi itu juga lantang, #KamiOposisi. Meski demikian dikatakan dalam berpolitik kebencian bukan menjadi landasan.

NAMA Mardani Ali Sera di kalangan para politisi, apalagi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), merupakan nama yang sangat populer. Anak Betawi kelahiran Jakarta, 9 April 1968 itu kerap mengisi *talkshow*, debat, bincang, dan *live* politik di berbagai program televisi yang mengupas isu-isu aktual. Meski tutur katanya yang lembut dan sopan, namun alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia itu adalah sosok pemberani.

Saat *talkshow*, Mardani Ali kerap berhadapan dengan para politisi yang tutur katanya keras, kasar, dan terkadang mem-bully. Meski demikian ia tak gentar dan terus menyampaikan pendapat-pendapatnya dan tak kapok melayani wartawan untuk diminta pendapatnya. Di luar itu, buzzer pun sering menyerangnya, namun dirinya bergeming dari kata-kata sumpah serapah mereka.

Ketegasan dan keberanian alumni SMA Negeri 1 Jakarta itu tidak hanya ditampilkan di depan publik. Di buku dirinya pun, ia menunjukkan hal yang sama. Dalam buku yang sampulnya bergambar dirinya, dengan tegas ia memberi judul #KamiOposisi, Aksi Politik Santun & Beradab.

Dalam *Pengantar Penulis* di halaman vii, ia mengatakan, buku ini akan dibuka dengan menyuguhkan argumen yang lebih detail dan terperinci tentang mengapa perlu oposisi. Di buku ini dia menjelaskan tentang seluk beluk argumen kenapa oposisi penting dalam demokrasi. Jika tidak, orang memilih parlemen jalanan.

Di buku yang diterbitkan oleh RMS Books, alumni Universitas Teknologi Malaysia itu menjelaskan tentang jenis-jenis dan model-model oposisi. Keduanya diulas dalam perspektif dalam maupun pengalaman demokrasi di berbagai negara.

Dari kata pengantar di atas maka buku yang memiliki ketebalan xi + 121 halaman itu dibagi dalam enam judul besar (bab). Biar pembaca tidak *nggrambyang* (bingung) dalam membaca bukunya, di bab pertama Mardani Ali menjelaskan apa itu oposisi. Selanjutnya diterangkan jenis dan model oposisi. Salah satu infrastruktur oposisi, menurutnya, adalah partai politik.

Di Indonesia soal oposisi dalam buku itu dikatakan sebagai bukan

hal baru, buktinya di negeri ini ada sejarah tentang oposisi. Hal demikian dijelaskan dalam bab *Oposisi Politik di Indonesia Dari Masa ke Masa* (halaman 47). Dalam bagian itu, Mardani Ali menyebutkan, dalam sejarah oposisi di Indonesia, posisi oposisi bergerak seperti gelombang air, timbul tenggelam. Dikatakan, Indonesia memiliki sejarah politik yang panjang. Sejak kemerdekaan, bangsa ini telah mengalami beberapa kali amandemen konstitusi yang berimplikasi pada dinamika politik, termasuk terkait oposisi dari

masa ke masa. Dinamika tersebut akan diperlihatkan mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, transisi hingga pemilu langsung.

Pada keempat masa itu dirinya mengakui peran dan fungsi oposisi naik turun. Ada kalanya oposisi memainkan peran penting secara formal melalui parlemen, namun di saat lain partai politik bergabung dengan peran-peran non-formal melalui bersama masyarakat sipil dalam mengontrol negara.

Semua langkah yang dilakukan oleh Mardani Ali, baik tindakan dan gagasan yang dilakukan merupakan langkah untuk menegakkan demokrasi, perlu adanya check and balance. Kebencian bukan landasan bagi dirinya untuk beroposisi. Hal demikian dijelaskan dalam bab *Menjadi Oposisi Kabinet Kerja* (halaman 67).

Suami Siti Oniah itu mengatakan, saat dirinya mengampanyekan hastag

#2019GantiPresiden, dirinya bukanlah seorang anti Joko Widodo. Sejak awal apa yang dilakukan itu bukan gerakan 'asal bukan Jokowi'. Maka salah bila dikatakan #2019GantiPresiden diartikan alat untuk menyerang personal Joko Widodo.

Dalam buku itu, dirinya mengatakan, secara pribadi tak pernah punya masalah dengan mantan Walikota Solo itu. Bagi Mardani Ali, Joko Widodo orang yang baik. Beliau benar-benar senang bekerja. Motto: kerja, kerja, kerja yang diusung dikatakan bagus. Meski demikian dia menegaskan, sayangnya kerja Joko Widodo pada arah yang salah. Dari sinilah, ia memainkan pihak yang akan mengoreksi kebijakan dan sikap politik salah arah tadi. □

AWG





MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



